

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/354200366>

Pertahanan Negara

Book · August 2021

CITATIONS

0

READS

830

7 authors, including:



Suhirwan Suhirwan

Universitas Pertahanan Indonesia

95 PUBLICATIONS 173 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Lukman Yudho Prakoso

Indonesia defense university

712 PUBLICATIONS 433 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Tsl Toruan

Universitas Pertahanan Indonesia

4 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Budi Pramono

Indonesia Defense University

272 PUBLICATIONS 52 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



RISK MANAGEMENT [View project](#)



Publish article [View project](#)

Pengantar:
Prof. Dr. Ir. Supartono, MM., CIQAR

E-BOOK

BUNGA RAMPAI

PERTAHANAN NEGARA

CATATAN 7 PRAJURIT AKADEMISI



76 Indonesia
Merdeka

Penulis:

**SUHIRWAN
KASIH PRIHANTORO
LUKMAN YUDHO PRAKOSO
SOVIAN ARITONANG
BUDI PRAMONO
TSL TORUAN
YUSUF**

Editor:

Mia Kusmiati



Bunga Rampai

PERTAHANAN NEGARA

Catatan 7 Prajurit Akademisi

Penulis:

Suhirwan

Kasih Prihantoro

Lukman Yudho Prakoso

Sovian Aritonang

Budi Pramono

TSL Toruan

Yusuf

(Universitas Pertahanan)

Editor: Mia Kusmiati

PENERBIT CV. AKSARA GLOBAL AKADEMIA

Bunga Rampai
PERTAHANAN NEGARA
Catatan 7 Prajurit Akademisi

ISBN: 978-623-6387-13-9

x + 129 hlm: 15 x 23 cm

Kata Sambutan:

Laksamana Muda (Purn) Prof. Dr. Ir. Supartono, M.M., CIQaR

PENULIS:

Dr. Ir. Suhirwan, S.T., M.MT., M.Tr.Opsla., CIQaR., CIQnR., IPU

Dr. Kasih Prihantoro, S.E., M.M., M.Tr.(Han)

Dr. Lukman Yudho Prakoso, S.IP., MAP., CIQaR

Dr. Ir. Sovian Aritonang, S.Si., M.Si

Dr. Budi Pramono, S.IP., MM., MA., (GSC)., CIQaR., CIQnR

Dr. Drs. Tahan Samuel Lumban Toruan, MM., Dips.SS., CIQaR

Dr. Yusuf, S.Sos., MM

Editor:

Mia Kusmiati, MM, CT

Desain Sampul :

Mia Aksara

Penata Letak:

Hendra Jatnika, S.Kom., M.Kom, MOS, MTA, MTCNA, MTCRE

Penerbit:

CV AKSARA GLOBAL AKADEMIA
INDONESIA

Terbitan Pertama, Agustus 2021

Isi Tulisan di luar Tanggung Jawab Penerbit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa seizin sah dari penerbit

Copyright protected by law

It is prohibited to quote part or all of the contents of the book in any way, including by using a copier, without the legal permission of the publisher

KATA SAMBUTAN

Laksamana Muda TNI (Purn)
Prof. Dr. Ir. Supartono, M.M., CIQar

Assalamu'alaikum Wr.Wb



Alhamdulillah, segala puji selalu Kami panjatkan kepada Allah SWT atas ridho-Nya bangga dan apresiasi terhadapnya terbitnya buku Bunga Rampai Pertahanan Negara, Catatan 7 Prajurit Akademisi ini.

“Civis Pacem Para Belum” Jika ingin damai kita harus siap perang. Perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional berdampak kepada munculnya ancaman faktual dan potensial, sehingga segenap bangsa dalam

konsep pertahanan rakyat semesta harus selalu waspada. Sistem pertahanan rakyat semesta telah dibangun dengan mengintegrasikan semua komponen bangsa

Dihadapkan dengan segala tantangan yang akan muncul di masa depan dimana ancaman yang datang sudah merupakan ancaman yang berupa hibryda dimana ancaman tersebut sudah tidak bisa lagi dibedakan berupa ancaman militer atau nonmiliter, ancaman gabungan yang terjadi nanti sudah tidak mengenal batas wilayah dan state actor. Sebagai contoh ancaman cyber yang dapat menyerang berbagai bidang di negara kita tercinta ini. Dibutuhkan Sistem pertahanan negara yang terbaik agar segala tantangan, gangguan dan hambatan dimasa kini dan akan datang dapat ditangani dengan baik

Keberadaan Universitas Pertahanan RI merupakan Langkah strategis untuk menghasilkan akademisi-akademisi yang handal dalam berkontribusi kepada keilmuan pertahanan. Pemikiran-pemikiran strategis bidang pertahanan dan kemandirian dihasilkan dari Unhan RI ini. Menjadi suatu kebanggaan dan tumpuan

harapan bahwa bangsa ini akan tentram dan damai dengan kondisi pertahanan dan kemanan yang selalu aman dan damai.

Akhirnya saya ucapkan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih atas partisipasi para penulis yang telah menuliskan buku National Defense Strategy. Saya yakin buku ini akan bermanfaat bagi para pembaca dalam mengembangkan keilmuan khususnya ilmu-ilmu pertahanan.

Wassalamu Alaikum,Wr,Wb

Surabaya: 17 Agustus 2021

Prof. Dr. Ir. Supartono, M.M., CIQar
Laksamana Muda TNI (Purn)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan bimbingan-Nya sehingga penulisan buku ini dapat kami selesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Adapun buku ini disusun untuk dijadikan karya tulis yang special bagi kami dalam berkarir sebagai dosen serta dalam menunaikan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Menyambut HUT RI ke 76, maka kami berinisiatif berkumpul untuk mengumpulkan karya kami menjadi bunga rampai mengenai Pertahanan Negara, yang diharapkan bisa menjadi sumbangsih buah pikir kami untuk kemajuan Ibu Pertiwi Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut sangat luas yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar, namun, memiliki potensi ancaman yang besar pula baik berupa ancaman di darat, laut, maupun udara. Hal ini menjadi hal yang perlu diantisipasi disamping pengelolaan sumber daya manusia bidang militer (TNI) yang dibutuhkan dalam tegaknya NKRI yang perlu terus dipupuk dan dijaga.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan buku ini tidak terlepas dari segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis menyampaikan penghargaan pribadi dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya, khususnya kepada Editor dan Tim Publikasi, keluarga tercinta, rekan-rekan, para mahasiswa yang sudah membantu penulis dalam memberikan spirit, arahan dan do'anya. Wassalamu'alaikum wr.wb..!!!

Jakarta, 17 Agustus 2021

Penulis

TENTANG BUKU

Buku ini dipersembahkan untuk RI dalam HUT RI ke 76, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Buku ini membahas mengenai Pertahanan Negara dari berbagai sisi diantaranya wilayah laut, udara dan darat. Hal ini dimaksudkan sebagai antisipasi dari ancaman wilayah, radikalisme, obat-obat terlarang yang potensinya sangat tinggi. Beberapa ancaman yang mengintai pertahanan negara Indonesia diantaranya berupa kejahatan lintas negara yang terorganisir (*Transnational Organised Crime*) terorisme, trafficking, kejahatan dunia maya, perang siber, dan lain sebagainya. Disamping itu buku ini menyinggung pentingnya peningkatan pendidikan dalam melahirkan sumber daya manusia seperti perwira tinggi TNI yang dibutuhkan dalam tegaknya NKRI. Strategi pertahanan negara menjadi hal yang krusial sehingga perlu konsentrasi maupun pengembangan-pengembangan yang dilakukan guna menjaga pertahanan negara secara optimal.

Pada Bab 1, membahas mengenai, Dukungan KRI dalam Pertahanan Negara. Bab 2, membahas mengenai Lingkungan Strategis Pertahanan Negara, Bab 3, membahas mengenai Mengenai Mengenal Pertahanan Negara dalam Lingkungan Global, Bab 4, membahas mengenai Prodi Teknik Elektro Militer Universitas Pertahanan RI dalam Mendukung Pertahanan Negara, Bab 5, membahas mengenai Forum Maritim dalam Penanggulangan Ancaman Negara, Bab 6, membahas mengenai Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam Meningkatkan Bela Negara, Bab 7, membahas mengenai Program TMMD dalam Mendukung Pertahanan Negara, Bab 8, membahas mengenai Diplomasi Pertahanan dan Eksistensi Negara, Bab 9, membahas mengenai Dampak Industri 4.0 di Indonesia, dan pada Bab 10, membahas mengenai Resolusi Konflik Keagamaan di Indonesia.

Buku ini sangat menarik karena membahas mengenai pertahanan negara secara luas, bisa dibaca oleh kalangan dosen, mahasiswa maupun umum, sebagai media menambah wawasan dalam hal pertahanan negara guna memupuk jiwa bela negara. Selamat membaca.***

DAFTAR ISI

URAIAN	HAL
HALAMAN COPY RIGHT	ii
KATA SAMBUTAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
TENTANG BUKU	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1: DUKUNGAN KRI DALAM PERTAHANAN NEGARA Suhirwan	1
BAB 2 : LINGKUNGAN STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA Kasih Prihantoro	13
Bab 3 : MENGENAL PERTAHANAN NEGARA DALAM LINGKUNGAN GLOBAL TSL Toruan	21
Bab 4 : PRODI TEKNIK ELEKTRO MILITER UNIVERSITAS PERTAHANAN RI DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA Lukman Yudho Prakoso	43
BAB 5 : FORUM MARITIM DALAM PENANGGULANGAN ANCAMAN NEGARA Suhirwan, Lukman Yudho Prakoso	51

URAIAN	HAL
Bab 6 : PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN DALAM MENINGKATKAN BELA NEGARA TSL Toruan, Suhirwan	67
BAB 7 : PROGRAM TMMD DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA Suhirwan, TSL Toruan	79
BAB 8 : DIPLOMASI PERTAHANAN DAN EKSISTENSI NEGARA Budi Pramono	89
BAB 9 : DAMPAK INDUSTRI 4.0 DI INDONESIA Sovian Aritonang	99
BAB 10 ; RESOLUSI KONFLIK KEAGAMAAN DI INDONESIA Suhirwan	111
TETANG PENULIS	121
TENTANG EDITOR	128

Bab 1

Dukungan KRI dalam Pertahanan Negara

***Suhirwan**

I. PENDAHULUAN

Diterimanya konsep negara kepulauan pada Konvensi PBB tentang hukum laut pada tahun 1982, di Jamaica yang diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang perairan Indonesia, menempatkan Indonesia sebagai satu-satunya negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan luas wilayah perairan mencapai hampir 2/3 dari total luas wilayah keseluruhan (Deplu 1995). Apabila dikaitkan dengan letak posisi geografi yang berada pada persilangan dunia, menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat strategis dan sangat diperhitungkan oleh negara-negara lain dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Permasalahan di laut yang timbul, diantaranya sebagai akibat dari: luasnya wilayah perairan yurisdiksi nasional, posisi geografi yang berada pada silang dunia, sumber daya alam laut hayati dan non hayati, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan alur lintas damai, penyebaran penduduk yang tidak merata, permasalahan perbatasan laut, penyelundupan, perompakan dan beragamnya etnis. Dengan demikian permasalahan di laut memang benar0-benar kompleks dan perlu penanganan secara profesional. Contohkan saja wilayah laut Indonesia bagian barat yang merupakan wilayah laut yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia maupun dunia Internasional karena sebagian besar jalur lintas perdagangan dunia melalui wilayah ini khususnya selat Malaka. Oleh karena itu Indonesia dituntut untuk dapat

mengamankan dan menciptakan rasa aman kepada seluruh pengguna lintas laut yang berada di wilayah ini. Mengacu dari permasalahan tersebut, TNI AL sebagai inti kekuatan pertahanan negara di laut, bertanggung jawab untuk mewujudkan stabilitas dan keamanannya dalam rangka mempertahankan keutuhan wilayah negara. Terpeliharanya keamanan di wilayah ini merupakan suatu prioritas bagi bangsa Indonesia.

Sebagai komponen utama pertahanan negara di laut, TNI AL bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara yaitu mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara di laut, TNI AL melaksanakan tugas-tugas yang merupakan pengejawantahan dari tiga peran yang bersifat universal yaitu peran militer, peran polisionil dan peran diplomasi (Mabes TNI AL 1994). Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas TNI AL bergantung kepada postur TNI AL, yaitu alokasi pangkalan serta kemampuan dan jumlah KRI yang mencukupi untuk mengamankan wilayah laut Indonesia khususnya Indonesia Barat.

Pembangunan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian negara merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar. Menurut kajian Balitbang Dephan (2007), KRI (Kapal Patroli) yang dibangun harus mampu melindungi, mengawasi, mengendalikan dan mengamankan semua kegiatan di laut, utamanya usaha-usaha yang berkaitan dengan kepentingan pembangunan ekonomi nasional, diantaranya usaha penangkapan ikan, *illegal logging*, pengamanan pengeboran lepas pantai dan sebagainya di semua perairan nasional Indonesia. Terciptanya kondisi yang kondusif, maka dituntut kehadiran KRI di setiap sudut wilayah perairan nasional. Tingkat kemampuan KRI dalam

melaksanakan pengamanan wilayah laut Indonesia bagian Barat dapat diketahui dengan membandingkan diantara KRI yang ada. Kemampuan KRI yang dicari adalah jarak dan luas jangkauan patroli dari lima jenis KRI yaitu KRI AMY Class (AMY), KRI Kakap Class (KKP), KRI Patimura Class (PTM), KRI Attack Class (AT) dan KRI PC-35 Class (PC).

Faktor pendukung ketahananlamaan dan operasional KRI di sektor patroli adalah pangkalan yang memberikan dukungan logistik, personil dan fasilitas pemeliharaan serta perbaikan. Alokasi pangkalan dalam mendukung KRI berpatroli dihitung dengan membandingkan kemampuan jarak jangkauan ke-lima jenis KRI tersebut dengan cara menempatkan satu jenis KRI pada setiap pangkalan. Evaluasi alokasi pangkalan ini dilakukan untuk menentukan pangkalan yang layak atau tidak, jika tidak dapat dibangun pangkalan baru atau mengurangi pangkalan yang sudah ada. Jumlah KRI yang mencukupi dalam pengamanan sektor patroli sangat menentukan keberhasilan tugas TNIAL. Banyaknya setiap jenis KRI yang melaksanakan patroli pada sektor patroli wilayah laut Indonesia Barat dihitung berdasarkan luas jangkauan ke lima jenis KRI. Perhitungan ini bisa dilakukan dengan memperhatikan spesifikasinya seperti *endurance* (waktu kehadiran di laut) dan kecepatan kapal serta daya jangkauan radar dan probabilitas pendeteksiannya. Pada buku ini perhitungan-perhitungannya dilakukan dengan menggunakan metode *set covering problem* dan *covering area*. Metode ini dapat menghitung alokasi pangkalan yang layak serta jumlah masing-masing jenis KRI dan pola penyebarannya untuk dapat melaksanakan pengamanan wilayah laut Indonesia sesuai acaman yang ada dan keberadaan objek vital. Alokasi pangkalan TNI AL untuk mendukung operasional KRI dan keputusan menempatkan KRI serta jumlahnya pada satu sektor patroli merupakan suatu upaya secara optimal dapat melaksanakan pengawasan dan pengamanan wilayah laut Indonesia Barat. Upaya ini dilakukan

untuk menjaga konsistensi keberadaan TNI AL khususnya KRI dalam menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia.

II. KONSTELASI GEOGRAFI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Geografi Indonesia adalah merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah yang terbentang dari 94⁰ sampai dengan 141⁰ BT dan antara 6⁰ LU sampai dengan 11⁰ LS (Mabes TNI AL 2006b). Negara Indonesia yang memiliki 17.506 pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar luas di posisi silang dunia antara Benua Asia dan Benua Australia dan menghubungkan dua samudera yaitu Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia sehingga memiliki nilai strategis baik bagi Indonesia maupun bagi dunia Internasional. Dengan wilayah nasional lebih dari 5 juta kilometer persegi dimana dua pertiga bagiannya berupa perairan seluas lebih dari 3,1 juta kilometer persegi (Mabes TNI AL 1997). Dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) selebar 200 mil, Indonesia mendapat tambahan pengelolaan laut seluas 2,7 juta kilometer persegi sehingga luas wilayah perairan yang menjadi tanggung jawab Indonesia menjadi sekitar 5,8 juta kilometer persegi, dengan panjang garis pantai keseluruhan adalah sekitar 80.791 kilometer. Konstelasi geografi ini tentunya tidak hanya harus disyukuri akan tetapi harus di jaga dan dipertahankan terhadap segala macam ancaman yang mungkin datang dari segala penjuru terutama pada corong-corong strategis, gangguan keamanan baik yang bersifat internal maupun eksternal, demi tetap utuhnya kedaulatan bangsa dalam wadah NKRI. Bentuk dan struktur sektor patroli mempengaruhi penyebaran kekuatan KRI dalam melaksanakan tugas operasinya, hal ini dikarenakan bentuk dan luas wilayah perairan Indonesia beraneka ragam baik menyangkut kedalaman laut, lebar area perairan serta kondisi dan bentuk ancaman yang ada.

1. Persepsi Ancaman

Berdasarkan konstelasi geografi Indonesia, perkembangan lingkungan strategis, pola hubungan antar bangsa dan dinamika perkembangan dalam negeri merupakan faktor-faktor yang menentukan peningkatan eskalasi ancaman. Prediksi peningkatan kerawanan pada wilayah laut nasional yang dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia tersebut dapat berupa ancaman potensial dan faktual.

a. Ancaman Potensial

Ancaman potensial adalah ancaman yang datang dari luar negeri dalam bentuk invasi militer, infiltrasi dan sabotase yang dapat mengancam seluruh aspek kehidupan nasional dimasa yang akan datang, untuk itu perlu peningkatan kewaspadaan dalam bentuk antisipasi (*preventif defence*). Walaupun demikian perang terbatas dengan wilayah dan sasaran terbatas tidak dapat diabaikan yang disebabkan oleh konflik wilayah perbatasan, kemungkinan timbulnya konflik perbatasan dengan negara tetangga di wilayah laut Indonesia Barat.

b. Ancaman Faktual

Ancaman faktual adalah ancaman yang datang dari dalam berupa konflik kepentingan, tindak pidana dan pelanggaran hukum di laut akan semakin meningkat antara lain: timbulnya konflik kepentingan dengan negara-negara lain, pembajakan (*piracy*) dan perompakan (*sea robbery*), penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan, pengambilan harta karun, survey dan penelitian ilmiah tanpa ijin, kemungkinan hadirnya kekuatan Angkatan Laut asing di ALKI, timbulnya perebutan sumber daya alam di laut dan keberadaan obyek vital.

Perkembangan dunia yang semakin mengglobal, transparan dan mengaburkan batas negara (*borderless world*), tentunya akan membawa dampak kepada ancaman yang akan semakin

sulit untuk diprediksi serta meningkatnya kepentingan negara-negara di dunia pada umumnya dan negara di kawasan regional pada khususnya dalam memenuhi kepentingan negaranya. Hal ini perlu segera diperhitungkan dan mengukur kekuatan sebagai upaya antisipasi terhadap ancaman potensial maupun faktual yang mungkin akan mengganggu keutuhan dan kedaulatan Indonesia.

2. Strategi Pertahanan Laut Nusantara

Sebagai penjabaran lanjut dari Strategi Pertahanan Nusantara (SPN), TNI AL telah merumuskan Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) yang terdiri dari 3 pilar utama, yaitu meliputi pilar: penangkalan, pertahanan mendalam dan hankamrata. SPLN diharapkan mampu mewujudkan stabilitas keamanan di laut yang kondusif bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara. Perwujudan stabilitas keamanan yang kondusif, maka diperlukan suatu struktur kekuatan yang jelas

Strategi pertahanan maritim memiliki matra terbuka, manuver fleksibel, dan pergerakan lebih leluasa untuk penangkalan dan penindakan. Ini sesuai dengan karakter geografis. Dalam strategi pertahanan maritim, tumpuan kekuatan akan diletakkan pada kekuatan pertahanan laut dan udara. Struktur kekuatan TNI AL yang dibangun diarahkan dan ditata untuk mampu menyelenggarakan fungsi pertahanan di laut secara nyata. Dari ketiga tatanan medan juang dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, maka tatanan Medan Perlawanan Akhir yang patut dijadikan pilihan sebagai arah pembangunan kekuatan TNI AL. Hal ini mengandung pengertian bahwa struktur kekuatan TNI AL yang dibangun harus mampu melaksanakan perlawanan secara optimal di medan perlawanan akhir dalam rangka mempertahankan keutuhan wilayah negara.

III. PENTINGNYA INDUSTRI PERTAHANAN

Indonesia sebagai negara maritim mempunyai kepentingan untuk turut serta membangun keamanan kawasan, terutama keamanan maritim regional yang ditopang dengan kekuatan pertahanan Angkatan Laut yang handal. Kepentingan tersebut selaras dengan misi Indonesia mewujudkan Poros Maritim Dunia (PMD) melalui pilar kelima pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Pembangunan kekuatan pertahanan maritim sangat erat kaitannya dengan pembangunan kekuatan Angkatan Laut yang didominasi dengan kekuatan kapal perangnya. Pola penyediaan kapal perang saat ini masih dominan mengandalkan dari produksi luar negeri, namun Pemerintah Indonesia bertekad sedapat mungkin mengurangi ketergantungan kebutuhan kapal perang melalui pengadaan dalam negeri yang utamanya dengan pemberdayaan sumber daya nasional. Pemberdayaan sumberdaya nasional berkaitan dengan perlunya tata kelola sumber daya buatan (SDB), salah satunya berupa tata kelola industri pertahanan nasional bidang jasa maritim. Adapun untuk mengawal kebijakan tersebut telah ditetapkan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari industri pertahanan.

Sebagai kesungguhan pemerintah menyiapkan industri Pertahanan Nasional menuju kemandirian produksi dalam negeri. Penyelenggaraan Industri Pertahanan bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan industri pertahanan yang profesional, efektif, efisien, terintegrasi, dan inovatif.
- b. Mewujudkan kemandirian pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan, dan
- c. Meningkatkan kemampuan di dalam memproduksi alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan yang akan digunakan dalam rangka membangun kekuatan pertahanan dan keamanan yang handal.

Dengan adanya undang-undang tersebut menjadi payung hukum bagi industri pertahanan dalam negeri untuk berperan dalam pertahanan negara yaitu dengan memproduksi alat peralatan pertahanan yang akan digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai penjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah republik Indonesia. Selaras dengan hal tersebut, Kementerian pertahanan telah berupaya melaksanakan pembangunan pertahanan negara melalui pemberdayaan industri jasa maritim nasional dalam negeri yang mampu memproduksi alutsista kapal perang. Salah satu industri pertahanan yang mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk membangun alat utama sistem senjata matra laut, adalah PT. Dok Kodja Bahari (DKB) dengan program pembangunan kapal perang jenis Angkut Tank. Pada tanggal 31 juli 2012 Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin dengan didampingi Irjen Kemhan Laksdya TNI Sumartono, dan Wakasal Laksdya TNI Marsetyo serta sejumlah Pejabat Mabes TNI dan Angkatan, melaksanakan peresmian pembangunan tiga kapal perang di Galangan Kapal PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero). Pembangunan kapal perang Angkut Tank (AT) dengan ditandai pemotongan baja pertama (*first steel cutting*) untuk pembangunan dua unit kapal jenis Angkut Tank.

IV. OPERASIONALISASI KRI

Dalam pengelolaan KRI ada beberapa pola pengoperasian, salah satunya adalah pola pengoperasian KRI sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan di laut dalam menghadapi ancaman menggunakan yang pola operasi dengan perhitungan *employment cycle* (pola operasional) 50%: 50%. 50% kekuatan melaksanakan tugas operasi termasuk unsur-unsur yang sedang melaksanakan latihan dan 50% kekuatan melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan. Total kebutuhan KRI menjadi dua kali lipat dari KRI

hasil perhitungan sebagai kekuatan satuan KRI (*Patrolling Force*) dalam melaksanakan patroli/operasi sehari-hari untuk menjaga dan mengamankan wilayah laut yurisdiksi nasional.

Jenis-jenis KRI

KRI adalah kapal perang yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka pengamanan wilayah laut Indonesia. KRI memiliki kemampuan dengan persenjataan sesuai jenis kapalnya, kecepatan tinggi, dan mempunyai olah gerak yang lincah, dilengkapi dengan peralatan elektronika navigasi yang mampu untuk mendeteksi lawan dalam jarak jauh. Pada penelitian ini digunakan lima jenis KRI yaitu jenis KRI AMY, KKP, PTM, AT dan PC-35.

Kemampuan KRI

Dispen TNI AL (2005), kondisi dan jumlah KRI (struktur dan pola gelar kekuatan) saat ini masih belum memenuhi kondisi yang diharapkan apabila dihadapkan perubahan dan perkembangan lingkungan strategi yang semakin kompleks baik dibidang hankam, politik maupun ekonomi. Paradigma pembangunan kekuatan TNI-AL sampai dengan tahun 2024, telah mendorong TNI AL untuk merencanakan pengembangan sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya. Disisi lain, perkembangan teknologi dan tuntutan profesionalisme, telah menyentak kesadaran untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan TNI AL secara optimal agar dapat menjawab tantangan secara profesional.

Keberhasilan pencapaian tugas-tugas TNI AL sangat bergantung kepada tingkat kemampuan, struktur kekuatan dan pola gelar kekuatan TNI AL itu sendiri. Sedangkan perumusan pembangunan TNI AL yang tertuang dalam rancangan pembangunan TNI AL seyogyanya antisipatif terhadap bentuk-bentuk ancaman yang akan dihadapi. Oleh karena itu, TNI AL dituntut memiliki kemampuan guna menghadapi ancaman. Di sisi lain, pencapaian tingkat kemampuan dan pola gelar kekuatan

akan sangat ditentukan oleh manajemen organisasi yang efektif dan efisien.

Tingginya pelanggaran wilayah dan penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Indonesia oleh kapal nelayan asing, salah satunya disebabkan karena keterbatasan jumlah armada kapal perang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Dihadapkan dengan terbatasnya anggaran dan kebutuhan transfer teknologi, perlu adanya kebijakan pembangunan alat utama sistem senjata melalui pemberdayaan industri jasa maritim dalam negeri, salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan kapal perang untuk patroli dengan melibatkan salah satu industri pertahanan yang melayani pembuatan KRI seperti PT. DKB Persero. Pada kasus ini penulis menganalisis implementasi kontrak pembangunan kapal perang angkut tank oleh perusahaan tersebut dengan menggunakan metodologi tertentu untuk menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana menggunakan George Edward III. Namun, hasil analisis dari penulis menunjukkan bahwa implementasi kontrak pembangunan KRI belum optimal karena tidak terpenuhinya dua indikator keberhasilan menurut George Edward III, yang meliputi sumber daya dan struktur birokrasi sehingga berdampak terhadap waktu dan mahal biaya produksi. Keberhasilan kebijakan pembangunan kapal perang dapat dilaksanakan melalui peningkatan manajemen yang profesional dengan melibatkan industri maritim swasta nasional dan Badan Usaha Milik Negara.

Peranan Pangkalan KRI

Keberadaan suatu pangkalan merupakan faktor utama keberhasilan operasi, fungsi pangkalan mempunyai peranan penting dalam mendukung satuan operasi dan dispersi kekuatan khususnya pada aspek dukungan pemeliharaan, perbaikan dan pembekalan. Kemampuan pangkalan yang memadai sangat mendukung satuan operasi dan penyebaran kekuatan, mewujudkan daya tangkal kewilayahan serta diperoleh

ketahananlamaan operasi yang optimal.

Dukungan pangkalan, berupa penyiapan berbagai fasilitas pangkalan berupa fasilitas labuh, fasilitas pengisian bekal, fasilitas perawatan personil dan fasilitas lainnya guna mendukung kesiapan KRI yang dilakukan membutuhkan waktu yang lama, sehingga dukungan logistik dari pangkalan amat diperlukan. Alokasi pangkalan yang layak dapat memperkecil resiko dan menekan biaya operasi selain itu akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi yang dilaksanakan. Dengan demikian TNI AL dituntut untuk menempatkan dan menyebarkan pangkalan-pangkalannya disesuaikan dengan kondisi geografis sehingga dapat mendukung satuan-satuan operasi dan meng-cover wilayah laut Indonesia secara optimal dalam mewujudkan pertahanan negara.

V. KESIMPULAN

- a. Faktor yang sangat menentukan terjadinya proses optimasi fungsi tujuan adalah jarak dan luas jangkauan KRI, dihitung berdasarkan kecepatan kapal, *endurance* dan jarak deteksi radar. Semakin besar nilai jarak dan luas jangkauan KRI maka akan semakin jauh dan luas daerah yang diawasi dan diamankan.
- b. Faktor yang sangat penting dalam menanggapi permasalahan di laut adalah keunggulan *time respon* dalam memberikan *service level* dengan kata lain KRI harus memiliki kecepatan gerak yang cepat dalam menuju ke sasaran yaitu sektor patroli.
- c. Hasil optimasi diperoleh pola operasi KRI ke sektor patroli, sektor patroli dengan kerawanan tinggi akan ditugaskan dua KRI, sektor patroli dengan kerawanan rendah akan ditugaskan satu KRI.

- d. Hasil evaluasi alokasi pangkalan diperoleh bahwa lima pangkalan TNI AL yang sudah ada masih sangat relevan untuk penugasan KRI di sektor patroli, dikarenakan pangkalan-pangkalan tersebut dapat meng-cover sektor patroli yang menjadi tanggungjawabnya.
- e. Kementerian pertahanan telah berupaya melaksanakan pembangunan pertahanan negara melalui pemberdayaan industri jasa maritim nasional dalam negeri yang mampu memproduksi alutsista kapal perang. ***

Sumber:

Hakim, Abdul, Suhirwan, Edy Suhardono, 2020, Jurnal Strategi Pertahanan Laut, *Implementasi Kontrak Pembangunan Kapal Perang Angkut Tank (AT) 1 dan 2 Oleh PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dalam Mendukung Kemandirian Alutsista TNI-AL*, Universitas Pertahanan, Bogor.

Suhirwan, 2021, *Metode Set Covering Problem, Implementasi Dalam Pengelolaan Kri TNI AL Sebagai Sektor Patroli Wilayah Laut Indonesia*, CV. Aksara Global Akademia, Indonesia.

Bab 2

Lingkungan Strategis Pertahanan Negara

*Kasih Prihantoro

I. PENDAHULUAN

Dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan global, regional maupun nasional, era ini telah mengisyaratkan tantangan yang kompleks bagi pertahanan negara, khususnya dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Tantangan tersebut, kemudian berevolusi menjadi ancaman strategis terhadap kedaulatan negara, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa yang akan semakin berkembang menjadi bersifat multidimensional, fisik dan nonfisik, baik berasal dari luar maupun dalam negeri.

Fenomena potensi ancaman terhadap NKRI terbagi menjadi dua dimensi ancaman utama, yaitu:

1. **Dimensi pertama** : ancaman belum nyata, yaitu ancaman perang terbuka antar negara.
2. **Dimensi kedua** : ancaman yang menjadi prioritas untuk ditangkal yaitu ancaman yang sangat nyata yang sedang dan kemungkinan dapat dialami oleh negara-negara kawasan baik secara sendiri-sendiri atau yang bersifat lintas negara.

Ke dua dimensi ancaman tersebut dapat diantisipasi jika kita memiliki pertahanan nasional yang kuat. Pertahanan nasional atau pertahanan negara adalah segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara yang meliputi keutuhan wilayah dan juga keselamatan masyarakat dari segala gangguan

yang mengancam keutuhan negara. Pertahanan negara merupakan segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan yang bersifat semesta yang diselenggarakan dengan kesadaran hak serta kewajiban sebagai warga negara dan juga keyakinan akan kekuatan sendiri.

Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah melalui sistem pertahanan negara yang telah disusun sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. Pertahanan Negara merupakan gabungan kekuatan antara sipil dan militer yang diupayakan oleh negara untuk melindungi integritas wilayahnya. Pertahanan negara merupakan tugas utama Kementerian Pertahanan.

II. DASAR HUKUM PERTAHANAN NEGARA

- Dasar mengenai sistem pertahanan Indonesia tercantum dalam UUD 1945 BABXII tentang Pertahanan Negara dan Keamanan Negara:

Pasal 30:

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi,

- melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.
- Undang-Undang Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 1 butir 2 UU Nomor 3/2002 mengatakan: “Sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan segenap sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman”.
 - Undang-Undang RI No 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya pasal 7 ayat (2) huruf b angka 8 berbunyi “Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta)”. Untuk melaksanakan tugas tersebut dihadapkan pada Sistem Pertahanan Semesta dengan pertahanan berlapis yang melibatkan pertahanan militer dan nirmiliter di wilayah sendiri, maka sudah sepatutnyalah bangsa Indonesia secara dini menyiapkan ruang/wilayah negara untuk menghadapi segala bentuk ancaman melalui penataan ruang wilayah pertahanan yang baik dan sistematis untuk kepentingan pertahanan.

III. PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN

Salah satu hal yang sangat penting dalam pertahanan negara

adalah terkait wilayah pertahanan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 68/2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara pada 19 Agustus 2014 lalu. Dalam peraturan itu berisi 1.033 lokasi yang ditetapkan sebagai wilayah pertahanan negara. Penataan Wilayah Pertahanan Negara telah diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia:

- Nomor 68 Tahun 2014 sebagai penjabaran dari Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peraturan Pemerintah ini mengatur penataan wilayah pertahanan yang meliputi penetapan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian wilayah pertahanan sebagai pedoman bagi Pemerintah/Pemerintah Daerah (Pemda) dan TNI.
 - 1) Pasal 5 PP 68/2014 menyatakan bahwa “Wilayah Pertahanan ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan daerah dan fungsi pertahanan”.
 - 2) Pasal 26 ayat (1) “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan lahan untuk pembangunan dan pengembangan Wilayah Pertahanan Negara”, ayat (3) “Lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai peruntukannya dengan fungsi Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a sampai dengan huruf g (pangkalan militer/kesatrian, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, obyek vital nasional yang bersifat strategis, dan/atau kepentingan pertahanan udara).
 - 3) Pasal 4 menyatakan bahwa “Pelaksanaan penataan Wilayah Pertahanan dilakukan secara terintegrasi

dengan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota”.

Dengan demikian amanat Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 menegaskan bahwa Pemerintah Pusat/Provinsi/ Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam mendukung keberadaan Wilayah Pertahanan termasuk memperlancar penyelenggaraan tugas pertahanan. Peraturan tersebut dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3/2002 tentang Pertahanan dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang. Dan penataan wilayah pertahanan negara yang dimaksud dalam PP ini meliputi perencanaan wilayah pertahanan, pemanfaatan wilayah pertahanan, dan pengendalian pemanfaatan wilayah pertahanan. "Sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang." bunyi Pasal 3 ayat (1) PP ini. Dan PP ini menyebutkan, pada masa damai wilayah dimaksud digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pembinaan kemampuan pertahanan sebagai perwujudan daya tangkal bangsa. Sementara dalam keadaan perang wilayah dimaksud digunakan sebagai wilayah pertahanan untuk kepentingan perang.

Wilayah pertahanan sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Pangkalan militer atau kesatriaan
- b. Daerah latihan militer
- c. Instalasi militer
- d. Daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer
- e. Daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya.
- f. Daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya
- g. Objek vital nasional yang bersifat strategis

h. Kepentingan pertahanan udara

Dalam lampiran II PP ini disebutkan rincian 1.033 lokasi di seluruh daerah di Tanah Air yang dinyatakan sebagai wilayah pertahanan negara, diantaranya Rahlat Lantamal III, Cilandak, Jakarta Selatan; Rahlat Lantamal III, Bukit Inkai, Jakarta Selatan; Rahlat Kodam I Bukit Barisan, Medan; Lanud Timika, Kabupaten Mimika; Lanud Sam Ratulangi, Kota Manado; Lanud Atang Senjaya, Bogor, dan masih banyak lagi. "Wilayah pertahanan sebagaimana dimaksud dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan," bunyi Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. Menurut PP ini, wilayah pertahanan dimanfaatkan oleh TNI dalam rangka memperkuat kemampuan pertahanan dan menjaga kedaulatan negara. Dalam pemanfaatan ini, TNI dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan untuk menjaga kepentingan pertahanan. Selain itu, pemanfaatan wilayah pertahanan dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi wilayah pertahanan yang bersangkutan. Sementara pemanfaatan di luar fungsi pertahanan harus mendapat izin Menteri Pertahanan. PP ini juga menegaskan, pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakan lahan untuk pembangunan dan pengembangan wilayah pertahanan. Dalam hal lahan diperlukan untuk daerah latihan militer, pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakan lahan bagi satuan TNI dari tingkat perorangan sampai dengan tingkat latihan gabungan TNI.

"Daerah latihan militer disediakan untuk satuan TNI pada skala nasional, skala provinsi, dan skala kabupaten," bunyi Pasal 28 ayat (1) PP itu. Sementara di ayat berikutnya disebutkan, pada skala nasional, daerah latihan militer paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) daerah latihan gabungan TNI; pada skala provinsi paling sedikit terdiri atas 1 (satu) daerah latihan gabungan TNI setingkat batalyon; dan pada skala kabupaten paling sedikit 1

(satu) daerah latihan TNI setingkat kompi. "Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyiapkan wilayahnya untuk digunakan sebagai daerah latihan militer yang bersifat sementara atau tidak tetap," bunyi Pasal 29 PP ini. PP ini juga menegaskan, pemanfaatan wilayah di sekitar pangkalan militer atau latihan harus atau objek vital nasional mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer/latihan militer/obyek vital nasional. Dalam hal pemanfaatan dimaksud berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi pangkalan militer atau latihan militer atau obyek vital, maka pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disebutkan dalam PP ini, pengendalian pemanfaatan wilayah pertahanan dilakukan melalui pemantauan, pengawasan, dan penertiban, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Menurut PP ini, wilayah pertahanan hanya dapat dialihfungsikan dengan ketentuan: a. berdasarkan penilaian tidak efektif dan tidak efisien untuk kepentingan pertahanan; dan/atau b. terdapat kepentingan pembangunan nasional yang lebih besar.

Penilaian tidak efektif dan tidak efisien wilayah pertahanan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan setelah berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan. Sementara penentuan kepentingan nasional yang lebih besar ditetapkan oleh Presiden. "Alih fungsi wilayah pertahanan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan syarat telah disiapkan wilayah pengganti yang memenuhi kriteria sebagai wilayah pertahanan," bunyi Pasal 44 ayat (4) PP ini. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 19 Agustus 2014 oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Selanjutnya Kementerian Pertahanan melalui Kepmenhan No: KEP/138/M/II/2018, tentang Wilayah Pertahanan dan Rencana Wilayah Pertahanan; telah mengatur tentang penataan yang menjadi wilayah pertahanan yang berada di seluruh wilayah Indonesia

IV. KESIMPULAN

Pengelolaan wilayah pertahanan menjadi salah satu faktor krusial dalam mendukung Pertahanan Negara. Regulasi Penataan wilayah pertahanan diatur oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Kepmenhan. Wilayah pertahanan dimanfaatkan oleh TNI dalam rangka memperkuat kemampuan pertahanan negara serta menjaga kedaulatan negara. TNI dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan wilayah pertahanan untuk menjaga kepentingan pertahanan negara. Pemerintah Pusat/Provinsi/ Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam mendukung keberadaan Wilayah Pertahanan termasuk memperlancar penyelenggaraan tugas pertahanan ***

Sumber:

Prihantoro, Kasih, dkk, 2021, *Urgensi Transformasi Networking dan Driver Force Kebijakan Pertahanan*, Aksara Global Akademia, Indonesia.

Bab 3

Mengenal Pertahanan Negara dalam Perkembangan Lingkungan Global

**TSL Toruan*

I. PENDAHULUAN

Pertahanan negara yang disebut juga dengan pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) yang diselenggarakan oleh suatu Negara dalam menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan dan, di beberapa negara Dalam bahasa militer, pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin perlindungan dari satu unit yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya: (1) adanya cara-cara untuk membela diri sesuai dengan spesialisasi sdm, (2) adanya Pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: DCA), (3) adanya pertahanan rudal, dan lain sebagainya. Tindakan, taktik, operasi atau strategi pertahanan sendiri bertujuan untuk menentang/membalas serangan. Jenis pertahanan negara ada dua kelompok, yaitu: (a) Pertahanan militer dan (b) Pertahanan nonmiliter/nirmiliter.

Pertahanan negara dibentuk oleh beberapa komponen. Berikut adalah komponen pertahanan negara:

1. **Komponen Pertahanan Negara**

Di Indonesia sendiri komponen utama dari **sistem pertahanan negara** dalam menghadapi ancaman militer yaitu dengan cara menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai "komponen utama" yang didukung oleh "komponen cadangan"

dan "komponen pendukung". Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter, menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

✓ **Komponen utama**

"Komponen utama" adalah Tentara Nasional Indonesia, yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.

✓ **Komponen cadangan**

"Komponen cadangan" (Komcad) adalah "sumber daya nasional" yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

✓ **Komponen pendukung**

"Komponen pendukung" adalah "sumber daya nasional" yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Namun, komponen-komponen pendukung tersebut tidak digunakan dalam membentuk kekuatan nyata yang digunakan untuk perlawanan fisik.

Sementara itu "**Sumber daya nasional**" terdiri dari: sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Sumber daya nasional yang dapat dimobilisasi dan didemobilisasi terdiri dari sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang mencakup berbagai cadangan materiil strategis, faktor geografi dan lingkungan, sarana dan prasarana di darat, di perairan maupun di udara dengan segenap unsur perlengkapannya dengan atau tanpa modifikasi.

Komponen pendukung terdiri dari 5 segmen:

1. **Paramiliter, yang terdiri dari:**

- Polisi (Brimob) - (lihat pula Polri)
- Resimen mahasiswa (Menwa)
- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
- Perlindungan masyarakat (Linmas) lebih dikenal dengan sebutan pertahanan sipil (Hansip)
- Satuan pengamanan (Satpam)
- Organisasi kepemudaan
- Organisasi bela diri
- Satuan tugas (Satgas) partai

2. **Tenaga ahli/profesi:**

Sumber daya manusia yang sesuai keahlian atau berdasarkan profesinya. Contoh: guru, dosen, dokter, bidan, perawat, hakim, pengacara, dan lain sebagainya.

3. **Industri:**

Semua Industri yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kekuatan utama dan kekuatan cadangan dalam menghadapi ancaman.

4. **Sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana**

- » **Sumber daya alam** adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara.
- » **Sumber daya buatan** adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara

- » **Sarana dan prasarana** nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.

5. **Sumber daya manusia**

Sumber daya manusia adalah warga negara yang secara psikis dan fisik dapat dibina dan disiapkan kemampuannya untuk mendukung komponen-komponen kekuatan pertahanan keamanan negara. Seluruh warga negara secara individu atau kelompok, misalnya organisasi masyarakat (LSM, dan sebagainya).

II. SEJARAH SINGKAT ILMU PERTAHANAN NEGARA

Ilmu negara pada masa modern sekarang ini bukan lagi menjadi domain militer semata. Begitu banyak keterlibatan ilmu pengetahuan lain yang menjadi bagian dari ilmu pertahanan tersebut. Kelompok masyarakat di luar militer tentu saja masih kesulitan dalam memahami bagaimana relasi konsep pertahanan sebagai ilmu yang terikat dan terkait dengan seluruh ilmu pengetahuan yang ada pada saat ini.

Untuk mengenal apa dan bagaimana ilmu negara, tentu kita harus melihat dari sisi epistemologis terlebih dahulu. Pertahanan sebagai ilmu tentu saja lahir dari berbagai peristiwa yang telah dialami pada masa lalu, yang pada akhirnya melahirkan asal usul dan kemudian berkembang menjadi strategi, meningkat menjadi ilmu dan seni perang yang pada akhirnya menjadi Ilmu Pertahanan berikutan hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu negara berbicara dalam ruang lingkup dan materi yang menjadi bagian dari ilmu pertahanan itu sendiri. Sebut saja manajemen pertahanan, kebijakan pertahanan, kerja sama pertahanan, strategi

pertahanan, diplomasi pertahanan, pertahanan dalam negeri, ekonomi pertahanan, strategi pertahanan, intelijen pertahanan, geografi pertahanan, nilai-nilai pertahanan dan tentang geopolitik, yang keseluruhannya berkaitan erat dengan pertahanan.

Sangat menarik ketika kita membuka *discourse* bagaimana mengkaji berbagai hal tentang pertahanan. Sedikit demi sedikit akan terbuka pemahaman kita bahwa ternyata pertahanan itu tidak sekedar bicara tentang sebuah ancaman yang mengganggu kedaulatan bangsa dan negara. Akan tetapi pertahanan ternyata merupakan ilmu pengetahuan yang memberikan sumbangsih yang luar biasa bagi stabilitas keamanan dunia yang pada akhirnya menjadi manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan. Tidak bisa dipungkiri, bahwa sampai hari ini selalu saja ada ancaman antar negara dengan negara, maupun antara negara dengan kelompok bukan negara (*non-state actor*). Oleh karena itu, sebuah negara mutlak memerlukan sistem pertahanan yang melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut.

Bagi Indonesia sendiri, kemampuan dalam mengelola berbagai sumber daya yang ada menjadi sangat penting. Mengapa tidak, kekayaan alam kita menjadi alasan bagi pihak lain untuk datang ke Indonesia. Fakta sejarah sudah cukup membuktikan, bagaimana Portugis dan Belanda menjajah bangsa ini hanya karena urusan rempah-rempah. Dalam menganalisa ancaman yang pasti dan akan dihadapi negara kita, baik dari dalam maupun dari luar negeri, kita sikapi dengan menggunakan kerangka analisis ilmu pertahanan bersama dengan aspek ekonomi dan diplomasi. Adapun maksud dari kerangka analisis tersebut adalah untuk menunjukkan betapa signifikannya ilmu pertahanan dalam menentukan eksistensi, kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara, termasuk Indonesia.

Pengertian dan Hubungan Ilmu Pertahanan dengan Berbagai Ilmu Lainnya

Mengutip *The Liang Gie* dalam ensiklopedi ilmu-ilmu yang menyebutkan bahwa ilmu terdiri dari 6 (enam) rumpun besar, yaitu: (1) ilmu pengetahuan pasti, (2) ilmu pengetahuan alam, (3) ilmu pengetahuan hayati, (4) ilmu pengetahuan kejiwaan, (5) ilmu pengetahuan kemasyarakatan, dan (6) ilmu pengetahuan kebahasaan. Kemudian dari rumpun ilmu di atas akan muncul 2 (dua) ilmu murni, yaitu: pengetahuan dan terapan.

Ilmu militer dan ilmu perang pada masa sekarang ini hanyalah bagian dari Ilmu Pertahanan. Ilmu pertahanan jauh lebih luas dari ilmu tersebut. Secara akademis sampai saat ini memang belum ditemukan definisi yang tepat untuk menjelaskan apa Ilmu Pertahanan itu sendiri. Akan tetapi beberapa pakar ilmu pertahanan sudah mencoba memberikan definisi tentang Ilmu Pertahanan, seperti pendapat Brigjen Purn Makmur Supriyatno yang menyatakan bahwa Ilmu pertahanan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya dan kekuatan nasional pada saat damai, perang dan pada saat sesudah perang, guna menghadapi ancaman militer dan non militer terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa dalam rangka mewujudkan keamanan nasional. Pertahanan bukanlah suatu ilmu yang berdiri sendiri, ada hubungan yang begitu erat dengan berbagai ilmu lainnya, seperti filsafat, politik, antropologi, demografi, ekonomi, sejarah, hukum, ilmu negara, ilmu kebumihan, ilmu pasti, bahasa dan juga psikologi.

Hubungan dengan Filsafat

Bahwa kemajuan teknologi sekarang ini telah berhasil menemukan dan menciptakan berbagai jenis senjata pemusnah massal. Tragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki menjadi awal munculnya senjata pemusnah ini. Senjata-senjata kimia yang sangat berbahaya di mana efek perusakannya lebih dahsyat

dari bom atom juga telah berhasil diciptakan. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemusnah massal hanya akan mengakibatkan kerusakan dunia, tidak peduli siapa negara yang menggunakannya dan ditujukan kepada negara yang mana. Yang pasti dunia secara global yang akan menanggung risikonya.

Perang memang berbicara tentang menghancurkan dan atau membunuh musuh. *How to destroy enemy's and the armed forces and to occupancy the enemy's territorial* adalah tujuan perang.

Filsafat kemudian menjadi relasi utama dengan ilmu pertahanan. Aspek kemanusiaan dan alam semesta pada hakikatnya tidak boleh dirusak. Perang menjadi media perusak yang paling berbahaya. Pikiran-pikiran tentang kenapa harus perang? Kenapa harus membunuh manusia? Kenapa perdamaian menjadi hal penting yang harus dijaga oleh seluruh umat manusia? Pemikiran-pemikiran inilah yang kemudian menjadikan filsafat dalam pertahanan, dan perang menjadi penting. Perang bisa diintervensi oleh Filsafat dengan cara positif. Salah satunya adalah kemunculan hukum internasional yang bisa mengatur bagaimana sesungguhnya perang dijalankan. Norma-norma perang, hukum humaniter adalah hasil hasil pemikiran yang bertujuan menyelamatkan manusia dari penderitaan perang.

III. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Perkembangan lingkungan strategis dalam era global berubah dengan cepat dan sukar diantisipasi karena sifatnya yang terbuka dengan tingkat resiko yang tinggi. Perubahan-perubahan ini membawa fenomena baru beserta segenap muatannya yaitu tantangan global, konstelasi dunia, konflik kultural dan ancaman model baru. Perkembangan lingkungan srategis, di samping memberikan dampak negatif, juga membawa dampak positif

terhadap upaya mengoptimalkan SDM masyarakat Pulau Kecil terluar dan wilayah perbatasan, guna memantapkan wawasan nusantara dalam rangka Ketahanan Nasional. Dampak negatif dari pengaruh lingkungan strategis harus dipandang sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan menggunakan segala daya dan potensi untuk bisa terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan tersebut.

Sementara itu, dampak positif perkembangan lingkungan strategis harus dipandang sebagai peluang untuk lebih meningkatkan Ketahanan Nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, mencermati dan mewaspadai pengaruh lingkungan strategis, menjadi keharusan suatu bangsa untuk tetap bertahan di tengah perubahan yang sedang berlangsung.

Sebagai negara, bangsa Indonesia saat ini dan ke depan tidak akan terlepas dari tantangan, ancaman, gangguan dan hambatan yang semakin kompleks. Dinamika perkembangan lingkungan strategis terus mengalami perubahan secara cepat. Model ancaman saat ini memiliki ruang lingkup yang luas dan mengalami evolusi yang fundamental. Jika sebelumnya ancaman berkaitan dengan konflik antar bangsa atau ancaman integritas wilayah nasional, maka sekarang ancaman bersifat multidimensi, seperti masalah kelaparan, kebodohan, minimnya lapangan kerja, degradasi lingkungan, kriminalitas, konflik-konflik SARA, perang saudara, disintegrasi sosial, terorisme, dan lain-lain, yang mana semua itu dapat mengancam kelangsungan hidup suatu bangsa.

Selain itu semua, bentuk akibat perubahan politik Indonesia pasca amandemen konstitusi ternyata belum mapan. Dalam banyak hal, perubahan yang sangat cepat tersebut telah menimbulkan guncangan baik pemahaman ideologi, politik, sosial, ekonomi

dan Hankam yang meluas. Kebebasan mengemukakan pendapat misalnya telah menghasilkan partisipasi politik yang berlebihan.

Salah satu faktor penting yang dapat menunjang berhasilnya Ketahanan Nasional adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas SDM ini bisa dibangun melalui optimalisasi SDM terutama pada masyarakat pulau terluar dan wilayah perbatasan, sehingga dapat memantapkan pemahaman wawasan nusantara di daerahnya dan dapat bersaing dengan negara lain dalam menghadapi tantangan global.

Pengaruh Perkembangan Lingkungan Global.

Globalisasi dengan perkembangan ilmu dan teknologi telah menghilangkan batas-batas negara, negara-negara di dunia sekarang menjadi borderless. Persoalan internal suatu bangsa menjadi sangat transparan bagi bangsa lain yang kadang-kadang dapat dimanfaatkan atau dipolitisir dalam politik internasional seperti contohnya isu, Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang sangat maju. Selain itu pula, perkembangan teknologi transportasi telah menggerakkan barang, jasa dan orang dengan kecepatan tinggi tanpa memperhitungkan batas-batas negara. Hal ini membawa keuntungan positif terhadap perekonomian bangsa-bangsa di dunia karena interaksi antar bangsa menjadi semakin dekat dan terbuka. Pengaruh perkembangan global juga ditandai dengan munculnya krisis pangan, energi dan air, sehingga banyak Negara yang mencari sumber baru di wilayah perbatasan. Termasuk kebutuhan lahan seperti penambangan pasir memluas ruang hidup, misalnya negara Singapura yang berakibat bergesernya garis batas Indonesia-Singapura serta ancaman terhadap pulau-pulau kecil terluar lainnya di masa mendatang. Negara maju menggunakan konsep post modern geopolitics dalam menguasai sumber daya alam dunia, yaitu dengan cara memanfaatkan

politik, teknologi, serta kapital. Dalam hal ini digunakan konsep geo ekonomi, geo teknologi untuk negara maju. Hanya saja, perkembangan global ini membawa tantangan baru bagi negara-negara berkembang, yang tidak bisa mengikuti lajunya perubahan globalisasi. Negara dengan modal kapital kuat seperti Amerika Serikat menjadi sangat berkuasa. Ekonomi dunia, tekanan politik, aksi militer dan penetrasi budaya sangat dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Kekuatan tunggal Amerika Serikat dapat memaknai kepentingan global menjadi kepentingan nasionalnya dan dengan memaknai organisasi internasional seperti World Trade Organization (WTO), Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Bank dan lain-lain. Amerika membuat banyak regulasi, tekanan politik, embargo ekonomi bahkan invasi militer pada negara-negara yang tidak sejalan dengan kepentingan dan politik mereka.

Demokratisasi, pasar bebas, lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia turut serta menjadi senjata globalisasi dalam melakukan penetrasi sistematis pada politik nasional negara-negara berkembang. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan negara (sovereignty) yang mengundang reaksi negara-negara terhadap ketidakadilan ini. Oleh karena itu, Reformasi sebagai salah satu wujud demokratisasi perlu diwaspadai penerapannya. Hadiz (2004) mengingatkan dan mengkritisi bahwa reformasi dan desentralisasi adalah model baru dari perkembangan paham neo-liberal dan neo-institusi, jangan sampai reformasi yang salah akan membuka peluang bagi desintegrasi bangsa.

Dalam konteks konstelasi dunia, posisi geografis Indonesia yang berada di posisi silang strategis dan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia harusnya membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Tidak dapat disangkal, banyak negara-negara yang ingin memanfaatkan posisi strategis ini. Tetapi, dengan kondisi ekonomi dan militer yang tawar (negoisasi) Indonesia menjadi sangat lemah. Kelemahan kelembagaan, tingginya utang

luar negeri dan banyaknya masalah internal membuat posisi Indonesia sangat dilematis dan ironis. Konstelasi dunia baru ini akhirnya memaksa negara-negara bermasalah terutama yang masih berkembang dan terbelakang termasuk Indonesia, menjadi sangat tergantung pada negara-negara maju yang semakin kuat posisinya dengan membentuk kelompok-kelompok kekuatan sendiri seperti negara-negara maju (G-7) The European Union (EU) dan lainnya, hal ini nampaknya belum ada keinginan dari negara-negara maju untuk mengatasi kesenjangan dunia. Di samping itu pula, karena posisi geografis Indonesia yaitu di posisi silang benua dan samudera memiliki kerentanan untuk dimanfaatkan bagi hal-hal yang positif, tetapi juga dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan kriminal Internasional seperti terorisme internasional, perdagangan narkoba, trafficking, penyelundupan dan ancaman-ancaman baru lainnya yang semuanya bersifat illegal, akibat dunia yang semakin mengglobal. Inilah bentuk-bentuk assymetric warfare dan assymetric threat yang sedang kita hadapi sekarang. Hal ini yang perlu disikapi dengan ketegasan serta tekad untuk menegakkan aturan tanpa takut kehilangan popularitas karena ada sebagian kelompok masyarakat yang menikmati ketidak jujuran ini.

Globalisasi melahirkan perkembangan tersendiri dalam bidang kependudukan (SDM), dengan jumlah penduduk dunia akan hampir mencapai 7 miliar orang pada tahun 2050 dan membengkak mencapai 10 miliar jiwa. Dimana di Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan mencapai populasi penduduk lebih dari 350 juta jiwa di akhir abad ke-21. Dan ini merupakan jumlah penduduk terbesar ke-3 di dunia. Sementara di Jepang, mengalami penurunan menjadi hanya 90 juta jiwa pada tahun 2050, dari total jumlah penduduk sebesar 127 juta jiwa pada tahun 2010.

Perkembangan kependudukan dalam konteks global akan membawa dampak tersendiri bagi Indonesia. Dampak-dampak

kependudukan tersebut akan berkaitan dengan bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, sosial, politik dan pertahanan keamanan. Dampak positif atas kecenderungan meledaknya jumlah penduduk di dunia adalah dengan dikembangkannya inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus menerus untuk mencari kemungkinan kehidupan di luar angkasa seperti yang telah dilakukan oleh beberapa ilmuwan saat ini. Sementara itu, dampak negatif atas meledaknya jumlah penduduk di dunia adalah kesulitan untuk memperoleh sumber daya alam yang semakin lama akan semakin habis akibat eksploitasi yang berlebihan dan cenderung destruktif terhadap lingkungan.

Pengaruh Perkembangan Lingkungan Regional

Pada lingkungan regional, negara Indonesia yang berbatasan dengan sepuluh negara tetangga, baik di darat maupun laut, masih mengandung berbagai masalah, antara lain mengenai batas wilayah antar Negara yang belum jelas. Sesuai dengan aturan yang menetapkan batas wilayah nasional negara dan belum maksimalnya peranan pemerintahan di wilayah khususnya wilayah perbatasan dalam penegakan kedaulatan. Banyak terjadi pelanggaran hukum di perbatasan, seperti klaim wilayah, pelintas batas, pencurian SDA, penyelundupan dan terorisme. Perkembangan lingkungan regional juga mempunyai pengaruh terhadap Indonesia, baik yang bersifat umum maupun spesifik. Masalah Korea Utara dan Selatan, Indonesia-Australia, Indonesia-Malaysia (Kasus Blok Ambalat), dan konflik Kepulauan Spratley di Laut China Selatan antara RRC, Vietnam, Filipina, merupakan contoh-contoh mengenai masalah perbedaan pandangan politik. Juga yang perlu diperhatikan adalah adanya pertemuan arus ideologi liberalisme dan sosialisme di kawasan ASEAN yang mempunyai pengaruh yang sangat serius terhadap lingkungan sekitarnya, termasuk Indonesia.

Persoalan yang spesifik muncul dalam lingkup regional ASEAN yang berkaitan langsung dengan Indonesia adalah persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, persoalan perjanjian pertahanan dan ekstradisi Indonesia-Singapura, serta persoalan asap akibat kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan dan lain-lain. Secara umum persoalan-persoalan yang terjadi tersebut akan mempengaruhi secara langsung terhadap Ketahanan Nasional dan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan. Secara spesifik akan berimplikasi terhadap proses demokrasi yang sedang berjalan, yaitu dalam bentuk pemilihan kepala daerah di Indonesia. Yang mana dalam pelaksanaannya cenderung memunculkan konflik-konflik sosial.

Perkembangan regional Asia Pasifik sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik dan keamanan negara-negara di kawasan tersebut. Isu yang paling kritis adalah sifat hubungan antara negara-negara besar di kawasan ini antara lain seperti: Rusia, Jepang, China dan Amerika Serikat, dan sekarang termasuk India dan Australia, namun nampaknya sampai dengan saat ini Amerika Serikat masih merupakan jangkar (anchor) dari keamanan regional Asia Pasifik.

Perkembangan kependudukan dapat dilihat di Papua Nugini. Saat ini, populasi penduduk di Papua Nugini telah mencapai lebih dari 5.545.268 jiwa. Penyebaran penduduk di Papua Nugini pada umumnya tidak merata. Penduduk lebih banyak tinggal di daerah pedesaan, dan hanya 13 % dari penduduk yang tinggal di perkotaan. Meski demikian, dewasa ini tingkat kepadatan penduduk di kota-kota besar cenderung meningkat Hal ini disebabkan karena adanya pertumbuhan Industri manufaktur dan industri jasa yang ada di kawasan perkotaan, yang dirasakan memberikan kesempatan hidup yang lebih baik bagi penduduk Papua Nugini.

Sementara perkembangan kependudukan di tingkat ASEAN sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari potret daya saing negara-negara di kawasan ASEAN. Dalam konteks daya saing Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan regional, dapat dikatakan bahwa daya saing negara Indonesia masih rendah. Dari indikator Employing Worker Rank 2010, Indonesia berada pada urutan ke-149, indikator Healthy and Primary Education 2009-2010, Indonesia menempati urutan ke-82, indikator Life Expentancy Index 2009, angka harapan hidup Indonesia adalah sebesar 0,578. Kondisi itulah yang menyebabkan daya saing Indonesia masih rendah dibanding negara-negara lain di kawasan regional.

Kondisi keamanan khususnya di Asia Tenggara akhir-akhir ini relatif stabil, memberikan peluang negara-negara di kawasan ASEAN untuk melakukan pembangunan. Perkembangan lingkungan regional masih tetap mempengaruhi kehidupan masyarakat di pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan. Permasalahan internal yang belum selesai secara tuntas antara lain: batas kontinental antar negara; Jalur perdagangan di Selat Malaka; Klaim wilayah Kepulauan Spratley oleh beberapa negara; Klaim blok Ambalat oleh Malaysia; Penyelundupan pasir oleh Singapura untuk reklamasi, sehingga akan mempengaruhi terhadap luasnya wilayah.

Pengaruh Perkembangan Lingkungan Nasional

Perkembangan lingkungan strategis Nasional sangat mempengaruhi dalam meningkatkan Ketahanan Nasional di wilayah pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan dalam rangka stabilitas nasional, perkembangan ini ditinjau dari aspek astagatra yaitu:

- a. **Aspek geografi.** Sebagai Negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau, belum semuanya dapat dilayani dengan alat transportasi, begitu juga dengan terbatasnya jaringan informasi menyebabkan kebijakan pemerintah belum

seluruhnya terealisasikan kepada masyarakat pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan tersebut.

- b. **Aspek demografi.** Penduduk yang berdiam di wilayah sepanjang perbatasan biasanya berasal dari etnis yang sama dengan negara tetangganya, secara tradisional bukanlah menjadi penghalang untuk tetap saling berkunjung dan berhubungan, hal demikian bisa saja membuat Ketahanan Nasional menjadi lemah dan hilangnya kepekaan terhadap stabilitas sosial budaya. Penyebaran penduduk seperti program transmigrasi juga perlu dilanjutkan namun perlu ada pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok tanah air agar semua sumber kekayaan alam dapat diberdayakan oleh bangsa kita sendiri. Upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mulai keluar dari lingkungan kemiskinan sampai pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan tentunya harus diupayakan secara terus menerus.
- c. **Aspek Sumber Kekayaan alam.** Semakin terbatasnya sumber daya alam di darat, pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta berkembangnya sektor industri mendorong kuat bagi bangsa Indonesia untuk mencari alternatif lain yaitu menengok ke laut dengan berbagai upaya untuk meningkatkan penggalian potensi Sumber Kekayaan Alam Indonesia yang hendaknya memprioritaskan pula kepentingan nasional, bukan saja pada jumlah pajak yang disetorkan kepada negara, namun jumlah dan kualitas tenaga kerja nasional yang dapat ditampung dalam usaha-usaha penggalian dan pemanfaatan Sumber Kekayaan Alam tersebut.
- d. **Aspek ideologi.** Pancasila sebagai ideologi Negara, mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Namun, sampai saat ini masih terdapat kelompok tertentu yang menghendaki Pancasila diganti dengan ideologi lain,

kurangnya pembinaan pemerintah pusat maupun daerah ke pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan, dapat menyebabkan masuknya paham ideologi lain yang dapat mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Gerakan anarkis, adu domba dan hilangnya musyawarah mufakat serta gotong royong telah mengaburkan nilai-nilai Pancasila. Perubahan nilai-nilai ini perlu diwaspadai karena dapat mengancam kelangsungan Pancasila sebagai Ideologi bangsa.

- e. **Aspek Politik.** Eforia reformasi dan demokratisasi telah merubah wajah politik Indonesia. Demokratisasi yang mendorong partisipasi masyarakat membutuhkan sistim politik yang dapat menampung aspirasi dan tuntutan mereka, namun di satu sisi, lembaga birokrasi Pemerintahan mengalami kemerosotan yang besar saat dimulainya Reformasi. Kepercayaan masyarakat semakin lemah kepada penyelenggara pemerintahan karena masih tingginya kasus korupsi dan konfiik kalangan elit politik yang tidak pernah berkesudahan. Apalagi dengan perkembangan partai politik yang semakin banyak di Indonesia, sehingga perlu diwaspadai integritasnya dalam mewujudkan kepentingan nasional.
- f. **Aspek ekonomi.** Walaupun kondisi makro ekonomi menunjukkan pertumbuhan positif yang ditandai makin menguatnya nilai tukar rupiah, namun masih perlu dilakukan pengendalian yang ketat terhadap tingkat inflasi. Pertumbuhan sektor ril yang terbanyak diperankan oleh ekonomi kerakyatan masih rendah. Demikian juga tingginya kasus bencana alam membuat kendala pada percepatan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kesenjangan ekonomi, kemiskinan dan rusaknya lingkungan hidup, masih merupakan permasalahan utama dalam ekonomi Indonesia dan belum teratasi sejak masa-masa Pemerintahan

sebelumnya. Pembangunan ekonomi yang belum merata terutama pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan, menimbulkan kecemburuan sosial yang berpotensi terjadinya anarkis dan destruktif, dikarenakan ketidak adaannya kepastian hukum dalam berusaha. Hal ini telah mengurangi niat para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan banyak yang berpindah ke luar negeri untuk mencari tempat yang lebih kondusif untuk menjalankan usahanya.

- g. **Aspek sosial budaya.** Perubahan dalam sosial budaya, masyarakat kita, terutama di kalangan generasi muda sangat terlihat jelas. Dahulu kita dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah, dan berbudi luhur, namun seiring dengan banyak kecenderungan yang berkiblat ke dunia barat, maka perilaku itu telah berubah menjadi bangsa yang mudah marah, beringas, perusak, pemrotes, penuntut, penjarah, pemogok dan bahkan pembom. Keterpurukan ekonomi bangsa berakibat pula pada masalah-masalah sosial dan kesenjangan sosial makin lebar, baik antar kelompok masyarakat, antar wilayah maupun antar pusat dan daerah.
- h. **Aspek Hankam.** Kondisi keamanan dalam negeri sampai saat ini cukup stabil meskipun masih dijumpai kerusuhan yang berawal dari konflik vertikal maupun horisontal. Selain itu, masalah perbatasan yang berkaitan langsung dengan masalah keamanan seperti perbatasan laut RI dengan Filipina, masalah penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan Filipina, Selat Malaka yang rawan dijajah oleh perompak serta pembajakan kapal-kapal niaga, masalah di perairan Ambalat, masalah pelanggaran wilayah oleh kapal perang Malaysia yang sama-sama mengklaim sebagai wilayahnya, di perbatasan darat baik di Kalimantan, maupun di Papua yaitu terjadinya pergeseran patok-patok perbatasan agar bisa merambah hasil hutan berupa kayu ke wilayah Indonesia.

Semua ini disebabkan oleh masih minimnya pos-pos keamanan dibandingkan luasnya wilayah.

Demikian juga dengan perubahan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan terus disoroti oleh masyarakat seiring dengan era kebebasan dan demokrasi yang masih terus berproses. Aparat perlu memiliki kepekaan yang tinggi terhadap perkembangan situasi yang terbaru, khususnya Polri sebagai aparaturnya penegak hukum yang mengemban tugas dan fungsinya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

IV. ANCAMAN PERTAHANAN

Ada lima konstelasi global yang berpotensi menjadi ancaman pertahanan dan keamanan nasional sehingga bangsa Indonesia harus mewaspadainya.

Pertama, tatanan dunia baru, seiring melemahnya hegemoni kekuatan super sebagai akibat pengaruh kekuatan-kekuatan ekonomi baru seperti China, Rusia, India, dan Brazil. Tatanan dunia saat ini telah menjadi baru atau *unimultipolar* yang implikasinya adalah pergeseran kekuasaan yang berada pada titik nadi. Kepentingan menjadi keutamaan maka aliansi tersebut dapat dimungkinkan untuk melintasi ideologi.

Sementara itu, kepemimpinan negara baru super power telah mengubah pola insensitas komitmen terhadap keamanan global.

Kondisi ini diperburuk dengan adanya aktor-aktor nonnegara yang membawa kepentingan kelompok yang dikemas dalam wujud ideologi, agama, suku hingga ekonomi.

Beliau mengatakan wujud nyata dari realitas ini adalah munculnya instabilitas di beberapa kawasan yang berada dalam

kendali seperti di Timur tengah Irak dan Suriah, termasuk ISIS di Filipina dan krisis nuklir di Korea Utara.

Terorisme

Potensi ancaman kedua adalah terorisme, semua negara rentan terhadap ancaman teroris, bahkan terorisme sering dijadikan alat untuk menguasai suatu wilayah yang berujung pada perang yang melibatkan pihak ketiga, contohnya yang terjadi di Irak dan Suriah.

Beberapa kasus di Irak dan Suriah menunjukkan bahwa terorisme terbukti berujung pada perang proksi atau perang hibrida dengan melibatkan berbagai aktor seperti aktor negara maupun non negara. Melalui berbagai media sosial dan jaringan media internet lainnya, operator dari kelompok teroris telah mampu secara cepat menyebarkan pengaruh di seluruh dunia demi mendukung kepentingan mereka.

Perang siber

Ancaman ketiga yaitu perang siber, ancamannya dianggap sama bahayanya dengan senjata kinetik sehingga menganggang perkembangan dunia siber harus dijadikan pertimbangan dalam fungsi ketahanan dan keamanan nasional.

Beliau menilai dimensi siber dihuni hampir 2/3 aspek kehidupan manusia modern, sehingga tentu saja akan memerlukan suatu pengamanan di dalamnya misalnya serangan siber pernah dilakukan Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan program nuklir Iran.

"Meskipun serangan itu belum mampu menghentikan program nuklir Iran namun konsep tersebut menunjukkan bahwa serangan siber dapat menjadi suatu opsi yang setara dampaknya dengan senjata kinetik," ujarnya.

China charm offensive

Ancaman keempat adalah kebangkitan Tiongkok yang sangat pesat karena negara tersebut telah mengubah konstalasi politik dunia dalam waktu singkat lewat ekonomi dan militer. Sekretaris Militer Presiden tahun 2015-2016 itu menilai Tiongkok berupaya mengemas kebangkitan fenomenalnya itu dengan slogan yang diviralkan oleh pemerintahnya sebagai "china charm offensive" yang membuat negara tersebut bertindak agresif untuk mengekspansi beberapa kawasan seperti ambisinya menguasai Laut Cina Selatan. Melalui ketiga pangkalan tersebut dan di Pulau Hudi, Tiongkok diperkirakan akan mampu menyelenggarakan perang di seluruh wilayah Laut Cina Selatan.

Laut Indonesia

Potensi ancaman terakhir adalah kerawanan di laut Indonesia, TNI bertanggung jawab atas kerawanan laut Indonesia dari ancaman dari luar dan dalam. Ancaman tersebut diantaranya perampokan bersenjata dan penculikan di wilayah perairan Filipina Selatan yaitu sekitar Laut Sulu oleh kelompok Abu Sayyaf. Kerawanan atas acaman ini menyangkut keselamatan dan keamanan di wilayah laut yang menjadi yurisdiksinya termasuk pada laut-laut bebas yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut.

V. KESIMPULAN

Pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin perlindungan dari satu unit yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya tentang cara-cara membela diri sesuai dengan spesialisasi mereka, pertahanan udara, tindakan, taktik, operasi atau strategi. Pertahanan digunakan untuk menentang/ membalas serangan. Jenis pertahanan ada dua, yaitu: (a) Pertahanan militer dan (b) Pertahanan non militer/ nirmiliter.

Di Indonesia, system pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer dilakukan dengan cara menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai "komponen utama" yang didukung oleh "komponen cadangan" dan "komponen pendukung".

Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Ilmu pertahanan berbicara dalam ruang lingkup dan materi yang menjadi bagian dari ilmu pertahanan itu sendiri. Sebut saja manajemen pertahanan, kebijakan pertahanan, kerja sama pertahanan, strategi pertahanan, diplomasi pertahanan, pertahanan dalam negeri, ekonomi pertahanan, strategi pertahanan, intelijen pertahanan, geografi pertahanan, nilai-nilai pertahanan dan tentang geopolitik, yang keseluruhannya berkaitan erat dengan pertahanan.

Pada lingkungan regional negara Indonesia yang berbatasan dengan sepuluh negara tetangga, baik di darat maupun laut, masih mengandung berbagai masalah antara lain batas wilayah antar Negara yang belum jelas sesuai dengan aturan yang menetapkan batas wilayah nasional negara dan belum maksimalnya peranan pemerintahan di wilayah khususnya wilayah perbatasan dalam penegakan kedaulatan. Banyak terjadi pelanggaran hukum di perbatasan, seperti klaim wilayah, pelintas batas, pencurian SDA, penyelundupan dan terorisme. Sehingga pertahanan negara menjadi hal yang krusial untuk dipelajari dan dihayati oleh segenap bangsa Indonesia.***

Sumber :

Toruan, TSL, 2021, *Bunga Rampai Ilmu Pertahanan*, CV. Aksara Global Akademia, Indonesia.

Bab 4

Prodi Teknik Elektro Militer Unhan RI Dalam Mendukung Pertahanan Negara

*Lukman Yudho Prakoso

I. PENDAHULUAN

Universitas Pertahanan Indonesia (UNHAN) adalah sebuah [Perguruan Tinggi Negeri](#) yang menyelenggarakan pendidikan pascasarjana di bidang [pertahanan](#) dan [bela negara](#) (Magister Pertahanan/ M.Han.), dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan yang berorientasi pada Tri Dharma [perguruan tinggi](#), untuk mencapai standar pendidikan nasional dan universitas berstandar kelas dunia (world class). Universitas Pertahanan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 dan ditetapkan melalui Surat Mendiknas Nomor 29/MPN/OT/2009 tanggal 6 Maret 2009 perihal Pendirian Unhan. Universitas Pertahanan diresmikan oleh Presiden [Susilo Bambang Yudhoyono](#) pada tanggal 11 Maret 2009 di Istana Negara. Penyelenggaraan program studi di lingkungan UNHAN merujuk kepada Keputusan Mendiknas RI Nomor: 196/E/O/2011 TGL 7 September 2011 tentang Penyelenggaraan Program-program Studi pada Universitas Pertahanan Indonesia di Jakarta.

UNHAN merupakan lembaga [pendidikan tinggi](#) yang unik karena mengkhususkan diri pada studi pertahanan setingkat Strata 2. UNHAN adalah lembaga pendidikan tinggi terbuka. UNHAN memberi kesempatan kepada para perwira TNI dan sipil untuk

belajar dan memperdalam Ilmu Pertahanan dari sudut pandang [militer](#), [politik](#), [ekonomi](#), [sosial](#), [teknologi](#) dan [budaya](#)

II. PRODI TEKNIK ELEKTRO

Bagian ini berisi keunggulan atau keunikan program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Militer Universitas Pertahanan berdasarkan perbandingan 3 (tiga) program studi sejenis pada tingkat nasional dan/atau internasional yang mencakup aspek (1) pengembangan keilmuan, (2) kajian capaian pembelajaran, dan (3) kurikulum program studi sejenis adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan bidang ilmu di tingkat nasional dan internasional.

Amanat yang diberikan perundang-undangan, Unhan bertugas mengembangkan ilmu bidang teknologi dan pertahanan serta bela negara. Dengan pemberian otoritas mengoperasionalkan Program Studi Teknik Elektro khusus teknologi pertahanan jenjang sarjana, dapat dipastikan bahwa Unhan akan dapat lebih memainkan peran dalam pelaksanaan tugasnya. Pelaksanaan Tridharma dalam kerangka pengelolaan Program Studi tersebut secara otomatis akan lebih mendalam dan lebih khusus dalam melakukan pembelajaran serta kajian tentang ilmu teknologi dan pertahanan. Kajian secara lebih mendalam tersebut pada gilirannya akan memberikan pemahaman secara lebih jauh tentang ilmu teknologi dan pertahanan serta dalam konteks itu akan mendorong semakin berkembangnya bidang ilmu teknologi dan pertahanan. Keunggulan pengembangan keilmuan teknologi

dan pertahanan serta bela negara yang dikembangkan Unhan adalah karena substansi dan objek kajian akan lebih menggali karakteristik teknologi pertahanan dan bela negara Indonesia. Secara umum kerangka teori, kajian, dan terminologi tentang ilmu teknologi dan pertahanan juga telah berkembang serta didalami di berbagai negara lainnya dalam operasional program pendidikan, namun khususnya Unhan melakukan kajian yang lebih mengungkapkan dan memahami teknologi dan pertahanan dikaitkan dengan bela negara sesuai karakteristik negara bangsa Indonesia.

b. Kajian capaian pembelajaran.

Sesuai dengan karakteristiknya, capaian pembelajaran bagi program sarjana adalah pada jenjang Tujuh sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Lulusan program ini sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya maka memiliki otoritas, menguasai secara penuh subjek dalam bidang ilmu teknologi dan pertahanan serta bela negara hingga pada batas ilmu pengetahuan mutakhir dan mampu mengembangkannya. Dengan referensi demikian, formulasi capaian pembelajaran pada program sarjana adalah diarahkan pada gambaran profil lulusannya meliputi sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

c. Perbandingan dengan kurikulum dari program studi sejenis.

Kajian ilmu teknologi dan pertahanan bukanlah sesuatu yang baru dilakukan. Ada banyak negara di dunia internasional yang telah menyelenggarakan pendidikan seperti universitas yang mengkhususkan bidang kajiannya pada ilmu teknologi dan pertahanan. Beberapa negara yang telah memiliki institusi pendidikan bidang teknologi dan pertahanan antara lain USA dengan MIT dan Harvard University. Begitupun dengan sejumlah negara lain seperti Jepang, Perancis, Singapura, dan Rusia, yang sudah lebih dahulu fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan, strategi, teknologi, logistik, dan manajemen yang berkaitan dengan pembangunan keilmuan bidang teknologi dan pertahanan.

Program studi yang telah ada dan dioperasionalkan Unhan pada dasarnya telah memiliki kurikulum hasil *benchmark* dengan kurikulum yang ada di berbagai negara terutama di Amerika dan Inggris. Melalui pelaksanaan kerja sama dengan NPS dan *Cranfield University*, Unhan melakukan benchmark kurikulum dalam rangka melihat kesesuaian maupun keunggulannya dan pada saat yang sama juga mengkaji tentang materi-materi yang lebih tepat untuk konteks Indonesia. Penyelenggaraan program studi dengan jenjang sarjana dengan demikian lebih merupakan melakukan penyesuaian kurikulum pada tataran agar lulusan program tersebut dapat mencapai kompetensi atau capaian

pembelajaran jenjang enam sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan.

Program Studi Teknik Elektro (Sarjana) memiliki keilmuan yang khusus di bidang tata kelola teknologi dan pertahanan. Program Studi Teknik Elektro (Sarjana) menyiapkan para lulusannya agar siap kerja di bidang teknologi dan pertahanan yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Jika lulusan Program Studi Teknik Elektro (Sarjana) banyak yang diserap di lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta maka diharapkan dapat mengangkat SDM dalam bidang ilmu teknologi dan pertahanan serta bela negara.

Pelaksanaan pendidikan yang akan diterapkan dalam Program Studi Teknik Elektro (Program Sarjana) tetap memperhatikan penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien. Kurikulum yang disusun merupakan suatu bidang studi disiplin ilmu yang menggabungkan berbagai teori, pendekatan dan perangkat analisis dari berbagai disiplin ilmu teknologi rekayasa. Dengan kurikulum tersebut, para mahasiswa Program Studi Teknik Elektro program sarjana diharapkan dapat memiliki wawasan dalam bidang teknologi dan pertahanan sesuai dengan konsentrasi yang akan ditekuninya.

Program studi yang akan dioperasionalkan memiliki mata kuliah yang juga diajarkan di program studi di Unhan, meliputi aspek keilmuan teknologi, rekayasa, dan pertahanan lebih mendalam lagi terutama melalui riset tentang teknologi dan pertahanan. Oleh karena itu, Program Studi Teknik Elektro program sarjana

memiliki keterkaitan secara keilmuan dengan program studi yang ada di Unhan. Karena ada keterkaitan secara keilmuan, dapat dikatakan sebagian mata kuliah di program studi Unhan yang sudah ada merupakan ilmu penunjang Program Studi Teknik Elektro khusus teknologi pertahanan program sarjana.

Profil Lulusan Program Studi.

Setelah menyelesaikan pendidikan, diharapkan lulusan Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Militer Unhan menjadi:

- a) Asisten Peneliti / Engineer di bidang Elektro; dan
- b) Perwira TNI atau ASN Pertahanan.

Profil lulusan Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Militer Unhan sebagai berikut:

1. Memiliki sikap dan etika mulia, disiplin, tangkas, adaptif, kolaboratif, dan pembelajar sepanjang hayat;
2. Mampu menginterpretasikan konsep sistem pertahanan pada bidang teknik elektro militer;
3. Mampu memecahkan permasalahan pada bidang teknik elektro militer seperti kendali persenjataan dengan menggunakan pengetahuan dan kompetensi tentang rekayasa teknik elektro militer;
4. Mampu menjadi lulusan yang memiliki pengetahuan konsep rekayasa tentang elektro militer dan implementasinya di lapangan serta memiliki semangat kader bela negara.

III. KESIMPULAN

Sumber daya manusia adalah faktor penting dalam mendukung Pertahanan Negara. Pendidikan Tinggi merupakan Lembaga potensial dalam menghasilkan SDM unggul dan berkarakter dalam mempertahankan NKRI. Salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi yang difasilitasi negara adalah Universitas Pertahanan, yang salah satunya memiliki Fakultas Teknik Militer dengan Program Studi Teknik Elektro (Sarjana) yang mana akan menyiapkan para lulusannya siap kerja di bidang teknologi dan pertahanan yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Hal ini diharapkan dapat mengangkat SDM dalam bidang ilmu teknologi dan pertahanan serta bela negara. Pelaksanaan pendidikan yang akan diterapkan dalam Program Studi Teknik Elektro (Program Sarjana) tetap memperhatikan penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien. Kurikulum yang disusun merupakan suatu bidang studi disiplin ilmu yang menggabungkan berbagai teori, pendekatan dan perangkat analisis dari berbagai disiplin ilmu teknologi rekayasa. Dengan kurikulum tersebut, para mahasiswa Program Studi Teknik Elektro program sarjana diharapkan dapat memiliki wawasan dalam bidang teknologi dan pertahanan negara sesuai dengan konsentrasi yang akan ditekuninya.***

Sumber:

Prakoso, Lukman Yudho, Ria Apriliyani, 2021, *Implementasi Ilmu Teknik Elektro Bidang Pertahanan dan Militer*, CV. Aksara Global Akademia, Indonesia.

https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Pertahanan_Indonesia,

Tgl: 10 Agustus 2021, Pkl 14.10

Bab 5

Forum Maritim dalam Penanggulangan Ancaman Negara

***Suhirwan, Lukman Yudho Prakoso**

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Pertahanan No.3 tahun 2002 tentang sistem pertahanan negara diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan semesta. Bentuk pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, segenap sumber daya nasional, dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pertahanan negara merupakan bagian dari fungsi pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional. Ancaman yang muncul di batas negara memperlihatkan adanya ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan negara. Seperti penyelundupan manusia yang merupakan ancaman yang kini muncul di perbatasan negara dengan menjadikannya Indonesia sebagai negara transit. Penyelundupan narkoba pun menjadi salah satu ancaman dari posisi Indonesia sebagai negara maritim.

Contohnya, lalu lintas perdagangan dan pelayaran internasional di selat malaka yang merupakan salah satu rute tersibuk sehingga banyak ditemukan ancaman maritim seperti bajak laut, perompak, dan berbagai aksi kriminalitas di laut. Hal ini tentunya menjadi tugas dari TNI untuk mendeteksi, menangkal dan menangani berbagai ancaman maritim agar terciptanya rasa aman dan

nyaman di wilayah Indonesia. Tugas tersebut dipikul oleh TNI AL dalam mempertahankan wilayah Indonesia di laut sehingga diperlukan wawasan maritim yang mumpuni dan luas untuk menangani berbagai permasalahan dan kompleksitas ancaman di wilayah perairan Indonesia.

Contoh lainnya adalah dekatnya Selat Sunda dengan Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara memiliki eskalasi potensi ancaman yang sangat tinggi yang dihadapkan dengan potensi ancaman pertahanan negara yang mungkin terjadi di Selat Sunda jika tidak diantisipasi. Dumai sebagai kota yang berbatasan laut dengan Malaysia di Selat Malaka tentunya menjadi salah satu daerah lainnya yang sangat rentan terhadap tindak kejahatan transnasional seperti penyelundupan manusia, narkoba, dan lain sebagainya. Dikarenakan letaknya sangat strategis, menjadikan Dumai sebagai pintu masuk dan sekaligus jalur tikus untuk melakukan penyelundupan.

Angka kejahatan lintas Negara di Indonesia dari tahun ketahun selalu naik tajam. Indonesia sudah menjadi sasaran asymmetric Warfare. Lantas “Bagaimanakah sinergitas kelembagaan bidang kemaritiman dalam pelaksanaan tugas pokoknya dalam menghadapi ancaman asimetris warfare di Indonesia?” Pendalaman kasus-kasus ini menggunakan metode kualitatif deskriptif fenomenologi dengan pembahasan menggunakan teori sinergitas. Nara sumber yang dilibatkan sebagai informan adalah semua penegak hukum di laut dan pihak terkait. Memperhatikan contoh-contoh dari hasil wawancara kepada Narasumber, diperoleh informasi bahwa terdapat sinergitas di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing kelembagaan bidang kemaritiman, walaupun masih berjalan sendiri-sendiri, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya pertukaran informasi, sehingga satu dengan lainnya saling mencari informasi sendiri-sendiri. Ditemukan faktor pendukung berupa telah adanya forum antara penegak hukum maupun dengan pemerintah daerah

setempat, namun juga ditemukan kendala yang utama yaitu terbatasnya anggaran dalam menunjang kegiatan operasi dan terbatasnya pendukung sarana/prasarana yang diperlukan. Selain itu masih ditemukan juga kendala sharing informasi antara penegak hukum. Sebagai penutup hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa diperlukan forumforum maritim resmi dan tidak resmi yang dapat mempertemukan para stake holder untuk saling bertukar informasi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan menanggulangi asimetrik warfare di Selat Sunda sesuai dengan potensi bidang tugas dan fungsi masing-masing. Forum-forum ini untuk menghilangkan faktor-faktor penghambat sinergitas dalam implementasi kebijakan pertahanan dengan adanya kepentingan dan penafsiran yang berbeda dalam hal pelaksanaannya. Perbedaan penafsiran ini diakibatkan adanya perbedaan struktur organisasi masing-masing implementor.

II. POTENSI ANCAMAN POSISI ASIMETRIS

Posisi silang/ asimetris Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berada diantara dua benua Asia dan Australia serta dua Lautan Pasifik dan Hindia, menempatkan NKRI pada posisi strategis. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut sangat luas memiliki keuntungan memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, juga potensi ancaman yang besar, potensi ancaman di laut Indonesia adalah satu diantara lima ancaman terbesar Indonesia saat ini Wilayah Laut Indonesia tidak saja memiliki arti penting bagi Indonesia, juga memiliki arti yang sangat penting untuk dunia internasional, karena wilayah laut Indonesia terletak di posisi silang dunia yang sering dilewati transportasi laut negara-negara lain. Salah satu konskuensi pengakuan dunia terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan, Indonesia harus membuat dan menetapkan beberapa lajur Internasional yang melewati wilayah yuridiksi nasional Indonesia untuk dapat digunakan berbagai negara untuk melintas di wilayah laut Indonesia.

Dampak lain terhadap kepadatan lalu lintas pelayaran contohnya di Selat Malaka, seperti digunakannya wilayah ALKI I oleh perompak untuk menghindari kejaran aparat keamanan Indonesia dan aparat keamanan gabungan (Indonesia, Malaysia, dan Singapura) atau penyelundupan. Imbas dari pusat pertumbuhan dan perekonomian Asia dan Asia Tenggara di Republik Rakyat Cina (RRC) dan Singapura, seperti penyelundupan barang-barang ilegal dan juga perdagangan manusia, turut menjadi potensi ancaman di ALKI I, termasuk imbas bahaya ancaman bencana alam dan tsunami di Selat Sunda, seperti ancaman gempa vulkanik/erupsi gunung berapi (anak Krakatau) dan imbas politik ekspansional Malaysia, seperti kemungkinan klaim wilayah teritorial baru. Ancaman lain secara faktual dan potensial sangat tinggi adalah Kejahatan Lintas Negara yang Terorganisasi (Transnational Organised Crime), dari tahun ke tahun, angka kejahatan lintas negara di Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 terjadi 10.444 kejahatan, meningkat di tahun 2011 menjadi 16.138 kasus, kemudian di tahun 2012 sejumlah 21.457 kasus, tahun 2013 sejumlah 34.513 kasus, tahun 2014 sejumlah 34.513 kasus, tahun 2015 sejumlah 40.938 kasus, dan tahun 2016 sejumlah 41.033 kasus. Jumlah kejahatan transnasional yang ditangani Polri mengalami peningkatan. Penyelundupan narkoba dari luar negeri ke Indonesia merupakan kejahatan transnasional yang paling menonjol. Jenis kejahatan lain adalah terorisme, trafficking, kejahatan dunia maya, dan penyelundupan manusia.

Ancaman faktual yang terjadi pada bulan Juli 2017 menggemparkan wilayah Selat Sunda yaitu ditangkapnya penyelundupan sabu-sabu 1 (satu) Ton diperairan Banten. Hal ini menunjukkan keberadaan akses masuk perairan wilayah laut Indonesia masih sangat rawan dan sangat berpotensi terjadinya ancaman asimetrik warfare, jika saja sabu-sabu tersebut tidak tertangkap dapat membunuh lima juta jiwa menurut Kepala BNN

(Badan Narkotika Nasional) Budi Waseso (Hadi Maulana, Kompas.com). Setelah kejadian tersebut berturut-turut berhasil ditangkap kembali penyelundupan melalui jalur laut dalam jumlah Ton. "Berbagai hal tersebut pada gilirannya telah menjadikan fungsi utama angkatan perang sebagai peran konvensional menjadi obsolete (usang) jika dibandingkan dengan ancaman kontemporer lainnya yang bersifat asimetris, proksi, hibrida, dan kejahatan lintas negara termasuk siber.

III. POTENSI ANCAMAN NEGARA SECARA GEOGRAFIS

Indonesia merupakan Negara yang berbatasan langsung baik dari darat maupun laut dengan beberapa negara tetangga, seperti Australia, Papua Nugini, Filipina, Brunai Darusalam, Singapura dan Malaysia. Pada tahun 2003. Di sini kita mengambil contoh Selat Malaka yang dilayari pada tiap harinya dengan barang angkutan yang berjumlah lebih dari sepuluh juta barrel yang dilewati oleh 19.154 buah kapal tangker ke arah timur (negara teluk Persia-Asia Timur). Dengan adanya aktivitas yang sangat padat di Selat Malaka menjadi kawasan ini sangat krusial karena sebagai jalur sempit yang menopang terlalu banyak kuota perdagangan dunia, yang sangat berpotensi timbulnya ancaman tindak kejahatan transnasional. Pada periode 2010-2014, peningkatan kejahatan transnasional perampokan terus meningkat. Hal ini selaras dengan prediksi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) bahwa pada tahun 2018 di Indonesia terjadi adanya peningkatan jenis kejahatan transnasional atau tindak pidana yang melintasi batas negara yaitu terorisme, peredaran gelap narkoba, perdagangan manusia, imigran gelap, penyelundupan senjata api, serta kejahatan siber. Meningkatnya kejahatan tanpa batas, bahkan antar lintas negara terjadi seiring dengan meningkatnya mobilitas

warga antar Negara, yang berdampak pada meningkatnya mobilitas maupun modus kejahatan lintas negara.

Untuk mengatasi kejahatan transnasional di wilayah ASEAN, adanya kesepakatan bersama oleh 8 (delapan) negara anggota ASEAN yang meliputi: terorisme, perdagangan manusia (human trafficking), penyelundupan obat-obatan terlarang, pembajakan di laut, pencucian uang, kejahatan ekonomi Internasional, penyelundupan senjata, kejahatan dunia maya (cybercrime). Walaupun demikian, kejahatan transnasional di negaranegara ASEAN saat ini beraneka ragam, tapi yang paling mencolok adalah pencucian uang, narkoba, serta perdagangan manusia. Beberapa modus kejahatan lintas negara itu antara lain perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal, pencucian uang, pornografi, kejahatan dunia maya (cybercrime), transfer pendanaan ilegal lewat bank, perdagangan obat terlarang, serta penyelundupan manusia (people smuggling).

Tingginya nilai geografis dan ekonomi di Selat Malaka selalu memunculkan ancaman keamanan disekitarnya. Kejahatan transnasional dalam bentuk penyelundupan manusia menjadi salah satu bentuk kejahatan yang menjadi fenomena saat ini, karena banyaknya pengungsi rohingya yang mencari suaka justru menjadi target penyelundupan apakah itu untuk diperjual belikan ataupun untuk menjadi pekerja ilegal. Di Indonesia, terutama pada pulau-pulau yang berada di wilayah perbatasan, pola imigrasi ilegal yang terjadi akhirnya berimplikasi pada munculnya masalah keamanan berupa aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas negara, juga kejahatan transnasional yang terorganisir. Sehingga kejahatan yang dilakukan dengan melewati batas teritorial suatu Negara disebut kejahatan transnasional.

Penyelundupan manusia dan imigran ilegal mempunyai keterkaitan satusama lain. Imigran ilegal berhasil masuk ke negara transit maupun negara tujuan tidak selalu membutuhkan

kerjasama dengan para agen penyelundup, mereka juga dapat menyelundupkan dirinya sendiri ke negara tujuan tanpa membutuhkan agen penyelundup. Penyelundupan manusia mengakibatkan semakin banyaknya jumlah imigran ilegal. Alasan klise yang sering diberikan oleh pelaku penyelundupan adalah masalah ekonomi dan rasa aman dari konflik di negaranya.

IV. FUNGSI FORUM MARITIM DALAM MENGHADAPI ANCAMAN NEGARA

Peran satuan patroli dalam koordinasi dengan satuan samping agar terjalin komunikasi yang baik dan terarah dalam rangka menindak setiap kejahatan yang melintas maupun berupaya untuk menyelundupkan narkoba maupun manusia sangat penting. Kita ambil contoh Lantamal III Jakarta sebagai unsur pendukung dan pelayan di dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan petunjuk kerja (juker), yang merupakan penjabaran lebih lanjut Prosedur Lantamal III yang disahkan oleh Keputusan Kasal Nomor Kep/805/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Daftar Susunan Personel (DSP) pada organisasi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Orgaspros Lantamal III)

Tugas pokok Lantamal III Jakarta meliputi :

- a. Senantiasa bekerja menyiapkan fasilitas labuh bagi KRI apabila akan melaksanakan sandar, landasan bagi unsur pesawat udara dan Marinir serta unsur satuan lainnya apabila sedang melaksanakan kerja maupun latihan di Lantamal III Jakarta.
- b. Membuat dan menyusun program kerja untuk senantiasa membina kemampuan baik berupa sumberdaya manusianya, sarana dan prasarana pendukungnya yang

- ada di Lantamal III berdasarkan rencana serta program kerja yang akan dilaksanakan oleh Komando Armada I.
- c. Berupaya membina kekuatan dan kemampuan personil melalui berbagai pendidikan maupun pelatihan guna melaksanakan pentahapan yang dimulai dari perencanaan, menyusun materi yang akan dilaksanakan, persiapan maupun pada akhir dari suatu perencanaan adalah pelaksanaan.
 - d. Melaksanakan pembinaan kemampuan unsur dan penyelenggaraan operasi keamanan laut terbatas, hal ini dilaksanakan karena segala sesuatu yang sifatnya berskala besar dan mengerakkan unsur KRI harus perintah dari Koarmada I dalam rangka penegakan kedaulatan serta hukum di laut dan melaksanakan koordinasi, pengaturan pertahanan pangkalan, membantu proses penyelesaian perkara pelanggaran keamanan laut sehingga setiap permasalahan yang ada selalu berkoordinasi dengan pengkalan yang terdekat.
 - e. Melaksanakan kemampuan yang dimiliki oleh Lantamal III Jakarta dengan cara melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan kapal baik melalui satuan kerja fasilitas pemeliharaan kantor (Fasharkan) sehingga apabila kapal mengalami kendali bisa dilaksanakan perbaikan yang sifatnya tidak terlalu berat, apabila rusaknya berat maka sudah ada pihak ketiga sebagai rekanan yang dengan segera memfasilitasi hal tersebut. Disamping itu juga melaksanakan perbaikan unsur pesawat udara dan kendaraan lainnya yang digunakan dalam rangka operasional untuk kesiapsiagaan operasi TNI AL.
 - f. Senantiasa melaksanakan pembinaan kemampuan unsur dalam rangka kesiapan penyelenggaraan operasi keamanan laut terbatas untuk melaksanakan operasi dalam rangka penegakan kedaulatan serta hukum di laut dan melaksanakan koordinasi dengan instansi lain apabila

permasalahan tersebut untuk ditindaklanjuti, pengaturan pertahanan pangkalan, serta membantu proses penyelesaian perkara pelanggaran keamanan laut dan memfasilitasi dengan memberikan bantuan hukum sampai dengan selesai pemberkasan untuk dilimpahkan ke instansi yang lainnya.

- g. Senantiasa melaksanakan pembinaan potensi maritim yang melibatkan satuan kerja Paspotmar (Perwira Staf Potensi Maritim) sehingga menjadi kekuatan Pertahanan Keamanan Negara di laut yang berdasarkan rencana dan program Komando Armada I.

Di dalam pelaksanaannya di lapangan maka Lantamal III Jakarta juga memiliki satuan khusus yang bertugas untuk menindak setiap kejadian tindak kejahatan baik berupa penyelundupan BBM, manusia, Perompakan, Pembajakan, maupun pencurian sumber daya alam, pencurian ikan, lebih khusus lagi tentang penyelundupan narkoba. Satuan reaksi cepat tersebut diberi nama Fleet 1 Quick Responsible (F1QR), angka satu menunjukkan wilayah Kotama Koarmada I. Pada pelaksanaan F1QR panglima Koarmada I selaku penanggung jawab sedangkan Komandan Gugus Tempur Laut Barat (Guspurlabar) dan Gugus Tempur Keamanan Laut Barat (Guskamlabar) mengatur seluruh unsure Untuk gelar kekuatan yang diselenggarakan di wilayah barat sesuai dengan kebutuhan ancaman yang terjadi saat itu. Kekuatan personel tentunya memiliki kualifikasi yang lebih dengan satuan yang lainnya sehingga mereka mempunyai kecakapan dan ketepatan didalam setiap melaksanakan operasi. Struktur organisasi F1QR Lantamal III Jakarta F1QR adalah satuan kecil yang mempunyai ketangguhan dan kecepatan di dalam melaksanakan tugas serta kemampuan sumber daya manusianya mempunyai ketrampilan dan keahlian baik dari segi menembak pada posisi bergerak maupun mengemudi Sea rider dengan baik, disamping itu kemampuan di dalam menindak serta

melumpuhkan lawan secara profesional. Gerakannya memperhatikan kecepatan serta ketepatan di dalam setiap menanggulangi tindak kejahatan di laut. Kesiapsiagaan pasukan ini selama 24 jam, kapanpun apabila mendapatkan informasi dan komunikasi baik dari intelijen maupun komando atas selalu siap untuk bergerak dan menyelesaikan tugas secara cepat dan tepat sesuai prosedur yang berlaku.

Disamping itu Lantamal III Jakarta juga mempunyai satuan patroli (Satrol) Lantamal dalam aspek pembinaan berkedudukan langsung di bawah Komandan Lantamal dan dalam aspek operasional di bawah komando pelaksana operasi. Tugas Satrol Lantamal bertugas melaksanakan pembinaan kemampuan tempur unsur-unsur organiknya dan melaksanakan operasi keamanan laut dalam rangka penegakan hukum di wilayah kerja Lantamal. Sedangkan tugas dan fungsi dari Satuan Patroli antara lain:

- a. Pembina kemampuan personel dan material guna meningkatkan kesiapan unsur-unsur organiknya.
- b. Pelaksana operasi keamanan laut dalam rangka menegakan hukum di wilayah kerjanya atas perintah komando pelaksana operasi.
- c. Pelaksana proses hukum terhadap pelanggaran tindak pidana tertentu di laut sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Pelaksana koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di kawasan wilayah kerjanya.
- e. Pelaksana dukungan pencarian dan pertolongan terhadap kejadian dan kecelakaan di laut.
- f. Menetapkan dan menjamin terlaksananya program Satuan Kapal Patroli Lantamal yang meliputi bidang pembinaan personel, material, metode dan pembinaan latihan.

- g. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan program Satuan Kapal Patroli Lantamal serta alokasi sumber daya yang ditentukan oleh Danlantamal.
- h. Menyediakan unsur-unsur KRI siap operasi untuk mendukung kepentingan operasi Komando Pelaksana Operasi (Kolaksops).
- i. Merencanakan dan melaksanakan program pembinaan teknis dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesiapan materiel melalui pemeliharaan, perawatan dan perbaikan sesuai dengan tuntutan pemeliharaan materiel kapal dan tingkat kewenangannya.
- j. Merencanakan dan melaksanakan program pembinaan personel dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan keterampilan personel melalui latihan-latihan individual, latihan tim dalam pos tempur dan dalam departemen serta latihan kapal antar departemen (latihan peran).

Pangkalan TNI pun mempunyai tanggung jawab besar terhadap wilayah pertahanan di Indonesia, seperti pada perbatasan laut Dumai dan Selat Malaka dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan tersebut mengingat Pangkalan TNI AL Dumai menjadi satu-satunya TNI AL yang ada di wilayah provinsi Riau.

Berdasarkan Trinitas Angkatan Laut yang diadopsi dari Ken Booth yaitu *military*, *diplomacy*, dan *policioner*. Adapun salah satu tugas dari TNI AL adalah melakukan penegakan hukum terbatas di laut. Kejahatan yang dapat ditangani oleh TNI AL meliputi pelayaran, perikanan dan eksploitasi sumber daya alam, hal tersebut tentu saja membatasi ruang lingkup penegakan hukum di laut bagi TNI AL mengingat patroli dan pengamanan yang dilakukan di laut sering menemui tindak pidana lainnya seperti penyelundupan sehingga hanya bisa melakukan penangkapan tanpa adanya tindakan keberlanjutan yang dapat dilakukan TNI AL terhadap kejahatan tersebut, karena kurangnya

informasi yang diperoleh dari satuan samping menyebabkan Pangkalan TNI AL Dumai tidak mengetahui akhir dari tindakan kejahatan tersebut. Hal tersebut juga berlaku bagi penangkapan dan pengamanan yang dilakukan oleh Pangkalan TNI AL Dumai terhadap pelaku penyelundupan manusia yang kemudian diserahkan kepada pihak keimigrasian.

Patroli keamanan laut yang menghadirkan kapal-kapal perang RI (KRI) di seluruh perairan Indonesia, termasuk di pulau-pulau terpencil, selain dimaksudkan untuk melaksanakan patroli rutin dalam rangka penegakan keamanan di laut, juga dimaksudkan untuk menunjukkan kesungguhan negara dalam mempertahankan negara. Namun kegiatan show of flag tidak hanya diartikan sebagai tindakan koersive tetapi merupakan naval diplomacy yang merupakan cerminan politik dan kebijakan luar negeri Indonesia.

Untuk mampu menghadapi berbagai ancaman, maka sinergitas antara TNI dengan pihak-pihak terkait akan menciptakan sebuah keadaan yang saling sinergi dalam keamanan di laut untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menciptakan keamanan di laut. Sinergitas stake holder disini adalah suatu kegiatan gabungan atau kerja sama lebih dari dua lembaga atau organisasi yang berbeda untuk memberikan hasil yang lebih baik, kegiatan yang dilakukan tersebut adalah untuk pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan fungsi masing-masing guna menunjang suatu situasi keamanan wilayah laut. Pelaksanaan tugas bidang keamanan di wilayah laut perairan Indonesia, untuk mengaplikasikan sistem pertahanan laut dalam satu kesatuan, sehingga mampu menciptakan tata kelola sistem pertahanan yang baik. Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas tersebut, maka terdapat faktor-faktor yang harus dapat bersinergi antara stake holder bidang kemaritiman dengan baik dan dioptimalkan fungsinya sehingga wilayah laut dapat terhindar dari ancaman faktual yang berbentuk asimetrik warfare.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di bidang sinergitas/hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lain, serta wawancara kepada Narasumber dalam menghadapi asimetrik warfare, diperoleh informasi bahwa terdapat sinergitas antara implementor-implementor bidang maritim. Kegiatan ini ditunjukkan dengan koordinasi dan komunikasi yang baik antara masing-masing implementor sehingga tidak terjadi benturan kepentingan di lapangan. Masih diperlukan forum resmi maupun tidak resmi untuk sharing informasi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing dapat terlaksana untuk menjaga wilayah perairan di Indonesia.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini untuk menunjang pertahanan negara di laut secara menyeluruh. Pelaksanaan sinergi bidang keamanan laut di perairan Banten dilakukan dengan memperhatikan, sebagai berikut:

1. Peningkatan kerjasama antara stake holder bidang kemaritiman dengan ujung tombak TNI AL.
2. Pelaksanaan tatacara integrasi tugas-tugas stake holder dalam satu satuan tugas yang terkoordinasi
3. Pemanfaatan jejaring komunikasi yang terinteroperabilitas sebagai fungsi komando guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing stake holder.
4. Pelaksanaan sistem evaluasi pada setiap akhir penugasan sebagai sarana guna memperbaiki dan peningkatan tugas berikutnya.

Terdapat beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, antara lain:

1. Adanya updating data sesuai dengan perkembangan dinamika pelaksanaan tugas di lapangan serta diadakan evaluasi dan pengawasan.

2. Adanya pendukung dalam konsistensi yang dilaksanakan melalui forum-forum formal dan non formal dan dirumuskan dalam kebijakan untuk dijadikan pedoman serta penggunaan media sosial dalam sosialisasinya.
3. Adanya dukungan dalam bidang informasi dan tata kelola pelabuhan berupa dukungan informasi dari masing-masing stake holder.
4. Terdapat koordinasi dan kerjasama diantara implementor bidang kemaritiman dengan memahami setiap tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

V. KESIMPULAN

Adanya koordinasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing stake holder merupakan wujud dukungan terhadap pelaksanaan sinergitas diantara satu satuan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya ini dibutuhkan sharing informasi dalam suatu forum resmi merupakan implementasi dari pelaksanaan komunikasi dan koordinasi. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan sinergitas stake holder bidang kelautan agar dilakukan secara berkala komunikasi dan koordinasi dalam forum-forum formal dan non-formal, sebagai wadah untuk sharing informasi. Forum-forum ini untuk menghilangkan faktor-faktor penghambat sinergitas dalam implementasi kebijakan pertahanan dengan adanya kepentingan dan penafsiran yang berbeda dalam hal pelaksanaannya.

Hambatan yang dimiliki forum maritim dalam menghadapi beberapa kasus seperti penyelundupan manusia dan narkoba di Indonesia terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yaitu kurangnya jumlah personil yang dihadapkan dengan wilayah kerja yang luas, keterbatasan alutsista/teknologi yang dimiliki serta jumlah logistik yang terbatas. Sedangkan hambatan yang bersumber dari faktor eksternal adalah kondisi

geografis, faktor cuaca (gelombang tinggi, hujan dan badai, angin kencang, dan petir), pasang surut air laut, kesadaran masyarakat, kekuatan hukum penanganan bagi TNI AL, Perpres No 21 Tahun 2016 tentang Bebas visa dan kemudahan akses masuk ke Indonesia serta kondisi/situasi musim negara asal pelaku penyelundupan.

Sumber:

Suhirwan, Lukman Yudho Prakoso, 2019, Prosiding Seminar dan Lokakarya Indonesia (Slki), *Forum Maritim Kunci Sukses Penanggulangan Ancaman Asimetris di Selat Sunda*. [Universitas Matana](https://doi.org/10.33510/slki.2019.13-20) di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
<https://doi.org/10.33510/slki.2019.13-20>.

Sunardi, Agus Ariyanto, Suhirwan, 2020, Jurnal: *Sinergitas Intansi Maritim dalam Rangka Penganggulangan Nakoba di Teluk Jakarta*, Jurnal Strategi Pertahanan Laut, Vol 6 No 1, Universitas Pertahanan RI, Bogor.

Suryani, Suhirwan, dan Gultom, 2018, Jurnal: *Strategi Pangkalan TNI AL Dumai dalam Menghadapi Penyelundupan Manusia di Perbatasan Laut Dumai dan Selat Malaka*, Jurnal Peperangan Asimetris Vol 4 No 3, Universitas Pertahanan RI, Bogor.

Bab 6

Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam Meningkatkan Bela Negara

*TSL Toruan, Suhirwan

I. PENDAHULUAN

Dalam perspektif kepentingan TNI dalam meningkatkan kesadaran bela negara di lingkungan masyarakat luas. Serta Tujuan umum dari kasus menganalisis Strategi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut dalam meningkatkan kesadaran Bela Negara di salah satu wilayah yang menjadi sasaran pemberdayaan adalah hal penting untuk dilakukan secara serius dan konsisten. Analisa penulis yang menunjukkan bahwa kesadaran bela negara di wilayah Indonesia contohnya pesisir Jakarta pada saat itu (tahun 2018) masih rendah, dikarenakan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir belum sesuai dengan teori strategi pemberdayaan yang saat itu sudah massif di kalangan akademisi militer.

II. WILAYAH PERTAHANAN INDONESIA

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang diapit oleh dua samudera dan dua benua, serta mempunyai posisi geografis unik dan strategis. Posisi tersebut menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat dengan 10 negara di kawasan. Indonesia selain memiliki posisi geografis yang unik, juga memiliki perairan, yang menjadikan sebagai salah satu urat nadi

perdagangan Internasional, sehingga Indonesia rawan terhadap sengketa perbatasan dan ancaman keamanan, yang berakibat terhadap instabilitas, baik di dalam negeri maupun kawasan.

Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim, mempunyai kepentingan dalam membangun keamanan di kawasan, termasuk keamanan maritim, guna mendukung Indonesia sebagai poros Maritim Dunia (PMD). Berkaitan dengan hal tersebut, sangat diperlukan tata kelola sumber daya alam (SDA), sumber daya buatan (SDB), wilayah perbatasan, dan pertahanan yang handal.

Perkembangan lingkungan strategis yang terus bergerak sangat dinamis, selalu membawa perubahan terhadap kondisi ancaman yang kompleks dan berdampak terhadap pertahanan negara. Kompleksitas ancaman dimasukkan ke dalam pola dan macam ancaman yang multidimensional yakni ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida yang bisa digolongkan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata. Oleh karena itu, pertahanan negara ke depan membutuhkan keterpaduan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter, dengan usaha membangun kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan pertahanan negara yang andal, kuat dan disegani, serta memiliki daya tangkal tinggi

Dalam rangka melindungi kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dari spektrum ancaman yang kompleks, pertahanan negara disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta untuk mencapai tujuan nasional. Pertahanan semesta pada hakikatnya adalah suatu pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya. Keterlibatan setiap warga negara dalam pertahanan negara sesuai amanat UUD 1945, diimplementasikan dalam wujud program bela negara atas dasar kecintaan terhadap tanah air.

Sistem pertahanan semesta merupakan pertahanan bercirikan kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan. Kerakyatan artinya pandangan tentang pertahanan yang diabdikan bersama rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan bisa diartikan sebagai seluruh sumber daya maupun sarana prasarana nasional yang didayagunakan sebagai usaha pertahanan. Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas maka Kewilayahan bisa diartikan sebagai gelar kekuatan pertahanan yang dilaksanakan di seluruh wilayah NKRI dengan konstelasi geografi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan juga sebagai negara maritim.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Tugas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), pada pasal 9 ayat (e); Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut (dawilhanla). Hakikat pemberdayaan wilayah pertahanan laut adalah, upaya menyiapkan wilayah pertahanan laut, dan kekuatan pendukungnya secara dini, sesuai Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta), melalui upaya membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan pembinaan potensi maritim. Penyelenggaraan dawilhanla merupakan suatu kegiatan pengelolaan kekayaan Sumber Daya Nasional (sumdanas) menjadi kekuatan pertahanan laut dalam rangka mendukung kepentingan pertahanan negara, diperlukan suatu kebijakan dan petunjuk yaitu suatu pengertian tentang pemberian pemahaman secara umum dengan pokok bahasan tentang kemampuan sumber daya nasional bidang maritim, yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut yang bersinergi dengan Kementerian Pertahanan sebagai penyelenggara fungsi Pemerintah dibidang pertahanan dengan Kementerian atau institusi lainnya.

Dawilhanla dilaksanakan untuk membangun, dan meningkatkan kekuatan matra laut, dalam rangka membantu pemerintah untuk menyiapkan kekuatan nasional, menjadi kekuatan yang lebih

spesifik yaitu wilayah pertahanan laut, dengan kekuatan pendukungnya, baik Operasi militer Perang (OMP), maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Proses menyiapkan suatu Wilayah Pertahanan beserta kekuatan pendukungnya memiliki hubungan yang berkaitan dengan penyiapan ruang, alat dan kondisi juang dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan potensi maritim.

Pembinaan sektor geografi merupakan penyiapan ruang juang untuk kepentingan manuver pasukan dan penyiapan logistik wilayah, serta penyiapan sumber daya menjadi kekuatan pendukung Pertahanan Negara. Pembinaan pada bidang demografi adalah proses menyiapkan alat juang yang digunakan sebagai Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang dapat difungsikan untuk membantu Komponen Utama. Dalam situasi damai pembinaan kondisi sosial merupakan usaha menyiapkan kondisi juang yang ditujukan untuk membantu Pemerintah meningkatkan Ketahanan Wilayah melalui pemberdayaan masyarakat desa pesisir, yang bisa diwujudkan sebagai kekuatan Pertahanan Negara pada masa perang.

III. STRATEGI PEMBERDAYAAN WILAYAH

Dalam rangka pemberdayaan wilayah diantaranya wilayah pertahanan laut sebagai subyek, yang melibatkan segenap komponen TNI AL, Pemerintah, dan seluruh masyarakat yang dilaksanakan secara fungsional, dan proporsional, serta profesional. Sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam suatu sistem pertahanan negara, meliputi: Mabes TNI Angkatan Laut, Komando armada I dan Pangkalan Utama TNI AL III/JKT – Jakarta (Lantamal III/JKT), Pemerintah, dan masyarakat maritim. Potensi wilayah yang dapat diberdayakan untuk kepentingan pertahanan wilayah, yang penulis saat itu angkat adalah Kabupaten Tangerang-Banten.

Diperlukan suatu strategi dalam penyelenggaraan pemberdayaan wilayah pertahanan laut, mengingat luasnya wilayah di Kabupaten Tangerang-Banten, dalam upaya meningkatkan kesadaran bela negara, yang dipersiapkan sebagai komponen cadangan, dan komponen pendukung, yang mampu didayagunakan membantu komponen utama. Untuk itu, peneliti tertarik melaksanakan penelitian di wilayah tersebut, apakah pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai implementasi dari Dawilhanla melalui pembinaan potensi maritim yang dilaksanakan oleh Lantamal III, Jakarta dengan strategi Bakti TNI AL, pembinaan ketahanan wilayah, dan komunikasi sosial (komsos) dapat berjalan dengan baik.

Melihat fenomena yang ada di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, di mana masyarakatnya masih rendah kesadarannya terhadap bela negara. Hal itu terlihat dengan kejadian penyelundupan imigran gelap, melalui desa Tanjung Pasir asal Pakistan dan Afganistan menuju Australia pada tahun 2012 sebanyak 109 orang. Selain itu penyelundupan narkoba juga pernah melalui desa ini. Tidak menutup kemungkinan hal-hal seperti itu juga akan terjadi kembali di kecamatan pesisir yang lain jika kesadaran bela tidak dipupuk sejak dini.

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh warga negara untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembangunan pertahanan negara disesuaikan dengan konstelasi geografi Indonesia dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan nasional, yang dilaksanakan secara sinergi dengan pemerintah daerah.

Sasaran dari penyelenggaraan wilayah pertahanan laut adalah, Terpeliharanya wilayah nasional dan ruang juang yang tangguh serta terkelolanya sumber daya nasional bidang maritim dalam suatu sistem bela negara untuk menunjang kepentingan sistem pertahanan semesta, Terciptanya kekuatan dan kemampuan kewilayahan dalam rangka mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh di laut sekaligus terciptanya komponen cadangan dan komponen pendukung sebagai kekuatan pengganda yang ada di wilayah untuk kebutuhan pertahanan laut sesuai dengan bidang tugasnya melalui pembinaan potensi maritim.

Melalui strategi pemberdayaan wilayah pertahanan laut yang diimplementasikan melalui pemberdayaan masyarakat dengan pembinaan potensi maritim tersebut, diharapkan meningkatnya kesadaran bela negara masyarakat itu sendiri. Perjuangan bangsa Indonesia telah memberikan pengalaman berharga dengan nilai-nilai luhur yang masih terus dipertahankan. Hal ini terwujud melalui perjuangan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang senantiasa melibatkan warga negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional setiap warga negara melalui perwujudan sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaan kepada bangsa dan negara.

Richard Carver, managing direktor Coverdale Organizational, seorang ahli pemberdayaan, bahwa pemberdayaan dilakukan untuk memberikan dorongan kepada individu-individu atau masyarakat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan supaya bertanggung jawab dan menjadi lebih baik, sehingga tujuan organisasi tercapai.

Kesadaran Bela negara terkait dengan lima nilai yang mendasarinya, yaitu cinta tanah air, yakin dengan berideologi pancasila, sadar berbangsa dan bernegara, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Dari kelima unsur ini

dapat diinterpretasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah keterlibatan masyarakat pada saat pemilihan kepala daerah. Keengganan masyarakat Tanjung Pasir yang tidak mau terlibat dalam pemilihan kepala daerah, mengindikasikan bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara di kalangan masyarakat nelayan masih kurang. Kesadaran masyarakat nelayan dalam menjaga lingkungannya, sebagai wujud cinta tanah air, juga dinilai belum tumbuh. Ini terlihat dari kebiasaan masyarakat setempat yang masih sering membuang sampah tidak pada tempatnya. Limbah rumah tangga dan tempurung kelapa banyak terlihat berserakan di pinggiran pantai.

Salah satu tindakan yang menggambarkan cinta tanah air adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Lingkungan yang kotor dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kesehatan masyarakat sekitar, ditambah lagi jika dampak tersebut berpengaruh terhadap anak-anak usia sekolah yang rentan terhadap penyakit. Maka dari itu setiap warga masyarakat perlu ditumbuhkan rasa cinta tanah airnya yang dapat berpengaruh pada kelestarian lingkungan hidup sebagai interpretasi dari nilai cinta tanah air.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Di tahun 2018, Kesbangpol dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang sendiri belum memiliki strategi khusus terkait dengan kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat pesisir yang tujuannya adalah meningkatkan kesadaran bela negara di wilayah pesisir. Namun sebagai implementasi dari nilai cinta tanah air, Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan kebutuhan fasilitas melaut bagi para nelayan. Program tersebut diberikan secara bergiliran ke setiap desa di wilayah Tangerang, karena sesuai dengan kebutuhan nelayan untuk melakukan aktifitasnya di laut seperti menangkap ikan.

Strategi menurut General (Ret) Andrew J. Good Paster memiliki tiga unsur, yaitu **ends, means, dan ways**. Ketiga unsur tersebut harus terkandung dalam menjalankan suatu strategi, termasuk pemberdayaan masyarakat pesisir.

Tujuan (ends) dari program TNI AL adalah menyiapkan wilayah pesisir sebagai kekuatan untuk memenangkan perang, membangun kesejahteraan masyarakat pesisir dan menjalankan tugas pokok TNI AL. Kesemua program TNI AL dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran Bela Negara masyarakat pesisir agar kelak jika ada ancaman yang mengganggu kedaulatan negara, masyarakat tersebut dapat sigap dan mudah untuk dimobilisasi.

Sarana (means) yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai instrumen untuk mencapai tujuan, seperti ketersediaan gedung pertemuan sebagai sarana menyampaikan informasi, komunikasi, penampungan sampah dengan ukuran yang memadai, sarana rumah pintar untuk tempat membaca warga, sumber daya manusia (SDM).

Pada saat itu Potensi yang dimiliki wilayah pesisir dalam pemberdayaan masyarakat juga minim, sumber daya alam (SDA) selain ikan, sebagai penambah penghasilan warga, seperti rajungan dan kerang hijau hasilnya tidak maksimal, karena jaring yang ditebarkan berkualitas rendah sehingga sering robek atau hilang diterjang ombak, demikian juga halnya dengan kerambah, sering hilang dibawa ombak atau dicuri sesama warga. Hasil kerang tangkapan itu sebetulnya bisa diolah menjadi kerajinan tangan berupa tempat tisu dan bingkai foto dan dapat dijual sebagai oleh-oleh khas daerah Tanjung Pasir. Namun potensi ini belum dapat diaplikasikan secara maksimal mengingat keterbatasan kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan tangan tersebut, sehingga penjualan produknya terkendala yang

mengakibatkan minimnya pasaran yang mau membeli produk mereka.

Pada saat itu, Cara (ways) yang dilakukan oleh Spotmar Mabesal, Dispotmar Mabesal dan Lantamal III/JT dalam pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesadaran bela negara adalah dengan menerapkan strategi atau metode, yaitu Bakti TNI Angkatan Laut, Pembinaan Ketahanan Wilayah dan Komunikasi sosial. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dan Kesbangpol belum mempunyai strategi atau metode dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayahnya. Metode yang digunakan oleh Pemda adalah Desa dan Kelurahan diperintahkan untuk mengajukan proposal kebutuhan alat tangkap ikan nelayan, tetapi dari jumlah yang diajukan, yang dipenuhi tidak seluruhnya, dan itu diatur secara bergiliran tiap-tiap desa yang berjumlah 74. Sehingga desa yang sudah mendapatkan bantuan, belum tahu lagi kapan mendapat giliran berikutnya.

Strategi TNI Angkatan Laut dalam hal ini diantaranya adalah karya bakti, adapun kegiatannya yaitu kegiatan fisik dan non fisik. Kegiatan fisik dilaksanakan Lantamal III/JKT bersama masyarakat secara bergotong-royong dengan sasaran fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mempunyai nilai strategis seperti melaksanakan pembersihan pantai dari sampah dan limbah tempurung kelapa. Sedangkan kegiatan non fisik, Kegiatan yang menumbuhkan rasa nasionalisme, berwawasan kebangsaan, bela negara dan cinta tanah air serta meningkatkan keterampilan masyarakat guna mendukung ketahanan wilayah dengan melaksanakan penyuluhan tentang kesadaran bela negara. Tujuan dari Bakti TNI Angkatan Laut adalah membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan kemandirian TNI/TNI AL bersama Rakyat dalam rangka menyiapkan secara dini Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara.

Bintahwil kegiatan salah satunya adalah aspek potensi demografi yang meliputi aspek ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi diarahkan pada pendataan dan pembinaan sumber daya manusia yang disiapkan menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan yang memiliki kesadaran bela negara, cinta tanah air dan kepekaan masyarakat terhadap permasalahan yang timbul, baik secara individu maupun kelompok, guna terwujudnya alat juang yang tangguh. Kegiatan yang dilaksanakan Lantamal III/JKT dengan menanam jaring rajungan dan kerambah kerang hijau. Tujuan Bintahwil untuk memantapkan ketahanan wilayah dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemandirian TNI-Rakyat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut.

Pembinaan komunikasi sosial. Salah satu kegiatannya adalah memperkuat komunikasi sosial dengan masyarakat sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah itu. Kegiatan yang dilaksanakan Lantamal III/JKT melakukan penyuluhan tentang kesadaran bela negara. Tujuan komunikasi sosial adalah Memberikan pemahaman dalam menyamakan persepsi tentang pemberdayaan wilayah pertahanan laut kepada seluruh komponen bangsa yang berkaitan dengan Ruang, Alat dan kondisi juang serta memelihara dan meningkatkan kemandirian TNI Angkatan Laut dengan masyarakat maritim dalam rangka pertahanan semesta.

IV. KESIMPULAN

Teori strategi menurut Glueck & Jauch, strategi merupakan rencana yang disatukan, secara komprehensif yang menggabungkan keunggulan strategis organisasi dengan perkembangan lingkungan, yang telah diatur untuk meyakinkan bahwa tujuan pokok dari perusahaan dapat terwujud melalui cara

yang tepat oleh organisasi, dan juga belum sesuai dengan teori strategi yang disampaikan oleh Craig & Grant, bahwa strategi merupakan penentuan sasaran dan tujuan dalam jangka panjang (targeting and long-term goals) sebuah organisasi yang dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang diperlukan guna mencapai sasaran dan tujuan (achieve the goals and objectives).

Sumber:

Bastari, TSL Toruan, Suhirwan, 2018, Jurnal: “*Strategi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara di Kabupaten Tangerang, Banten (Studi di Lantamal III/JKT)*”, Jurnal Strategi Perang Semesta, Vol 4 No 3, Halaman 19-36, Universitas Pertahanan RI, Bogor.

Toruan, TSL, 2021, *Pertahanan Negara*, CV. Aksara Global Akademia, Indonesia.

BAB 7

Program TMMD dalam Mendukung Pertahanan Negara

*Suhirwan, TSL Toruan

I. PENDAHULUAN

Program TMMD sebagai bagian dari Bakti TNI, merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI bersama – sama dengan instansi pemerintah lainnya, untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat di daerah – daerah yang masih belum sejahtera. Dalam pelaksanaannya, program TMMD yang dilaksanakan oleh TNI untuk membantu pemerintah RI dalam percepatan pembangunan Indonesia dari daerah pinggiran, untuk memperkuat kemandirian TNI rakyat, dan mewujudkan pertahanan wilayah, menjadi terhambat karena banyak mengalami kesalahan dalam pengimplementasiannya. Kasus dalam bab ini untuk menganalisis implementasi Perkasad Nomor Perkasad/36-02/XII/2012 mengenai program TMMD dan dampaknya terhadap percepatan pembangunan, kemandirian TNI – Rakyat dan pertahanan beberapa wilayah Indonesia.

II. PENTINGNYA TMMD UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kegiatan pembinaan teritorial dilaksanakan oleh TNI pada masa damai, selama perang dan sesudah perang, serta pada tugas operasi militer selain perang baik yang bersifat tempur maupun bersifat non tempur. Dalam penyelenggaraan Bakti TNI, TNI AD berpedoman kepada Perkasad/36-02/XII/2012 tentang Bakti TNI, yang berisi tentang peran TNI sebagai komponen utama dalam kegiatan pembinaan teritorial, diarahkan untuk membantu

menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan (Civic Mission), untuk menangani masalah – masalah sosial dan kemanusiaan atas permintaan instansi terkait dan atau atas inisiatif sendiri, yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi terkait tanpa mengabaikan kesiapan satuan, dengan penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan yang memenuhi aspek kesejahteraan masyarakat dan bermanfaat untuk pertahanan negara. Oleh karena itu, pembangunan yang dilaksanakan oleh TNI harus bersifat selaras dan seimbang, yaitu perencanaan dan pelaksanaannya mengandung keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan masyarakat, dan kepentingan pertahanan, serta selaras dengan pembangunan daerah.

Salah satu kegiatan operasi bakti TNI adalah Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), yang merupakan program terpadu, lintas sektoral antara TNI, Polri, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Pemerintah Daerah serta komponen bangsa lainnya, yang dilaksanakan secara terintegrasi bersama masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana di daerah yang sudah ada program pembangunan desa namun belum terjangkau pelaksanaannya oleh pemerintah daerah, daerah rawan ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan, daerah bencana alam dan terancam bencana alam, daerah terisolir, daerah perbatasan, daerah terpencil dan daerah miskin/kumuh perkotaan.

Agar pelaksanaan TMMD dapat menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat, maka yang perlu diperhatikan adalah pentingnya pembagian kelompok tenaga ahli dalam melaksanakan sasaran fisik, karena ada sasaran fisik yang betul-betul perlu tenaga ahli seperti pembangunan rumah maupun pembuatan jembatan yang pelaksanaannya mengedepankan peran aktif masyarakat tanpa niatan untuk mengambil alih tanggung jawab masyarakat/instansi lainnya dalam pembangunan. Kemudian, agar pelaksanaan TMMD dapat menyentuh pertahanan wilayah, dimana setiap masyarakat memiliki kesadaran bela negara, maka dilaksanakan kegiatan non fisik, yang berkaitan dengan pembinaan mental

spiritual atau kejuangan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat

Hal yang tidak kalah pentingnya sebagai proses purna TMMD adalah, terwujudnya Pemda yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan hasil – hasil TMMD, sehingga dapat dirasakan dan dinikmati serta dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, sebagai bagian dari tugas Binter maka Komando Kewilayahan menghimbau Pemda untuk melakukan peningkatan kualitas hasil TMMD yang memiliki nilai taktis, seperti jalan hasil TMMD yang semula kelas III dapat ditingkatkan menjadi jalan kelas II atau kelas I agar dapat dilalui oleh kendaraan lapis baja.

Upaya untuk membantu kesulitan masyarakat dan membantu Pemda dalam Percepatan pembangunan telah dilaksanakan oleh Kodim 0615/Kuningan pada saat melaksanakan kegiatan TMMD ke-98 TA 2017. Namun hasil temuan dari Tim Wasev PJO (Penanggung Jawab Operasional) TMMD pelaksanaannya belum melibatkan personel intelijen dan dukungan yang diberikan oleh Pemda juga sangat sedikit, selain itu ada indikasi bahwa penentuan sasaran tidak dilaksanakan secara Bottom Up Planning, sehingga memberikan dampak pembangunan kurang memenuhi aspek kesejahteraan masyarakat dan kurang mengena dari segi manfaat untuk pertahanan negara. Keberadaan personel Satgas yang tidak mempunyai keahlian khusus seperti tenaga tukang, berpotensi menghambat lancarnya pengerjaan sasaran fisik. Sedangkan kegiatan sasaran non fisik dengan waktu terbatas, juga belum menyentuh dan belum dapat membangkitkan mental spiritual atau kejuangan masyarakat dalam bela negara.

Kemudian adanya kerusakan hasil TMMD, akibat belum adanya dukungan anggaran perawatan/ pemeliharaan dari Pemda, sehingga manfaat tidak dapat dirasakan dan dinikmati dalam jangka waktu yang lama, serta tidak dapat dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perkasad/36-02/XII/2012, serta pelaksanaan percepatan pembangunan

Kodim, adalah Komando pelaksana Komando Daerah Militer/Komando Resort Militer (Kodam/Korem), bersifat kewilayahan yang berkedudukan langsung di bawah Panglima Daerah Militer/Komandan Resort Militer (Pangdam/Danrem). Kodim bertugas pokok menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam/Korem. Untuk melaksanakan tugas pembinaan teritorial tersebut, Kodim melaksanakannya bersama – sama dengan pemerintah Daerah dan instansi pemerintah lainnya yang terkait, serta komponen bangsa lainnya yang sifatnya lintas sektoral. Tugas tersebut dilaksanakan untuk menyiapkan dan membina segenap potensi yang ada diwilayah darat untuk dijadikan sebagai kekuatan pertahanan darat yang meliputi Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang tangguh sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Kegiatan penyiapan dan pembinaan pemberdayaan wilayah pertahanan darat oleh TNI tersebut dikemas dalam kegiatan yang disebut dengan Program Bakti TNI, yang dilaksanakan untuk membantu kesulitan masyarakat sampai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya peran TNI yang hadir untuk membantu kesulitan masyarakat, diharapkan dapat semakin memperkuat kemandirian TNI - Rakyat.

Tugas membantu mengatasi kesulitan masyarakat dalam program bakti TNI, telah dilaksanakan oleh salah satu Kodim, yaitu Kodim 0615/Kuningan yang telah menyelenggarakan kegiatan TMMD ke-98 TA 2017, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di Desa Sindang, Kec. Lebakwangi, Kab.

Kuningan, sebagai upaya untuk membantu Pemda Kab. Kuningan dalam mengatasi kesulitan masyarakat yang berada di wilayah Kab. Kuningan, serta untuk memperkuat kemandirian TNI – Rakyat serta mendukung pertahanan wilayah. Untuk itu, maka pembahasan penelitian ini akan difokuskan kepada implementasi Perkasad-36/2012 berkaitan dengan isi kebijakan dan lingkungan Kebijakan, serta pelaksanaan pembangunan masyarakat itu sendiri.

Implementasi Perkasad-36/2012 berkaitan dengan isi kebijakan, diperoleh data sebagai berikut:

- 1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan (Interest Affected).** Implementasi Perkasad-36/2012 terkait dengan Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan belum sesuai dengan implementasi kebijakan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan dalam pemilihan sasaran oleh para penentu kebijakan berdasar kepada kondisi wilayah yang benar – benar kurang dari aspek kesejahteraan dan aspek stabilitas daerah, dan memang layak untuk dijadikan wilayah lokasi sasaran TMMD masih tidak terlalu diperhatikan. Sebenarnya secara teknis masih dapat dikoordinasikan antar penentu kebijakan dengan baik. akibatnya penentuan lokasi sasaran TMMD yang tidak tepat ditinjau dari aspek kesejahteraan dan aspek stabilitas daerah.
- 2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan (Type of Benefits).** Implementasi Perkasad-36/2012 berkaitan dengan kualitas dan terpeliharanya hasil – hasil pelaksanaan TMMD belum terpenuhi, sehingga implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Hal ini dapat diketahui dari sasaran fisik yang sudah ada mengalami kerusakan. dan kondisinya tidak terawat, sehingga manfaat yang dapat diambil bagi masyarakat tidak optimal.

3. **Derajat perubahan yang ingin dicapai (Extent of Change Envision).** Implementasi Perkasad-36/2012 berkaitan dengan perubahan yang ingin dicapai pada kesadaran untuk bela negara dan wawasan kebangsaan belum tercapai dengan baik. Tujuan non fisik belum sesuai dengan yang diinginkan, dengan waktu yang sangat terbatas tidak dapat mempengaruhi, merubah, dan memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. **Letak Pengambilan Keputusan (Site of Decision Making).** Implementasi Perkasad-36/2012 berkaitan dengan letak pengambilan keputusan telah terlaksana dengan baik. hal ini dapat terlihat dari ketepatan dalam penentuan sasaran TMMD, yang diarahkan kepada daerah – daerah yang tertinggal secara ekonomi, dan masyarakat belum sejahtera.
5. **Pelaksana program (Program Implementor):**
 - a. **Dukungan dari PJO TMMD.** Perkasad-36/2012 belum dapat diimplementasikan dengan optimal. TNI pada pelaksanaan TMMD dalam mewujudkan kemandirian TNI – Rakyat, terhambat oleh permasalahan personel Satgas yang tinggal bersama masyarakat, karena dengan dukungan uang makan yang kecil, dapat membebani masyarakat itu sendiri yang pada dasarnya masih banyak yang belum sejahtera.
 - b. **Dukungan dari Pemda.** Implementasi Perkasad-36/2012 belum dapat dilaksanakan oleh Pemda dengan optimal. Peranan Pemda dalam kegiatan TMMD masih sangat kurang optimal serta Pemda juga pada saat itu belum menyiapkan dukungan makan bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan TMMD, hal ini berdampak terhadap kurangnya minat

masyarakat untuk turut serta secara optimal dalam kegiatan TMMD, karena masyarakat yang kondisinya masih belum sejahtera, juga harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hariannya.

c. Dukungan dari Kementerian RI/LPNK.

Implementasi Perkasad-36/2012 belum terlaksanakan secara optimal. Dukungan sarana kontak yang diberikan oleh Kementerian RI/LPNK terlambat diterima oleh masyarakat, dan ada juga yang tidak sampai. Sehingga tujuan awal sarana kontak dari Kementerian RI/LPNK untuk memperbesar pencapaian hasil kegiatan TMMD, belum dapat tercapai secara optimal.

6. Sumber daya yang dikerahkan (Resources Committed).

Pelaksanaan implementasi Perkasad-36/2012 telah sesuai dengan yang diharapkan. Satgas TMMD, Pemda dan Masyarakat telah bersama - sama mengerahkan sumberdaya yang dimiliki baik untuk pengerjaan sasaran fisik maupun untuk mendukung pelaksanaan sasaran non fisik. Kemudian dengan anggaran dan waktu yang terbatas, TMMD masih dapat dilaksanakan dengan pencapaian sasaran 100 % dan bahkan ada beberapa sasaran yang over prestasi.

Implementasi Perkasad-36/2012 berkaitan dengan Lingkungan kebijakan, diperoleh data sebagai berikut:

1. Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat (Power, Interest, and Strategy of Actor Involved).

Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat, dalam hal ini mengenai pemahaman kepentingan program TMMD sesuai Perkasad-36/2012 telah dapat diimplementasikan dengan baik, karena masyarakat telah

diorganisir oleh Kades dengan dibagi menjadi kelompok – kelompok berkekuatan 50 orang setiap harinya untuk dilibatkan dalam kegiatan TMMD.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa (Institution and Regime Characteristic).

Implementasi Perkasad-36/2012 terkait dengan Karakteristik lembaga dan penguasa sudah sesuai dengan implementasi kebijakan yang diharapkan. Pejabat Pemda maupun Kodim memiliki peranan dalam pelaksanaan TMMD. Pemda memberikan personel sebagai tenaga teknis dan pendukung materi non fisik, sedangkan Kodim mendukung pelaksanaan TMMD dari pengerjaan sasaran fisik.

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Implementasi Perkasad-36/2012 terkait dengan Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran sudah sesuai dengan implementasi kebijakan yang diharapkan. Yaitu dengan keterlibatan masyarakat untuk mendukung kegiatan TMMD secara bergotong royong, dengan waktu pelaksanaan mengikuti jadwal yang sudah dibuat oleh Kades.

Pelaksanaan pembangunan masyarakat untuk percepatan pembangunan, diperoleh indikator sebagai berikut:

- 1. Transparansi (keterbukaan).** Dalam penentuan sasaran TMMD dilaksanakan melalui proses bottom up planning, yang artinya adalah masyarakat telah dilibatkan didalam proses pembangunan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan sasaran fisik yang memang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan sehari – hari.

2. **Partisipasi.** TMMD didukung oleh partisipasi masyarakat dengan melaksanakan kegiatan TMMD secara bergotong royong.
3. **Dapat dinikmati masyarakat.** TMMD yang dilaksanakan pada tahun 2017, telah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sampai dengan saat ini.
4. **Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas).** Kodim tidak menerima uang namun mendapatkan barang dari Pemda setelah proses lelang.
5. **Berkelanjutan (sustainable).** Anggaran dari akan berguna dalam peningkatan maupun perawatan hasil TMMD.

IV. KESIMPULAN

Kebijakan dari Perkasad-3/2012 terkait dengan pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa yang salah satunya telah dilaksanakan di wilayah Kodim 0615/Kuningan telah terimplementasi dengan baik. Hal ini dilihat dari peran masyarakat telah diorganisir untuk dilibatkan dalam pelaksanaan TMMD, sehingga kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat (Power, Interest, and Strategy of Actor Involved) telah sesuai dengan yang diharapkan. peranan dari Pemda dan Kodim sendiri yang telah melibatkan personel – personelnnya untuk mendukung pengerjaan sasaran fisik dan non fisik pada pelaksanaan TMMD, menjadikan karakteristik lembaga dan penguasa (Institution and Regime Characteristic) sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian dari kemauan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan TMMD secara bergotong royong, menyebabkan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran juga telah sesuai dengan yang diharapkan.

Pelaksanaan percepatan pembangunan masyarakat secara umum telah terlaksana dengan baik dan sesuai harapan, dengan

mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan aspek stabilitas daerah dilihat dari transparansi (keterbukaan) penentuan sasaran yang dilaksanakan secara bottom up dan top down planning, partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan TMMD secara bergotong royong, hasil pelaksanaan TMMD yang dapat dinikmati oleh masyarakat, pelaksanaan TMMD yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) dengan dukungan dari Pemda yang diterima dalam bentuk barang sehingga tidak ada kemungkinan penyalahgunaan oleh Satgas TMMD.

Penentuan lokasi sasaran TMMD harus benar – benar dapat dipantau ketepatannya oleh Bupati dan Dandim selaku stake holder di wilayah. Sehingga pelaksanaan TMMD dapat benar – benar dilaksanakan di wilayah yang kondisi masyarakatnya belum sejahtera, dan dapat menjadi titik nol bagi kelanjutan pembangunan di wilayah Kab. Kuningan. Sehingga ketepatan dalam penentuan sasaran lokasi TMMD tersebut akan berpengaruh terhadap kecepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berimbas terhadap kemajuan daerah lainnya.

Sumber:

Ishwahyudi, Suhirwan, dan David Hutagaol, 2019, Jurnal: *Implementasi Perkasad Nomor Perkasad/36-02/Xii/2012 Mengenai Program TMMD dalam Rangka Percepatan Pembangunan Guna Mendukung Pertahanan Wilayah (Studi Kasus Program Tmmd Ke-98 Di Kodim 0615/Kuningan Ta 2017)*, Jurnal Strategi dan Kampanye Militer, Vol 5 No 2, Universitas Pertahanan RI, Bogor.

Toruan, TSL, 2021, *Bunga Rampai Pertahanan Negara*, CV. Aksara Global Akademia, Indonesia.

BAB 8

Diplomasi Pertahanan dan Eksistensi Negara

*Budi Pramono

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini membahas upaya diplomasi pertahanan yang dilakukan TNI untuk memperkuat eksistensi negara. Multiploidisasi dunia menempatkan politik luar negeri menjadi tantangan baru distribusi kekuatan dunia, non-batas dan tidak terpusat pada dua blok klasik (Timur dan Barat). Kondisi ini menuntut TNI memiliki kapasitas adaptif terkait peran dan kemampuan dalam menjawab tantangan dalam tugas diplomasi pertahanan. Ada 3 kesimpulan terkait diplomasi pertahanan dalam memperkuat eksistensi negara. Pertama, multiploidisasi dunia menciptakan tantangan untuk memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memanfaatkannya sebagai peluang untuk membangun hubungan yang lebih konstruktif dalam mengembangkan kepentingan negara dari sektor ekonomi, sosial budaya dan pertahanan. Kedua, aktualisasi diplomasi pertahanan sebagai kebijakan nasional harus sejalan dengan kepentingan negara, terutama dalam upaya menjaga stabilitas domestik yang erat kaitannya dengan situasi kawasan. Ketiga, beberapa negara mitra strategis Indonesia perlu mendapat penanganan yang sistematis dan terprogram secara komprehensif sesuai dengan karakter diplomasi pertahanan, yaitu Confidence Building Measure (CBM), peningkatan kemampuan pertahanan dan pengembangan industri pertahanan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan relevansinya dengan menggali diplomasi

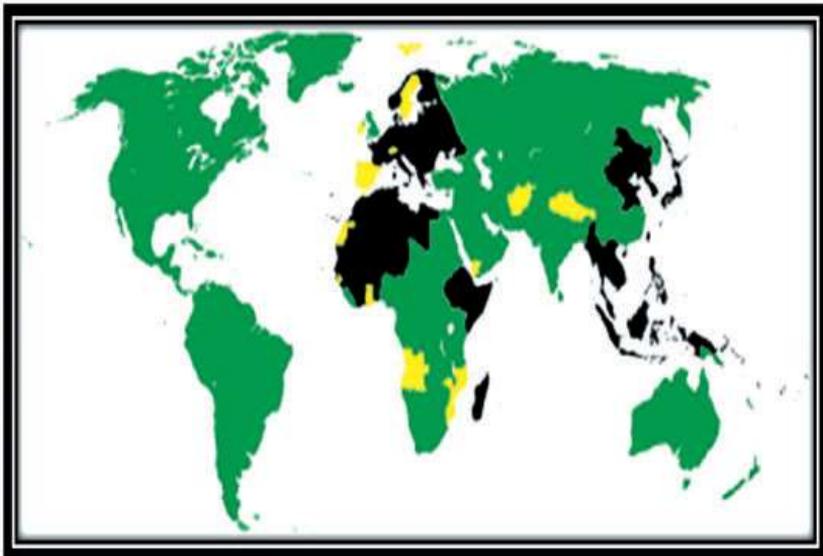
pertahanan sebagai ujung tombak untuk memperkuat eksistensi bangsa dan negara Indonesia.

II. TANTANGAN STRATEGIS DI INDONESIA

Kompleksitas permasalahan bangsa saat ini menimbulkan berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi ini menuntut TNI memiliki kapasitas adaptif untuk menghadapinya. Situasi ini cukup menekankan aspek peran dan kemampuan TNI dalam menjawab tantangan tugas diplomasi pertahanan. Kemampuan ini didasarkan pada aspek legal formal yang mengacu pada UU 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri bahwa setiap upaya diplomasi selalu ditujukan untuk kepentingan nasional dan memiliki fungsi strategis.

Sebagaimana kita ketahui, semua kepentingan nasional yang diakomodasi dalam setiap diplomasi internasional harus didasarkan pada politik konstitusional yang “bebas aktif” dan tidak mengikuti blok-blok tertentu. Gambar 1 menunjukkan kekuatan/blok dunia klasik yang terbentuk setelah Perang Dunia Kedua. Lingkungan strategis di dunia multipolarisasi telah membawa politik luar negeri yang “bebas aktif” menjadi tantangan baru dimana konstelasi internasional menunjukkan bahwa distribusi kekuatan dunia telah menyebar ke beberapa negara, non-batas dan tidak lagi berpusat pada dua blok klasik (Timur dan Barat).). Namun tantangan ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkannya dalam membangun hubungan yang lebih konstruktif guna menciptakan semacam simbiosis mutualisme dengan banyak negara dalam mengembangkan kepentingan negara dari bidang ekonomi, sosial budaya dan pertahanan. Realitas menunjukkan bahwa isu-isu yang diangkat dalam konstelasi internasional berkembang dari isu politik dan keamanan menjadi masalah strategis di bidang ekonomi, sosial, budaya, energi dan pembangunan lingkungan. Timbulnya

permasalahan tersebut tidak lepas dari kenyataan bahwa tanpa penanganan yang tepat akan berdampak pada kerawanan fundamentalisme, kemiskinan, ketimpangan sosial dan narkoba. Kondisi ini menjadi semacam bahaya laten yang mengancam keamanan kawasan dan stabilitas dunia. Hal tersebut harus diantisipasi sejak dini melalui pendekatan konstruktif dan diplomasi yang komprehensif.



Gambar 9.1. Kekuatan Klasik / Blok Dunia Pasca Perang Dunia II

Deskripsi:Hijau: Negara koalisi, Hitam: Kekuatan Poros, Kuning: Negara netral, Source: study.com

III. TEKNIK PEMECAHAN MASALAH

Kasus ini merupakan observasi terhadap diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia. Waktu pendalaman kasus dilaksanakan pada bulan Januari sampai Juni 2020. Jenis penelitian adalah deskriptif kasus untuk menggambarkan objek

kasus untuk menggambarkan objek yang diteliti. Metode yang digunakan penulis adalah kualitatif. Informan adalah individu yang memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan diplomasi pertahanan Indonesia. Metode pengumpulan data kasus ini terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi literatur adalah proses untuk mendapatkan data atau informasi dengan mempelajari buku-buku, jurnal, karya tulis lain, dan sumber internet. Studi lapangan adalah pengumpulan data atau informasi melalui kegiatan kasus langsung di lokasi kasus dengan menggunakan tiga instrumen kasus yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hal ini dilakukan dengan cara menelaah semua data yang ada dari berbagai sumber data, mempelajari data, menganalisis, menyusun dalam satu kesatuan, yang kemudian dikategorikan pada tahap selanjutnya dan memeriksa keabsahan data serta menganalisis untuk mendapatkan temuan kasus dari data tersebut.

IV. PEMBAHASAN

A. Skema Diplomasi Pertahanan

Tren dinamika ancaman politik dan keamanan yang disertai dengan stabilitas yang fluktuatif di bidang ekonomi, sosial dan budaya menjadikan pola diplomasi internasional memegang peranan penting bagi suatu negara. Bagi Indonesia, mengacu pada “Buku Putih Pertahanan 2008”, terdapat dua tingkatan “lapisan” kerja sama yang dapat diturunkan ke dalam format diplomasi pertahanan. Lapisan pertama adalah kerjasama militer dengan negara-negara anggota ASEAN, sedangkan lapisan kedua adalah kerjasama pertahanan dengan “kekuatan luar” seperti China, Australia, Amerika Serikat dan Korea Selatan. Dilihat dari perkembangan pola kerjasama di atas, pada prinsipnya segala sesuatu dapat digolongkan ke dalam dua tingkatan lembaga

hubungan internasional atau yang dikenal dengan “Track”. Track adalah bentuk kerjasama internasional perdagangan, dan keamanan cyber dan sebagainya. Pencegahan kejahatan maritim transnasional menggunakan pola seperti latihan bersama dan patroli sebagai kelanjutan dari Track-1, sedangkan forum akademik, diskusi ilmiah, lokakarya adalah contoh dari aplikasi Track-2. Kedua jalur tersebut pada dasarnya bergerak dalam suatu sistem yang saling memberikan masukan sehingga kesepakatan yang dirumuskan dapat diterima oleh semua negara.

B. Character of Defense Diplomacy and its Implementation

Proyeksi konstelasi politik internasional multipolar mendorong diplomasi pertahanan Indonesia untuk bergerak menciptakan kemitraan strategis di bidang pertahanan dengan beberapa negara maju. Negara-negara seperti AS, Prancis, Rusia dan China saat ini dinilai memiliki tingkat modernisasi militer yang cukup progresif di dunia. Pembangunan kemitraan strategis Indonesia, khususnya di bidang pertahanan, harus dapat mengejar ketertinggalan dan benchmark dengan negara-negara demi penguatan, modernisasi dan profesionalisme dalam membangun struktur militer yang ada.

Posisi diplomasi pertahanan suatu negara juga akan menjadi penentu pada saat ini. Hal ini diperlukan untuk memberikan arahan bagi pengembangan kekuatan pertahanannya untuk mengamankan kepentingan nasional di lingkungan strategis yang sangat dinamis. Sesuai dengan kebijakan pertahanan negara, modernisasi kekuatan pertahanan tidak hanya mengandalkan sumber daya nasional dalam negeri, tetapi juga didukung oleh kerja sama dengan negara sahabat. Mertz (2015) menggambarkan diplomasi pertahanan sebagai seni “memainkan” ketegangan antara bashing dan bargaining. Hal ini dapat berarti kemitraan strategis dengan sejumlah negara dalam rangka menciptakan peluang dan khususnya bagi Indonesia untuk memperkuat

konstruksi diplomasi pertahanannya guna mencapai manfaat yang optimal di bidang pertahanan. Di dalamnya terkandung nilai kemitraan. Esensi ini harus seefektif mungkin untuk menghindari kesan kontraproduktif dari ketergantungan negatif dan ketergantungan yang tidak perlu pada negara asing. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia perlu memperhatikan karakter diplomasi pertahanan dalam upaya membangun mekanisme diplomasi pertahanan yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa. Oleh karena itu, diplomasi pertahanan harus memiliki karakter di bawah ini:

a. **Diplomasi pertahanan harus ditingkatkan dalam Confidence Building Measure (CBM).**

Diplomasi pertahanan harus menciptakan lingkungan strategis yang kondusif bagi Indonesia. Untuk itu, sudah saatnya diplomasi pertahanan dipersiapkan sebagai kajian kebijakan dalam proyeksi pertahanan negara. Confidence Building Measure memiliki hubungan yang erat dengan kondisi pertahanan negara karena karakter ini menentukan sifat kerjasama yang dikembangkan dengan negara lain. Fokusnya adalah serangkaian upaya membangun hubungan baik dengan negara lain dalam rangka berbagi persepsi, menciptakan iklim yang kondusif secara bilateral dan transparan. Langkah-langkah tersebut akan mengurangi ketegangan saling curiga, saling mengancam sehingga pengembangan kemampuan militer suatu negara tidak disalahartikan sebagai ancaman bagi negara lain. Ruang lingkup diplomasi pertahanan untuk CBM meliputi komunikasi, kendala, transparansi dan verifikasi. Jika tujuan CBM tercapai, secara global akan tercipta keamanan dan stabilitas di tingkat nasional, regional, dan regional untuk mendukung program pembangunan kesejahteraan domestik dan regional. Upaya konkrit CBM saat ini dapat dilihat dalam berbagai kegiatan diplomatik seperti forum komunikasi di

tingkat bilateral dan multilateral, kunjungan negara, pertukaran informasi, perjanjian kerjasama, dan pertukaran pendidikan hingga pelatihan dan patroli keamanan bersama.

B. Diplomasi pertahanan harus meningkatkan Kemampuan Pertahanan.

Munculnya unsur kekuatan militer dalam pola diplomasi internasional merupakan variabel penting yang mempengaruhi aspek bargaining. Schelling (1980) menyatakan bahwa dalam perspektif realis, diplomasi dimaknai sebagai bargaining chip, dan kemudian kehadiran kekuatan militer menjadi elemen intervensi tersendiri bagi konsep ini. Oleh karena itu, kepentingan nasional suatu negara di era modern sekarang ini semakin menuntut adanya kemampuan pertahanannya. Situasi ini menempatkan diplomasi pertahanan sebagai alat transformasi untuk meningkatkan kemampuan pertahanan suatu negara yang tentunya tetap memperhatikan unsur keterbatasan sumber daya, ancaman, tantangan, kemampuan dan peluang yang rentan. Misalnya, keterbatasan sumber daya dalam upaya peningkatan kemampuan pertahanan dapat menjadi titik awal untuk memanfaatkan diplomasi pertahanan melalui pendekatan ekonomi dan perdagangan senjata. Mekanisme Kredit Ekspor (KE) dalam pembelian Alutsista dapat dikategorikan sebagai diplomasi pertahanan yang bersifat kemampuan pertahanan.

C. Diplomasi pertahanan harus meningkatkan Pengembangan Kemampuan Industri Pertahanan.

Kebijakan pertahanan melalui pengembangan kekuatan untuk mencapai Minimum Essential Force (MEF) diimplementasikan dalam bentuk modernisasi peralatan

militer. Prioritas produksi dalam negeri menjadi program utama untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, format pengadaan kebutuhan alutsista dari luar negeri diperbolehkan jika tidak terpenuhi secara maksimal di dalam negeri. Oleh karena itu, karakter diplomasi pertahanan secara khusus menekankan peran diplomasi dalam mengembangkan kemampuan industri pertahanan. Secara teknis, mekanisme kerja sama ini dapat diatur lebih rinci pada beberapa sistem, antara lain struktur counter trade, alih teknologi dan lain-lain untuk menghasilkan alutsista berteknologi tinggi yang dibutuhkan TNI. Diplomasi pertahanan dalam mengembangkan kemampuan industri pertahanan harus digunakan untuk “menahan” kontribusi negara lain. Ada tuntutan bagi Indonesia untuk terus proaktif meningkatkan kerja sama industri pertahanan dengan mitra strategis; diplomasi pertahanan yang efektif menjadi pijakan utama. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membangun saling menguntungkan antara lain melalui mekanisme produksi bersama, pengembangan bersama, pelatihan dan kasus dan pengembangan dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pengaturan strategis pengembangan industri pertahanan dengan platform diplomasi pertahanan memiliki peluang yang lebih luas untuk meningkatkan kapabilitas dari segi kualitas sumber daya manusia, teknologi, produksi dan pemasaran. Hasil dari ini adalah penciptaan lapangan kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat kemampuan industri pertahanan dalam negeri dan menciptakan sinergi dengan industri pertahanan di luar negeri. Ketiga

karakter diplomasi pertahanan di atas pada akhirnya akan berguna untuk memperkuat eksistensi negara dengan pendekatan kapabilitas militer. Bagi Indonesia, tentunya profesionalisme TNI merupakan komponen kunci untuk menciptakan kemampuan kekuatan pertahanan untuk mengamankan kepentingan nasional.

Oleh karena itu, diplomasi pertahanan dapat menjadi gerbang utama bagi militer sebagai salah satu variabel untuk menunjukkan eksistensi negara untuk melanjutkan pengembangan kemampuan. Kerjasama untuk meningkatkan profesionalisme prajurit dengan negara lain telah terjalin, dalam bentuk pelatihan bersama, pendidikan dan pelatihan, pertukaran kunjungan dan lain-lain. Diplomasi ini membuka peluang bagi TNI untuk meningkatkan profesionalisme prajuritnya. Kemitraan strategis melalui diplomasi pertahanan merupakan peluang besar bagi suatu negara dengan meningkatkan profesionalisme militernya. Beberapa negara, seperti AS, Australia, Jepang, Korea dan China, merupakan mitra strategis di Indonesia dan memiliki sejarah panjang pengalaman militer, yang telah mempengaruhi doktrin dan strategi pertahanan saat ini. Meskipun doktrin dan strategi pertahanan yang diterapkan oleh negara mitra strategis Indonesia tidak sama dengan doktrin dan strategi pertahanan Indonesia, namun dapat memperkaya wawasan TNI untuk meningkatkan profesionalismenya.

V. KESIMPULAN

- ✓ Multipolarisasi dunia membawa politik luar negeri ke tantangan baru, yaitu distribusi kekuatan dunia, non-batas yang tidak lagi berpusat pada dua blok klasik (Timur dan Barat). Hal ini menjadi tantangan yang memberikan peluang bagi Indonesia untuk membangun hubungan yang lebih konstruktif dalam mengembangkan kepentingan negara dari bidang ekonomi, sosial budaya dan pertahanan.
- ✓ Aktualisasi diplomasi pertahanan sebagai kebijakan nasional harus sejalan dengan kepentingan negara, terutama dalam upaya menjaga stabilitas domestik yang erat kaitannya dengan situasi kawasan. Hal ini merupakan kemampuan diplomasi Indonesia sebagai entitas negara yang dapat berkomunikasi secara efektif untuk menjalin hubungan antar negara.
- ✓ Ketiga, beberapa negara mitra strategis Indonesia perlu mendapatkan penanganan yang sistematis dan terprogram secara komprehensif sesuai dengan karakter diplomasi pertahanan, yaitu Confidence Building Measure (CBM), peningkatan kemampuan pertahanan dan pengembangan industri pertahanan.
- ✓ Untuk ketiga karakteristik tersebut, pemerintah perlu mengembangkan relevansinya dengan menggali diplomasi pertahanan sebagai ujung tombak untuk memperkuat eksistensi bangsa dan negara Indonesia.

Sumber:

Pramono, Budi, 2021, *Politics and National Defense*, CV. Aksara Global Akademia, Indonesia.

Bab 9

Dampak Industri 4.0 di Indonesia

*Sovian Aritonang

I. PENDAHULUAN

Sebagai sumber konsep Industri 4.0, negara-negara Eropa Barat dengan dimotori Jerman, sudah mulai menyusun langkah-langkah untuk mewujudkan konsep Industri 4.0. Sakarang ini telah ada 200 lebih perusahaan yang akan ikut serta mendukung program ini. Karena merupakan program unggulan Eropa untuk meningkatkan daya saing produknya, maka platform Industri 4.0 ini diikuti oleh industri inti Eropa.

Beberapa industri yang menjadi sasaran implementasi Industri 4.0 ini merupakan industri manufaktur dan teknik, industri otomotif, industri proses, industri elektronika, dan sistem elektrik serta industri informasi dan komunikasi. Dengan nilai investasi sebesar ini, platform Industri 4.0 diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi di sepanjang rantai nilai industri terkait (Koch, 2017).

Beberapa perusahaan mempunyai ide pengembangan inovatif untuk pembagian aktivitas dari unit bisnis mereka untuk Industri 4.0. Diharapkan banyak perusahaan yang lain mengikutinya. Dibawah ini contoh beberapa perusahaan dari berbagai negara yang memperlihatkan bahwa mereka telah menerapkan unit produksinya sebagai smart factory . Perusahaan-perusahaan tersebut yaitu, Trump, Siemen, Rolls-Royce, dan Dassault Systems.

II. POSISI PEREKONOMIAN INDONESIA DI DUNIA

Konsep Industri 4.0 memang sedang berkembang di Eropa Barat dan juga negara industri maju lainnya. Lalu bagaimana dengan Indonesia?. Untuk Indonesia adanya Industri 4.0 ini harus disingkapi dengan hati-hati, mengingat Indonesia sudah bukan lagi negara yang terbelakang dalam hal manufaktur. Dalam laporan hasil penelitian Mckinsey Global Institute (MGI) mencatat bahwa pada tahun 2010 Indonesia berada di peringkat 13 dari 15 negara yang ekonominya ditopang oleh sektor manufaktur. Naik dari peringkat ke-20 di tahun 2000 (Mayinka, 2012).

Dengan semakin meningkatnya sumbangan sektor manufaktur terhadap perekonomian Indonesia, maka sekecil apapun kemajuan teknologi dibidang manufaktur, dampaknya akan terasa besar bagi ekonomi kita. Dalam laporannya yang lain MGI juga memprediksi bahwa kekuatan ekonomi Indonesia akan berada di peringkat ke- 7 dunia pada tahun 2030. Prediksi ini juga disertai catatan bahwa hal ini dapat tercapai jika Indonesia mampu meningkatkan tingkat produktivitasnya. Perlu diketahui, kekuatan ekonomi Indonesia saat ini berada di peringkat ke-16. Namun peningkatan kekuatan ekonomi ini lebih ditopang oleh meningkatnya nilai konsumsi masyarakatnya. Ada tambahan konsumen potensial hingga 90 juta orang hingga tahun 2030 (Oberman et al., 2012). Hal ini sebaiknya jangan dipandang sebagai sebuah beban demografis, namun harus dilihat sebagai potensi pasar konsumsi yang sangat besar yang tentunya harus dapat dijadikan sebagai penggerak roda perekonomian nasional untuk lebih maju lagi. Pasar potensial ini harus mampu digarap oleh industri dalam negeri kita, bila tidak ingin potensi ini dimanfaatkan oleh negara maju. Data selama 20 tahun terakhir menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas tenaga kerja menyumbang lebih dari 60% perkembangan ekonomi nasional, dengan 3 sektor utamanya: sektor perdagangan (grosir dan

eceran), sektor peralatan transportasi dan manufaktur serta transportasi dan telekomunikasi. Berdasarkan pengalaman selama 20 tahun ini, kecil kemungkinannya akan terjadi pergeseran secara dratis pada sektor-sektor penggerak ekonomi ini. Ini adalah hal bagus dan diharapkan perekonomian Indonesia terus bangkit dan berkembang.

Tabel 10.1 Parameter Peningkatan Ekonomi Indonesia (MGI, 2016)

Parameter	2016	2030
Peringkat Ekonomi Dunia	16	7
Potensi Konsumen	45 juta	135 juta
Demografi GDP	53% pddk kota menghasilkan 74% GDP	71% pddk kota menghasilkan 86% GDP
Kebutuhan Tenaga Kerja Terampil	55 juta	113 juta
Nilai Pasar	\$0,5 Triliun	\$1,8 Triliun
Sektor	Jasa, Pertanian, Perikanan, Sumber Daya Alam dan Pendidikan	

Dengan adanya Industri 4.0, diperkirakan kebutuhan akan tenaga kerja terampil juga akan meningkat. Namun khusus kasus Indonesia, mungkin akan perlu sedikit penyesuaian. Skema Industri 4.0 yang berlaku di negara-negara Eropa harus diadaptasikan dengan lingkungan Indonesia. Teknologi digital yang menjadi landasan Industri 4.0 harus juga diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian, perikanan, jasa, sumber daya alam, dan pendidikan.

Sebagai basis industri elektronika dan otomotif dunia, Indonesia mau tidak mau pasti akan terimbas akan teknologi yang ada di konsep Industri 4.0 ini, mengingat Jepang, sebagai investor industri terbesar di Indonesia, juga mulai memikirkan implementasi Industri 4.0 di perusahaan-perusahaannya (Matsutani, 2016) , bahkan sekarang ini di negaranya perusahaan yang bergerak di industri elektronik, industri otomotif telah mulai mengembangkan konsep Society 5.0, yang merupakan penyempurnaan dari Industri 4.0, yang disesuaikan dengan budaya dan etos kerja di negaranya.

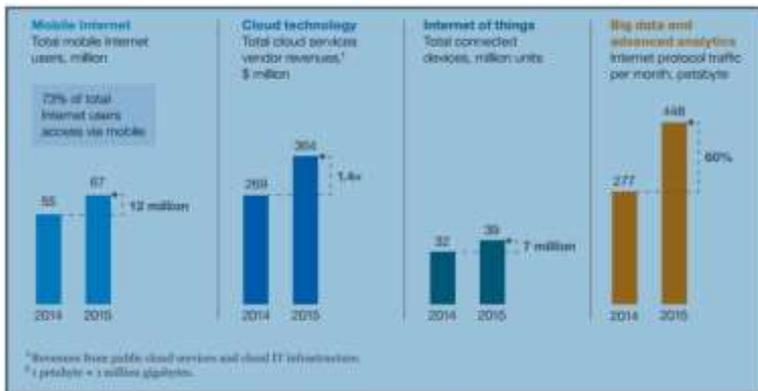
Di Indonesia, industri yang akan terimbas dampak Industri 4.0 bukan hanya industri manufaktur elektronika dan otomotif saja, namun juga industri kesehatan dan bioteknologi. Dengan dampaknya yang sangat luas bagi kualitas kesehatan seluruh rakyat Indonesia, Implementasi Industri 4.0 di industri kesehatan dan bioteknologi tidak dapat dianggap ringan. Bioteknologi merupakan dasar dalam semua proses bioterapi farmasi. Pengguna teknologi robotik akan banyak diterapkan untuk memanipulasi berbagai bahan biologis yang dapat dipakai sebagai terapi untuk berbagai kondisi dan jenis penyakit, terutama yang bersifat mematikan, Sebagai contoh untuk merawat pasien pandemik COVID-19 teknologi robot dapat dipakai sebagai pengganti perawat. Beberapa teknologi yang akan berkembang dan digunakan untuk penemuan-penemuan baru adalah metode rekayasa DNA, metode komputasi dalam pencarian obat baru, serta proses penemuan target obat lewat mikrobiota organ manusia. Semua ini akan memberikan peluang dikembangkannya obat-obatan baru yang dapat mengurangi angka kematian dan sekaligus meningkatkan kualitas hidup manusia.

III. TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA

Sementara itu, kemajuan teknologi digital di Indonesia juga sudah sedemikian majunya. Walau tingkat penetrasi internet masih 34% (masih dibawah Filipina, Malaysia, Singapura, China, dan Thailand), namun teknologi ini menghubungkan para pengguna yang sangat aktif terhubung di internet. Jumlah waktu yang digunakan pengguna internet di Indonesia jauh melebihi waktu yang digunakan oleh penduduk Amerika Serikat (AS) Penggunaan waktu untuk aktifitas di sisial media juga lebih tinggi, serta jumlah pengguna yang menggunakan internet untuk melakukan belanja produk juga sudah melebihi AS (Dhas et la., 2016).

Revolusi teknologi digital sendiri didorong oleh 4 teknologi inti yang saat ini juga sedang sangat berkembang, yaitu: mobile internet, teknologi cloud, Internet of Things serta teknologi big data and advanced analytics. Keempat teknologi ini merupakan kungsi utama untuk mempercepat implementasi digital di Indonesia. Indonesia sudah memiliki pengalaman dalam mengadopsi teknologi ini dan mapu meletakkan pondasi yang kokoh dalam melakukan investasi di masa mendatang.

Berdasarkan hal inilah, dapat dipastikan bahwa Indonesia sudah memasuki era revolusi digital. Landasan paling dasar dari implementasi kerangka kerja Industri 4.0 sudah siap, tinggal bagaimana dunia industri di Indonesia memanfaatkan peluang ini. Jika memang benar bahwa industri manufaktur di Indonesia juga akan mengadopsi konsep Industri 4.0, maka tentunya akan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah, mengingat Industri 4.0 ini akan berdampak sistemik di berbagai sektor. Berbagai kebijakan harus dirumuskan agar tercapai keseimbangan antara kenajuan teknologi dengan supply-demand produk dan tenaga kerja.



Gambar 10.2 Kondisi Penggunaan Teknologi Digital di Indonesia (Kagermann, 2013)

Walaupun konsep Industri 4.0 masih sangat awal, namun konsep ini tidaklah prematur. Laju perkembangan teknologi yang mendorongnya, membuat para pengagasnya tidak bisa bersantai-santai. Banyak kebijakan nasional yang belum ditentukan. Namun, beberapa kebijakan dasar dapat diambil sebagai langkah awal menyiapkan diri terhadap kedatangan Industri 4.0 ini. Berdasarkan telaah pada beberapa kebijakan dasar dari pemerintah AS dan Uni Eropa, dapat disarikan beberapa (Smit et al., 2016) hal sebagai berikut:

1. Berikan ruang dan invetasi bagi konsep Industri 4.0 untuk berkembang. Pemerintah harus percaya bahwa perkembangan teknologi ini akan memberikan dampak yang besar dan positif pada pertumbuhan produktivitas nasional. Dukungan pemerintah pada lembaga penelitian dan juga perguruan tinggi akan sangat membatu dalam proses perkembangan Industri 4.0 yang selaras dengan kondisi Indonesia.
2. Berikan pendidikan dan latihan bagi para pekerja dan calon pekerja, pekerjaan masa depan. Industri 4.0 akan

mengubah hampir semua pola kerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Semua pekerja (calon pekerja) perlu diberikan pelatihan yang sesuai sehingga mereka mampu menyelaraskan diri dengan kemajuan teknologi. Sikap untuk terus mau belajar harus ditanamkan dari dini sehingga mereka tidak merasa stagnant pada pekerjaan atau keahliannya.

3. Pada masa transisi perubahan teknologi, pemerintah harus menyiapkan bantuan bagi pekerja yang terkena imbas perkembangan teknologi ini. Para pembuat kebijakan harus memastikan bahwa para pekerja dan pencari kerja, keduanya mampu mengejar kesempatan kerja yang terbaik dan posisi terbaik bagi mereka sesuai dengan kemampuannya. Juga harus dipastikan bahwa mereka menerima upah menyesuaikan kerja yang sesuai untuk pekerjaan mereka dalam bentuk kenaikan upah. Termasuk pada langkah-langkah ini adalah usaha untuk memodernisasi sistem sosial tenaga kerja dan jaminan sosial lainnya.
4. Meningkatkan kesadaran tentang tantangan dan peluang pada sektor-sektor yang terlibat dalam konsep Industri 4.0 dan Industri Internet. Membantu mengidentifikasi dan mengembangkan pasar utama untuk produk dan jasa yang terkait dengan industri 4.0.

Tentu langkah-langkah kebijakan diatas tidak bisa dicontoh, **copy and paste** begitu saja. Perlu ada penyesuaian terhadap kondisi demografis, sosial, dan ekonomi Indonesia. Namun paling tidak, sudah ada titik awal untuk mulai melakukan kajian.

IV. DAMPAK INDUSTRI 4.0 PADA BIDANG PENDIDIKAN

Industri 4.0 akan merovolusi banyak hal, tidak terkecuali bidang pendidikan. Konektivitas global (teknologi internet), tersediannya mesin-mesin cerdas dan media baru, hanyalah beberapa penggerak untuk membentuk kembali cara pandang kita tentang definisi pekerjaan: apa itu pekerjaan, bagaimana kita belajar dan bagaimana kita mengembangkan keterampilan untuk bekerja di masa depan.



Gambar 10.3 Sistem Pembelajaran Menggunakan Holodome (Fisk, 2017)

Kecepatan perubahan inovasi yang terus-menerus menuntut keterampilan dan pengetahuan baru untuk dapat menimbangnya. Kebutuhan untuk selalu belajar menjadi lebih penting dibanding dengan pekerjaan itu sendiri (Fisk, 2017). Dimasa mendatang, manusia akan terbiasa untuk memiliki lebih dari satu karir. Bukan karena harus mencukupi kehidupannya. Namun lebih untuk mengeksplorasi kemampuan dirinya. Hap ini dapat

dipenuhi ketika sistem pembelajaran juga mampu menyediakan sistem belajar yang efektif, efisien dan tentu saja menarik. Keterampilan kerja juga dapat dilatih menggunakan teknologi augmented reality, selain bahwa akan ada banyak sekali real-time virtual laboratory yang akan dibuka oleh berbagai lembaga pendidikan khusus. Semua akan memudahkan manusia untuk belajar dan berlatih. Fisk (2017) mengusulkan sebuah platform pendidikan baru untuk menyeleraskan dengan platform teknologi di Industri 4.0. Platform ini disebut sebagai education 4.0.

Berdasarkan kebutuhan yang diperlukan untuk mempersiapkan tenaga-tenaga terdidik dan terampil yang selaras dengan kemajuan dalam framework Industri4.0. disimpulkan beberapa sifat dari konsep pendidikan **Education 4.0** yaitu:

- » **Anywhere-anytime** : dapat diakses dilokasi mana
- » saja dan kapan saja waktunya. Hal ini dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi Internet, cloud dan augmented reality.
- » **Personal**: bersifat pribadi, sesuai dengan kebutuhan pengguna/siswa/mahasiswa.
- » **Flexible delivery** : peyampaiannya bersifat flexible, namun tetapsesuai standar yang ditentukan.
- » **Peers and mentors** : walaupun penyampaian bahan ajar sebagian besar dapat dilakukan secara virtual, namun tetap saja fungsi teman sejawat dan mentor diperlukan. Pertemuan memang tidak perlu disebuah tempat nyata (kelas), namun komunikasi haruslah bersifat real-time, manusia ke manusia.
- » **Why/Where not What/How** : karena tersedianya informasi yang sangat terbuka maka konsep sharing ilmu tidaklah lagi berbentuk pernyataan “**Apa**” dan “**Bagaimana**”. Hal ini tentu sangat tidak menarik, karena

hampir semua hal yang ditanyakan tersebut sudah tersedia di internet. Oleh karena itu pertanyaan pada suatu topik lebih baik berupa pertanyaan Mengapa dan Dimana : dimana harus mencari, dimana hal tersebut diperlukan dan lain sebagainya.

- » **Practical application** : aplikasi praktis dari teori yang dipelajari selalu menarik minat lebih terhadap siswa/mahasiswa. Generasi masa datang (generasi milenial) akan memiliki pandangan yang lebih pragmatis terhadap sebuah pelajaran. Saat inipun sudah mulai terasa bahwa mengajarkan teori saja tidak cukup tanpa adanya praktek aplikasi yang nyata.
- » **Modular and project** : hal ini merupakan konsekuensi dari syarat bahwa pelajaran yang disampaikan harus memiliki kegunaan praktis di dunia nyata. Modul dan aplikasi/eksperimen/produk, merupakan langkah untuk mengevaluasi keberhasilan pembelajaran.
- » **Student ownership** : hal ini berarti keterlibatan siswa/mahasiswa secara aktif terhadap pembentukan kurikulum yang mereka pilih. Dengan melakukan hal ini, maka kurikulum akan selalu kontemporer, up to date dan berguna (disesuaikan kebutuhan kerja). Masukan kritis dari siswa/mahasiswa tentang isi dan kesesuaian program yang mereka pilih merupakan keharusan bagi seluruh program studi.
- » **Evaluated not Examined** : keberhasilan seorang siswa/mahasiswa tidak lagi diukur dari hasil ujian, namun diukur dari akumulasi hasil evaluasi terus menerus, sejak dari awal program. Saat ini, hal tersebut masih menjadi utopia bagi sebagian besar penyelenggara pendidikan. Namun dengan teknologi yang semakin berkembang dan makin dapat diperoleh, sistem penilaian seperti ini akan dapat terwujud.

Berdasarkan karakteristik pendidikan seperti diatas, maka langkah terpenting yang harus mampu dilakukan sebuah lembaga pendidikan adalah mampu mengantisipasi perubahan karakteristik belajar generasi milenium yang unik ini dan bukan hanya kokoh mempertahankan tradisi saja. Selaras dengan perkembangan Industri 4.0, pendidikan harus mampu memberikan lingkungan dimana manusia dan teknologi berjalan selaras. Mampu menyelaraskan diri dalam memanfaatkan potensi teknologi digital, data yang dipersonalisasi, konten dari berbagai sumber terbuka dan nilai-nilai kemanusiaan baru yang terhubung secara global. Sebuah cetak biru bagi masa depan pembelajaran harus ditetapkan dari saat ini dimana pembelajaran seumur hidup menjadi inti dari semuanya. Semua dimulai dari pendidikan dasar, kemudian lanjut untuk terus belajar ditempat kerja serta berperan lebih baik bagi lingkungannya. Oleh sebab itu untuk institusi pendidikan harus menyiasati untuk menghadapi era Industri 4.0 dengan merancang ulang sistem dan arah pendidikannya. Sehingga luaran yang dihasilkan berupa alumni lulusan sudah siap menghadapi tantangan teknologi era Industri 4.0 yang dihadapi.

Alumni Lulusan harus paham tentang posisinya didalam era revolusi industri ke-4 ini serta mampu memanfaatkannya seoptimal mungkin untuk mengembangkan karir dan pribadinya. Untuk alumni lulusan tidak boleh gagap menghadapi perkembangan teknolohi yang semakin cepat, bahkan harus mampu untuk terus belajar agar mampu memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut agar dapat memainkan peran yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Sumber:

Aritonang, Sovian dan Riyadi Juhana, 2021, *Konsep Industri 4.0, Analisis Teknologi dan Penerapan di Industri dan Operasi Militer*, Unhan Press, Bogor.

Bab 10

Resolusi Konflik Keagamaan di Indonesia

*Yusuf

I. PENDAHULUAN

Dalam perjalanan panjang kehidupan umat manusia terjadi proses interaksi, baik yang berlangsung antar individu, antar komunitas, antar suku, antar golongan maupun antar bangsa dan senantiasa diwarnai oleh adanya berbagai perbedaan kepentingan. Interaksi kepentingan sangat beragam, baik secara ekonomi, politik ataupun sosial budaya, yang pada gilirannya akan mendorong timbulnya berbagai macam konflik atau pertentangan. Tahap selanjutnya dalam konflik biasanya adalah ditandai dengan munculnya kekerasan. Kompetisi dan konflik kepentingan di antara berbagai unit *local-regional* dengan tepat dan halus telah dimanfaatkan untuk kepentingan negara-negara kolonial pada waktu itu. Pada awal maupun sesudah proklamasi kemerdekaan hingga pasca reformasi, konflik kekerasan, agama, ras dan kelompok masih menjadi salah satu fenomena yang menandai *state formation* di Indonesia.

Pada umumnya konflik di tingkat interpersonal relatif mudah untuk ditangani, sebab konflik tersebut hanya melibatkan antara satu orang dengan orang lainnya. Akan tetapi, konflik yang telah melibatkan suatu kelompok pada umumnya relatif sulit untuk ditangani dan memerlukan mekanisme khusus dalam upaya resolusinya. Hal ini akan menyebabkan terganggunya stabilitas nasional atau pertahanan negara.

II. KONSEP DASAR RESOLUSI KONFLIK

Menurut Mindes (2006:24) resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Sedangkan resolusi menurut Coser dalam (Ritzer dan Goodman, 2006) mengemukakan bahwa mekanisme resolusi adalah katup penyelamat atau *safety valve*. Katup penyelamat memungkinkan luapan konflik tersalur tanpa menghancurkan seluruh struktur, di mana konflik membantu membersihkan suasana dalam kelompok yang sedang kacau. Selain katup penyelamat, mekanisme lain yang dikemukakan oleh Coser adalah pengkambinghitaman atau *scapegoating*. Pengkambinghitaman sendiri oleh Coser digunakan untuk menggambarkan keadaan dimana seseorang atau suatu kelompok tidak melepaskan prasangka (*prejudice*) mereka terhadap kelompok yang benar-benar merupakan lawan, akan tetapi menggunakan kelompok pengganti sebagai objek prasangka. Misalkan kita ambil contoh dalam kasus jemaah Ahmadiyah di Jawa Barat tidak boleh ada pihak yang dikorbankan atau di kambinghitamkan karena menurut Paloma (2003) konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial. Dengan kondisi seperti itu dapat diambil suatu resolusi yang dapat melibatkan semua pihak yang berkonflik, baik secara langsung maupun secara tidak langsung sebagaimana dikemukakan oleh Susan (2009) bahwa metode resolusi konflik dapat dilaksanakan melalui konsep tata kelola konflik (*conflict governance*). Konsep tersebut melibatkan penggunaan seluruh sumber daya yang ada, disertai strategi yang

tepat, sehingga tujuan dari resolusi tersebut dapat dicapai dengan baik. Sementara itu, Wirawan (2010) juga memaparkan bahwa resolusi konflik dapat dicapai dengan 2 (dua) cara, yakni pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang berkonflik (*self regulation*), dan melalui intervensi pihak ketiga (*third*).

Berdasarkan penjelasan yang telah diungkapkan oleh beberapa pakar, maka dapat dijabarkan bahwa dalam menganalisis konflik keagamaan di Indonesia, sedikitnya terdapat beberapa indikator penting. Indikator-indikator tersebut antara lain sebagai berikut: 1). Interaksi (*interaction*), yakni hubungan-hubungan sosial yang terjadi antara individu ataupun kelompok yang dapat menyebabkan konflik. 2). Sumber-sumber konflik (*source*), yang meliputi; perbedaan fisik, perbedaan kepentingan, perbedaan perlakuan, perbedaan identitas, kekecewaan, keterbatasan sumber daya, bahasa, terputusnya komunikasi, perbedaan persepsi, dan stereotip. 3). Pihak-pihak yang berkonflik (*stakeholder*), yakni pihak-pihak yang berkonflik atau memiliki kepentingan atas terjadinya konflik, meliputi; individu, kelompok, dan pihak ketiga (*mediator, free rider*, dan lain sebagainya).

III. METODE RESOLUSI KONFLIK

Pendekatan konflik yang paling memungkinkan untuk mengatasi konflik keagamaan di Indonesia adalah dilakukan melalui pendekatan sosiologi humanity, dan dibawah ini di jelaskan beberapa pendekatan konsep metode secara teknis untuk mengubah anggota kelompok yang berselisih menjadi sebuah perdamaian dan penyelesaian yang akur, di antaranya adalah sebagai berikut:

» Commitment (Negotiation)

Konflik dapat muncul ketika anggota di dalam kelompok merasa yakin dengan posisinya dan tidak ada keinginan untuk mengalah satu sama lain, namun konflik dapat diredakan ketika anggota kelompok memutuskan untuk bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat menguntungkan seluruh pihak. Negosiasi adalah proses komunikasi timbal balik yang dilakukan oleh dua anggota atau lebih untuk mencari tahu masalah-masalah secara lebih spesifik, menjelaskan posisi mereka dan saling bertukar gagasan. Negosiasi terkadang lebih dari sekedar tawar-menawar atau saling berkompromi. Seperti negosiasi distributif, kedua belah pihak menyembunyikan orientasi kompetitif mereka dan secara bergantian sampai salah satu pihak mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari pihak yang lainnya. Di lain pihak, seperti yang ditulis oleh Roger Fisher and William Ury (2001), negosiasi integratif bertujuan untuk bekerjasama dengan anggota kelompok untuk meningkatkan kinerja kooperatif dan hasil yang integratif yang menguntungkan kedua belah pihak. Fisher dan Ury juga menyarankan anggota kelompok untuk membuat sesi penyelesaian masalah dan bekerja sama untuk menemukan solusi.

» **Misperception (Understanding)**

Konflik seringkali terjadi karena kesalahpahaman. Orang-orang sering menganggap bahwa orang lain ingin berkompetisi dengan mereka namun pada kenyataannya orang lain tersebut hanya ingin bekerjasama dengan mereka. Mereka mengira ketika orang lain mengkritik ide-ide mereka, orang lain tersebut sedang mengkritik mereka secara personal. Mereka percaya bahwa motif orang lain tersebut adalah untuk menguntungkan pihak mereka. Anggota kelompok harus menghilangkan pola pikir seperti itu dengan cara berkomunikasi secara aktif terkait motif dan tujuan mereka di dalam diskusi. Komunikasi tidak cukup untuk menyelesaikan konflik, tetapi mereka juga membuat kesalahpahaman serta tipu muslihat. Komunikasi dapat membuka peluang anggota kelompok untuk saling percaya, namun itu juga dapat menjadi

“boomerang” bagi kelompok dengan adanya “curahan hati” dari anggota kelompok yang menunjukkan kebencian maupun ketidaksukaan pada anggota lain.

» **Strong Tactics (Cooperative Tactics)**

Ada berbagai cara anggota kelompok untuk mengatasi konflik mereka. Beberapa dari mereka hanya melihat kepada masalah mereka dan berharap masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Beberapa anggota lainnya mendiskusikan masalah mereka, terkadang dengan tenang dan rasional, namun terkadang dengan marah dan keras. Yang lainnya mencari pihak yang netral untuk menjadi moderator dalam konflik tersebut. Dan mirisnya, ada anggota yang menggunakan kekerasan fisik.

Taktik yang digunakan untuk menyelesaikan konflik pada dasarnya ada 4 (empat) kategori yaitu:

(a) *Avoiding* Pada dasarnya taktik ini adalah usaha untuk menghindari konflik tersebut dan berharap konflik itu akan hilang dengan sendirinya. Orang-orang yang mengadopsi taktik ini biasanya menghindari *meeting*, mengubah bahan pembicaraan ataupun keluar dari kelompok tersebut.

(b). *Yielding* Anggota kelompok dalam menyelesaikan masalah yang besar maupun kecil dengan menyerahkan keputusan kepada orang lain. Setelah melalui proses diskusi dan negosiasi, anggota kelompok merasa gagasan mereka salah dan akhirnya menyetujui gagasan anggota kelompok lainnya. *Yielding* biasa terjadi akibat pola pikir anggota yang berubah dan setuju dengan pendapat lainnya ataupun tekanan yang ada di dalam diri mereka.

(c) *Fighting*. Pada sejumlah orang, mereka ingin menyelesaikan konflik dengan memaksa anggota lainnya untuk menerima pandangan mereka. Mereka melihat konflik sebagai situasi menang-kalah dan menggunakan taktik yang kompetitif dan kuat untuk mengintimidasi anggota yang lain.

Dan (d) *Cooperating*. Anggota yang mengandalkan kerjasama dalam mengatasi konflik cenderung mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Mereka tidak memaksakan kehendak dan kompetitif. Alih-alih mereka menunjukkan akar dari permasalahan dan mencari solusi yang tepat untuk masalah mereka. Orientasi ini disebut sebagai win-win solution karena menganggap hasil yang menyangkut orang lain merupakan hasil mereka juga. Metode *avoiding* dan *fighting* dianggap metode yang negatif karena berpotensi melahirkan konflik yang baru dan membiarkan konflik yang ada sehingga tidak terselesaikan.

Di lain pihak metode *yielding* dan *cooperating* merupakan metode yang baik dan menghasilkan solusi yang dapat diterima semua pihak. Sedangkan metode *fighting* dan *cooperating* merupakan metode yang aktif karena adanya usaha nyata untuk menyelesaikan konflik sedangkan metode *avoiding* dan *yielding* merupakan metode yang pasif.

» **Upward (Downward Conflict Spirals)**

Kerjasama yang konsisten di antara orang untuk jangka waktu yang panjang dapat meningkatkan rasa saling percaya. Tetapi ketika anggota kelompok terus bersaing satu sama lain, rasa saling percaya akan menjadi lebih sukar dipahami. Ketika seseorang tidak dapat mempercayai orang lain, maka mereka akan bersaing untuk mempertahankan hal yang menguntungkan dirinya atau hal yang dapat menghilangkan persaingan adalah tit-for-tat atau TFT. Tit-for-tat adalah strategi tawar menawar yang berawal dari kerjasama, tapi kemudian meniru pilihan yang dibuat orang lain. Dengan kata lain, orang akan bersaing jika orang lain bersaing dan orang akan bekerjasama jika orang lain bekerjasama.

1. Many (One)

Individu yang tidak terlibat dalam masalah tidak seharusnya memihak salah satu pihak melainkan harus menjadi mediator dalam konflik tersebut. Pihak ketiga (netral) dapat membantu meredakan konflik dengan cara:

- a) Meredakan frustrasi dan kebencian dengan memberi kedua belah pihak sebuah kesempatan untuk mengungkapkan perasaan mereka;
- b) Jika komunikasi tidak lancar, pihak ketiga dapat membantu untuk meluruskan masalah;
- c) Pihak ketiga dapat menyelamatkan “muka” dari yang berkonflik dengan membebankan kesalahan pada diri mereka sendiri;
- d) Pihak ketiga dapat mengajukan proposal alternatif yang dapat diterima oleh kedua pihak; Pihak ketiga dapat memanipulasi aspek-aspek meeting seperti lokasi, tempat duduk, formalitas komunikasi, batasan waktu, hadirin dan agenda;
- e) Pihak ketiga dapat membimbing semua pihak untuk menggunakan proses penyelesaian masalah secara integratif. Namun, jika pihak-pihak ingin menyelesaikan konflik dengan cara mereka sendiri, maka intervensi dari pihak ketiga akan dianggap sebagai gangguan yang tidak diinginkan. Keefektifan pihak ketiga tergantung dari kekuatan mereka di dalam kelompok. Di dalam prosedur inquisitorial, pihak ketiga akan memberikan pertanyaan kepada kedua belah pihak dan memutuskan hasil yang harus diterima semua pihak. Di dalam *arbitration* kedua belah pihak memberikan argumen-argumen kepada pihak ketiga yang akan membuat sebuah keputusan berdasarkan argumen yang diberikan. Di dalam moot kedua pihak dan

pihak ketiga berdiskusi, di situasi yang terbuka dan tidak formal tentang masalah dan solusi yang memungkinkan.

2. Anger (Composure)

Ketika keadaan “memanas”, anggota kelompok yang bertentangan harus mampu mengontrol emosi mereka. Metode yang efektif untuk mengontrol emosi adalah dengan berhitung 1 sampai 10 atau menyampaikan humor atau lelucon di kelompok. Humor dapat memberikan emosi yang positif dan dapat meredakan emosi yang negatif seperti amarah. Kelompok juga dapat melestarikan budaya seperti pelarangan penunjukan emosi negatif, salah satu contohnya adalah amarah. Resolusi yang dikemukakan diatas adalah proses menangani konflik yang sedang dan sudah terjadi, sebaiknya pada tim mediator yang di bentuk harus memahami akar masalah konflik sebelum sebelum melakukan tindakannya dalam upaya menemukan perdamaian yang abadi.***

IV. KESIMPULAN

Metode resolusi konflik dapat dilaksanakan melalui konsep tata kelola konflik (*conflict governance*). Konsep tersebut melibatkan penggunaan seluruh sumber daya yang ada, disertai strategi yang tepat, sehingga tujuan dari resolusi tersebut dapat dicapai dengan baik. Resolusi konflik dapat dicapai dengan 2 (dua) cara, yakni pengaturan sendiri oleh pihak- pihak yang berkonflik (*self regulation*), dan melalui intervensi pihak ketiga (*third*).

Resolusi konflik keagamaan di Indonesia sangat penting untuk tetap dikembangkan dan dijaga sebagai upaya pertahanan negara karena masalah keagamaan adalah hal yang sangat sensitive dan perlu kehati-hatian dalam penanggulangan konflik saat terjadi agar kedaulan RI tidak terpecah belah karena

kesalahan penanganan konflik tersebut oleh pihak yang berwenang.

Sumber:

Yusuf, 2021, *Resolusi Konflik Keagamaan*, CV. Aksara Global Akademia, Indonesia.

TENTANG PENULIS



Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Suhirwan, S.T., M.MT., CIQaR., CIQnR., IPU. Lahir di kota Sejuk Curup, Kabupaten Rejang Lebong adalah putra daerah asli dari suku Rejang Propinsi Bengkulu. Menghabiskan masa kecil dan remaja di kota kelahirannya. Karier militer dimulai pada saat masuk Akademi TNI AL (AAL) Surabaya pada tahun 1983, dan dilantik sebagai Perwira Muda TNI AL dengan Pangkat Letnan Dua (E) pada tahun 1987 yang dikenal dengan Angkatan '87 atau "LAJU". Berbagai Pendidikan Militer dan Pendidikan Tinggi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Umum) pernah dilaksanakan, dengan bekal pengetahuan militer dan umum ini sudah banyak penugasan yang dijalankan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebagai "LULUSAN TERBAIK" STTAL XVII Jurusan Elektronika tahun 1999 dengan Penghargaan "DHARMA VIDYA ADHIGUNA", Lulus pendidikan S2 di Manajemen Industri ITS tahun 2007 dan menyelesaikan pendidikan S3 dalam bidang Ilmu Administrasi di Universitas 17 Agustus Surabaya tahun 2016. Pada bulan Desember 2019, Perwira Tinggi TNI AL ini diberikan amanah untuk menjabat sebagai Wakil Rektor III Bidang Kerjasama, Universitas Pertahanan (Unhan) di Sentul Bogor-Jawa Barat. ***

TENTANG PENULIS



Laksamana Muda TNI Dr. Kasih Prihantoro, S.E., M.M., M.Tr.(Han). Lahir di Purbalingga, tanggal 6 Januari 1965. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan RI. Jabatan sebelumnya, diantaranya: adalah Aslog Guskamla Koarmatim, Aslog Lantamal 1 Belawan Koarmabar, Kadismatbek Koarmabar, Danpuspeknubika Kobangdikal, Aslog Dankodikdukkum Kobangdikal, Aslog Koarmatim, Dirbin Seskoal, Kadismatal Mabes TNI AL, Kadislitbang Mabes TNI AL. Pendidikan Umum S1 Manajemen, S2 Magister Manajemen dan S2 Strategi dan Kampanye Militer Unhan, S3 Administrasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pendidikan Militer, Akademi Angkatan Laut (AAL) ke 33/1988 Seskoal angkatan 41/2003, Dikreg Sesko TNI Angkatan 39 Tahun 2012 dan Dikreg PPRA Angkatan 56 Lemhanas RI tahun 2017. Tanda jasa yang di miliki BT. Jalasena Nararya, SL. Seroja, SL. Kesetiaan VIII SL. Kesetiaan XVI, SL. Kesetiaan XXIV, Sl. Dwidya Sista, Sl. Kebaktian Sosial. SL. Wira Dharma (Perbatasan). SL. Wira Nusa SL. Dharma Nusa.***

TENTANG PENULIS



Kolonel Laut (E) Dr. Lukman Yudho Prakoso., S.IP., MAP, CIQaR. Saat ini menjabat sebagai Sesprodi Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan RI. Penulis juga sebagai Dosen Tetap di Prodi Strategi Pertahanan Laut- Fakultas Strategi Pertahanan-Unhan RI. Lahir di Cirebon, 9 Juli 1973, Lulus dari Akademi TNI AL (AAL) tahun 1994, Seskoal Angkatan 47/tahun 2009. Pendidikan S1 di Universitas Terbuka Jurusan Administrasi Negara, S2 Universitas Hang Tuah Jurusan Magister Administrasi Publik dan S3 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jurusan Administrasi. Pengalaman Penugasan diantaranya adalah di Satkor Koatmatim, Satsurvei Dishisroos, Diskomlek Mabesa TNI AL, Satgas Corvette Class KRI DPN-365- Disadal TNI AL, Arsenal Disenlek TNI AL, AAL Surabaya, Satgas MLM KRI Fatahila-361 – Disadal TNI AL, Puslitbang Strahan-Balitbang Kemhan RI, Pokgadik Kodiklat TNI AL, LP3M-Universitas Pertahanan RI. Prestasi akademik diantaranya lulusan terbaik Dikpafung II Hidroos 2002, Lulus S2 dengan Predikat Cumlaude 2013, Lulus S3 dengan Predikat Cumlaude 2016, Dosen Tutor Online Terbaik Universitas Terbuka 2019. Tanda Jasa yang dimiliki Kesetiaan VIII, XVI, XXIV Tahun serta Jalsena Nararya.***

TENTANG PENULIS



Kolonel (Kes) Dr. Ir. Sovian Aritonang, S.Si., M.Si, Saat ini penulis menjabat sebagai Sesprodi Teknologi Daya Gerak, Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan, pernah menjabat sebagai Sesprodi Keamanan Energi dan Sesprodi Industri Pertahanan, Universitas Pertahanan. Untuk jabatan kemiliteran saat ini sebagai Perwira Menengah dengan Pangkat Kolonel Kes, di Angkatan Udara Republik Indonesia. Penulis mempunyai latar belakang pendidikan Fisika dari USU (1993), Magister Sains (M.Si) Fisika Bio Material dari Universitas Indonesia, serta Doctor (Dr) Rekayasa Bio Material dari Universitas Indonesia (UI). Selain pendidikan umum, Pendidikan kemiliteran yang pernah ditempuh yaitu: Kursus alat Human Centrifuge (HC) di Late Coere Prancis th 2000, Kursus Physiological Training Officer di Lakespra Saryanto, SEKKAU Angkatan 80, SESKOAU Angkatan 48 di Lembang Bandung, Jawa Barat. Disamping pengalaman diatas, beberapa penugasan Dinas ke Luar Negeri yaitu ke Perancis, Brunai, Kamboja, Singapura, Thailand, Malaysia, India, USA, Swiss, serta Korea Selatan.***

TENTANG PENULIS



Dr. Budi Pramono, SIP., M.M., M.A., (GSC), CIQar., CIQnR. Lahir di Sidoarjo pada 1967. Meraih dua gelar Magister, di Hull University Inggris di Bidang Studi Keamanan dan Strategi (1998) dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (2005). Setelah lulus Akademi Militer Magelang pada 1988, bertugas di pasukan strategis TNI AD (KOSTRAD) selama sepuluh tahun, kemudian berkiprah di dunia inteligen (BAIS). Penulis memiliki banyak pengalaman mengikuti berbagai kursus Pendidikan Militer, beberapa diantaranya adalah: *Austfamil Course (SUSLAPA II-ART) Australia (1996), National Security Intelligence Training Course di Taiwan (1999), Command and General Staff College, Sekolah Staff Umum dan Komando di Manila (2001), lulus terbaik dengan penghargaan (Honor Graduate): United Nations logistic Course di Port Dickson (2002), Austfamil Course di Laverton Australia (2003), dan Emergency Management di Australia, U.N. Military Observer Course, Port Dickson (2004).*

Disamping sering menjadi pembicara pada konferensi nasional maupun internasional, serta melakukan penelitian ilmiah, penulis pun sudah aktif menghasilkan banyak karya buku, diantaranya adalah: "Transformation of Indonesia Counter-Terrorism". (Terrorism and Disaster, Rajawali Pers, 2018), "The Role of Indonesia in Asean Security", (Terrorism and

*Disarter, Rajawali Pers, 2018), “Tanpa Senjata, Konsep dan Praktik Operasi Militer selain Perang di Indonesia” (Unhan Press, 2021), “Politics & National Defense” (Aksara Global Akademia, 2021). “Indonesian Politics” (Aksara Global Akademia, 2021). Saat ini penulis berprofesi sebagai Dosen Tetap Universitas Pertahanan RI dan terus berkiprah dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.****



Brigjen TNI (Purn) Dr. Yusuf, S.Sos., MM, Lahir di Bandung tahun 1963, menyelesaikan studi AKMIL dan bekerja sebagai TNI AD, dan menyelesaikan studi S3 di Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeritas Padjadjaran, lulus pada tahun 2017, dengan judul Disertasi: Anatomi dan Resolusi Konflik Keagamaan dengan Pendekatan

Sosiologi. Beliau saat ini selain aktif sebagai TNI juga menjabat sebagai Karo Akademik dan Kemahasiswaan Unhan. Semangatnya dalam menyebarkan ilmu pengetahuan mengenai bela negara dan kepemimpinan terus di dalaminya dalam peran sertanya sebagai Dosen di Universitas Pertahanan. Saat ini beliau mulai aktif menulis buku dan artikel guna mengembangkan bidang keilmuannya di bidang ilmu sosial maupun militer bagi kalangan akademisi maupun umum. ***

TENTANG PENULIS



Mayjen TNI (Purn) Dr. Drs. Tahan Samuel Lumban Toruan, MM., Dipl. SS., CIQaR, lahir di Lintong Nihuta tanggal 3 Juni 1958, Mengikuti Pendidikan Militer Umum antara lain: Akabri Darat Lulus Tahun 1981; Seskoad di Bandung Lulus Tahun 1995; Sesko TNI di Bandung Lulus Tahun 2005; Lemhannas di Australia (*Australia*

Center for Defence and Strategic Studies/CDDS- Australia) lulus tahun 2007. Penulis banyak mengikuti Pendidikan Pengembangan/Spesialisasi Militer, Kursus Pembantu Umum Asisten Pertahanan RI; Kursus Analis Intelijen (Jerman); Kursus Perwira Intelijen Strategis TNI Tk-II; Kursus Bahasa Inggris Atase Pertahan RI; Kursus Atase Pertahanan; ADC. Prep. Course (Australia); ADC Advance English Course (Australia). Penulis saat ini menjabat sebagai Dosen Tetap Fakultas Strategi Pertahanan UNHAN RI. Selain itu, Penulis juga membantu anggota Komisi I DPR RI sebagai Tenaga Ahli. Penghargaan/Tanda Jasa yang diterima antara lain: -Satya Lencana (S.L); -S.L. Kesetiaan VIII THN; -S.L. Kesetiaan XVI THN; -S.L. Kesetiaan XXIV THN; -S.L. Kesetiaan XXXII THN; -S.L. Dharma Bantala; -Bintang Kartika Eka Paksi Nararya; -Bintang Kartika Eka Paksi Pratama; -Bintang Yudha Dharma Nararya; -Bintang Yudha Dharma Pratama. Penghargaan Akademis yang pernah diterima antara lain: Penerima “Karya Wira Nugraha” Penulisan Taskap Terbaik Sesko TNI Tahun 2005; dan Wisudawan Cum laude Program S-3/Doktoral MSDM UNJ tahun 2015. Selain itu, Penulis juga pemegang Sertifikat Pendidik Profesional.***

TENTANG EDITOR



Mia Kusmiati, MM, CT: adalah seorang dosen kelahiran kota Garut, Nopember 1979. Sebagai Dosen Tetap di salah satu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Jawa Barat, yaitu STIE “Yasa Anggana” dengan jabatan fungsional Lektor, pengalaman mengampu mata kuliah Statistik, Riset Operasi, Metodologi Penelitian dan Manajemen Operasional, Disamping sebagai dosen dan tutor online di UT Jakarta beliau saat ini aktif sebagai Penulis dan Editor Buku Perguruan Tinggi. Seorang pengajar yang antusias dengan berbagai pendekatan metode pengajaran dan penggiat literasi di kalangan masyarakat akademisi. Dalam menunjang keprofesionalannya, selain memiliki sertifikat Pekerti dari Dikti, beliau pun telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai trainer dari BNSP.

Buku yang sudah diterbitkannya diantaranya: Entrepreneurship Development Management (2020), Manajemen Operasi dan Produksi (2021), Buku Bilingual “The enterpreneur toll road routes” (2021), Sebagai Editor buku “Strategic Management in Organization (2020), Leadership Management & Personality Development (2021), Omnichannel Marketing (2021), Metode SWOT AHP, dalam Merencanakan Strategi Pertahanan (2021), Operasionalisasi KRI TNI, Pendekatan Model Matematis (2021), dll***

Pengantar:
Prof. Dr. Ir. Supartono, MM., CIQaR

E-BOOK

BUNGA RAMPAI

PERTAHANAN NEGARA

CATATAN 7 PRAJURIT AKADEMISI



76 Indonesia
Merdeka

Penulis:

SUHIRWAN
KASIH PRIHANTORO
LUKMAN YUDHO PRAKOSO
SOVIAN ARITONANG
BUDI PRAMONO
TSL TORUAN
YUSUF

Editor:

Mia Kusmiati

